



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADIKAN CINA SEBAGAI
KEKUATAN EKONOMI BARU DI WTO (2001-2009)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
(M.Si.) dalam Ilmu Hubungan Internasional**

YOAN PANJAITAN

0806438774

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jakarta

Juni 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Yoan Panjaitan

NPM : 0806438774

Tanda Tangan :




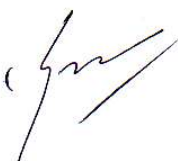
Tanggal : 13 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Yoan Panjaitan
NPM : 0806438776
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis : Faktor-Faktor yang menjadikan Cina sebagai
Kekuatan Ekonomi Baru di WTO (2001-2009)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Andi Widjajanto, MS, M.Sc	()
Sekretaris Sidang	: Asra Virgianita, M.A.	()
Pembimbing	: Prof. Zainuddin Djafar, Ph.D	()
Penguji Ahli	: Syamsul Hadi, Ph.D	()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 20 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar M. Si Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UI. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, dari awal perkuliahan hingga penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Zainuddin Djafar, Ph.D, selaku pembimbing yang telah bersedia mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis agar tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
- 2) Dr. Syamsul Hadi selaku penguji ahli yang telah banyak memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru dan mendalam di tesis ini.
- 3) Andi Widjajanto, MS, M.Sc selaku ketua sidang yang memberikan banyak masukan dalam tesis ini.
- 4) Asra Virgianita. M.A selaku sekretaris sidang yang juga memberikan banyak masukan dalam tesis ini.
- 5) Seluruh staf Sekretariat Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI yang sangat membantu penulis selama proses belajar.
- 6) Keluarga penulis, khususnya suami yang selalu menemani dalam penulisan tesis ini dan anak-anak yang selalu menghibur di tengah kesuntukan mengetik serta orang tua, kakak maupun adik penulis yang tidak pernah bosan dalam menyemangati proses penulisan tesis ini.
- 7) Rekan-rekan Pascasarjana Angkatan 16 serta 17 yang meski telah lulus lebih dulu namun senantiasa menemani dan mengingatkan penulis mengenai perkembangan penulisan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa akan membalas semua bantuan yang telah diberikan kepada saya. Semoga, tesis ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 13 Juni 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoan Panjaitan
NPM : 0806438774
Program Studi : Pascasarjana
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Faktor-Faktor yang menjadikan Cina sebagai Kekuatan Ekonomi Baru di WTO (2001-2009).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Juni 2011
Yang menyatakan

(Yoan Panjaitan)

ABSTRAK

Nama : Yoan Panjaitan
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis : Faktor-Faktor yang Menjadikan Cina sebagai Kekuatan
Ekonomi Baru di WTO (2001-2009).

Tesis ini membahas mengenai Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di WTO dalam periode 2001-2009. Dengan menggunakan pendekatan neorealis, keberhasilan Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di WTO tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal negara tersebut. Penulisan tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan di dalam melihat faktor internal dan eksternal Cina yang merujuk pada kemampuan negara tersebut baik di tingkat domestik maupun internasional. Hasil penulisan tesis menunjukkan keberhasilan Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di WTO yang relatif dapat diukur dengan berbagai indikator ekonomi.

Kata Kunci:

Kekuatan ekonomi, Neo-realis, Cina, WTO.

ABSTRACT

Nama : Yoan Panjaitan
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis : China as A New Economic Power in WTO: An Analysis
(2001-2009)

This thesis research is trying to analyse and define China as a new economic power in WTO during 2001-2009. With Neorealist Theoretical Framework, it was analysed and defined that internal and external of China's capability play an important role for its success as a new economic power within WTO. This thesis research method is a qualitative method by library study to determine China's internal and external capability. It is known that eventually, China is a new economic power in WTO that can be measured with some indicators.

Keywords:

Economic Power, Neo-realis, China, WTO

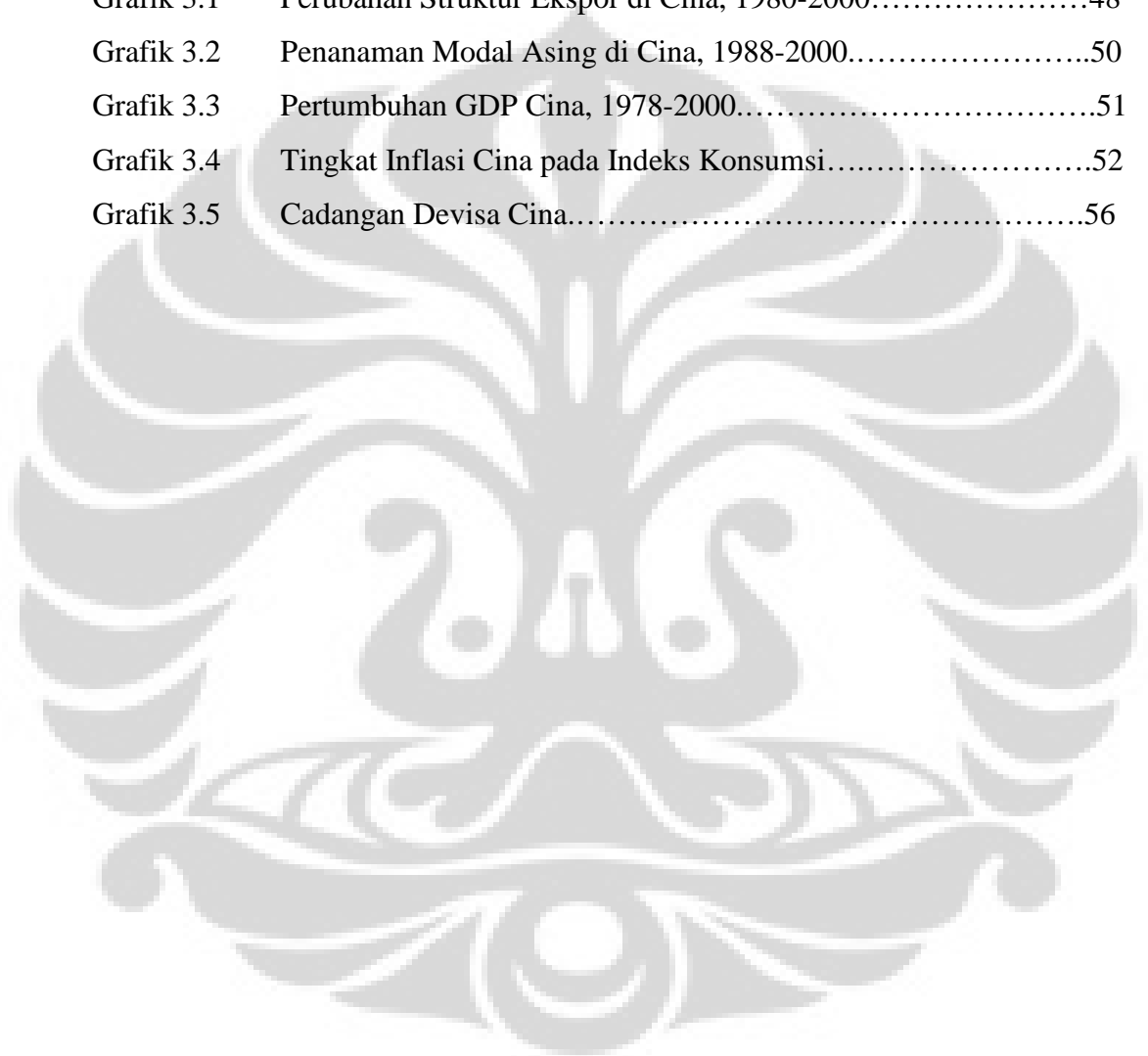
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR TABEL	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Kerangka Pemikiran	13
1.4.1 Tinjauan Pustaka	13
1.4.2 Kerangka Teori	16
1.5 Hubungan Antar Variabel	21
1.6 Model Analisis	22
1.7 Hipotesa	22
1.8 Metode Penelitian	22
1.9 Sistematika Penulisan	23
2. Cina Sebagai Kekuatan Baru di WTO	24
2.1 Kekuatan Ekonomi atau <i>Economic Power</i>	24
2.2 Cina Sebagai Kekuatan Baru di WTO	32
2.3.1 Tahun 2002-2005	32
2.3.2 Tahun 2006	37
2.3.3 Tahun 2007	40
2.3.4 Tahun 2008	42
2.3.5 Tahun 2009	44
2.4 Kesimpulan	46
3. Faktor Internal dan Eksternal Cina	47
3.1 Faktor Internal	48
3.2 Faktor Eksternal	58
3.2.1 Biaya Ekonomi Keanggotaan Cina di WTO.....	58
3.2.2 Kendala Struktural Keanggotaan Cina di WTO	61
I. Kendala Struktural Domestik	61

I.1	Model Negara, Sistem Politik dan Pemerintahan Cina	61
I.2	Sistem Ekonomi Cina	65
II.	Kendala Struktural Eksternal/ Internasional	70
II.1	Normatif	70
II.1.1	Transformasi GATT ke	70
II.1.2	Prinsip-Prinsip WTO.....	74
II.1.3	Struktur dan Kewenangan WTO	79
II.1.4	Persetujuan-Persetujuan WTO....	84
II.1.5	Keanggotaan di WTO	85
II.2	Kendala Struktural Politis	86
3.3	Kebijakan Cina Pasca Akses WTO	88
3.3.1	Komitmen Cina di WTO	88
3.3.2	Implementasi Parsial Komitmen Cina di WTO	93
3.3.3	Signifikansi WTO bagi Cina	97
3.4	Kesimpulan	100
4.	Kesimpulan	102
4.1	Kesimpulan	102
4.2	Saran	102
	Daftar Pustaka	104

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	UE dan Pemain Utama Perdagangan Tekstil Internasional, 2005.....	36
Grafik 2.2	Pertumbuhan Pasar Seluler, Kredit Perumahan & Automotif.....	44
Grafik 3.1	Perubahan Struktur Ekspor di Cina, 1980-2000.....	48
Grafik 3.2	Penanaman Modal Asing di Cina, 1988-2000.....	50
Grafik 3.3	Pertumbuhan GDP Cina, 1978-2000.....	51
Grafik 3.4	Tingkat Inflasi Cina pada Indeks Konsumsi.....	52
Grafik 3.5	Cadangan Devisa Cina.....	56



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Marchandise trade: Leading Exporters.....	9
Tabel 1.2	Volume Perdagangan Cina dengan Negara-Negara Partner tahun 2007.....	10
Tabel 1.3	GDP (Constant 2000 US\$)	11
Tabel 1.4	Posisi GDP	11
Tabel 2.1	Proyeksi Pertumbuhan GDP dan Inflasi Cina, 2002-2004	33
Tabel 2.2	Perdagangan Tekstil UE-25 dengan 8 Mitra Dagang Terbesar	35
Tabel 2.3	Indikator Ekonomi Cina, Januari-September 2006.....	39
Tabel 2.4	Perdagangan Cina-AS Periode 2001-2007.....	41
Tabel 3.1	Kontribusi Manufaktur Cina terhadap Dunia.....	48
Tabel 3.2	Perdagangan Luar Negeri Cina, 1978 – 94.....	49
Tabel 3.3	Sumber Tabungan Domestik Cina, 1978-2001.....	53
Tabel 3.4	Komponen-komponen Defisit Pemerintahan Cina 1987 – 1993.....	54
Tabel 3.5	Arus Penanaman Modal Asing.....	57
Tabel 3.6	Evolusi Sistem Ekonomi.....	65
Tabel 3.7	Evolusi Ideologi Cina.....	66
Tabel 3.8	The GATT Trade Rounds.....	69
Tabel 3.9	Persetujuan-Persetujuan WTO.....	86

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks ekonomi, globalisasi merupakan serangkaian fenomena ekonomi. Mencakup liberalisasi dan deregulasi pasar, privatisasi aset, pengurangan fungsi negara, persebaran teknologi, distribusi produksi manufaktur lintas negara (penanaman modal asing langsung), dan terintegrasinya pasar modal. Globalisasi ekonomi juga ditandai dengan makin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena adanya kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi, lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara yang semakin terbuka, maksimalisasi penggunaan keunggulan komparatif dan kompetitif tiap negara, metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien, semakin pesatnya perkembangan perusahaan nasional, dan sebagainya.

Menurut Thomas Friedman di dalam harian *New York Times* mengatakan bahwa globalisasi memiliki tiga dimensi, yaitu: *pertama*, dimensi ideologi yaitu “kapitalisme”. Dalam pengertian ini, termasuk seperangkat nilai yang menyertainya, yaitu falsafah individualisme dan hak asasi manusia. *Kedua*, dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas dengan seperangkat tata nilai lain yang harus membuka kesepakatan terbukanya arus barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. *Ketiga*, dimensi teknologi, khususnya teknologi informasi, sehingga akan terbuka batas-batas negara yang menjadikan negara makin tanpa batas (*borderless*).¹

Hubungan saling ketergantungan dalam sistem perekonomian menyebabkan sistem ekonomi nasional cenderung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi global. Aktivitas ekonomi berlangsung dalam gerak arus barang, jasa, dan uang di dunia secara dinamis sesuai dengan prinsip ekonomi. Berbagai hambatan seperti proteksionisme perdagangan, larangan investasi devisa dan moneter yang mengekang arus jasa dan kapital internasional

¹ R. Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 225-226.

menjadi tidak relevan lagi. Dalam kondisi seperti ini negara harus beradaptasi dengan tuntutan dunia yang telah mengalami globalisasi, karena bagi ekonomi nasional, dampak ini akan berlangsung melalui tiga mekanisme, yakni tekanan perdagangan yang semakin kompetitif, multinasionalisasi produksi, dan integrasi pasar keuangan.²

Negara merupakan elemen yang penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi, bukan pemberi langsung pertumbuhan, tetapi sebagai mitra, katalis dan fasilitator. Oleh karena itu, negara yang efektif adalah sangat penting untuk memberikan barang-barang dan jasa dan sekaligus aturan-aturan beserta lembaga-lembaganya dapat mendorong pasar berkembang dan rakyat sejahtera.³

Selama ini setiap negara umumnya meyakini bahwa tidak satupun negara di dunia yang dapat mengisolasi diri dari proses globalisasi. Dengan demikian penerapan perdagangan bebas dan investasi bebas merupakan pilihan baik yang harus dilaksanakan. Sudah banyak studi yang mengungkapkan peranan perdagangan yang lebih bebas terhadap perekonomian, baik terhadap volume perdagangan, nilai perdagangan, maupun pendapatan nasional.

Meski demikian, kenyataan menunjukkan lain, dimana hasil studi lain juga membuktikan bahwa manfaat yang timbul tidak sama bagi setiap negara. Bahkan yang lebih memprihatinkan, ternyata yang paling banyak menerima manfaat adalah negara-negara maju dan bukan negara-negara berkembang atau negara yang paling membutuhkan.⁴ Dari arus globalisasi ekonomi ini ternyata telah memperlihatkan kepada kita jurang perbedaan antara kelompok negara-negara kaya dan miskin justru semakin lebar.⁵ Proses globalisasi ekonomi berakibat juga pada semakin menipisnya peran negara, tidak lagi memiliki sumber-sumber tanpa batas yang dapat dimanfaatkan secara bebas.

Dalam globalisasi yang terjadi saat ini peran negara secara meyakinkan akan digantikan oleh peran penting yang semakin meningkat dari aktor-aktor non-teritorial, seperti salah satunya adalah Organisasi Perdagangan Dunia atau *World*

² Geoffrey Garret, *Global Markets and National Politics*, dalam David Held and Anthony McGrew, *The Global Transformation: A Reader*, Polity Press, Cambridge, 2000, hal. 302.

³ R. Hendra Halwani, *Op. Cit.*, hal. 235.

⁴ *Ibid.*, hal. 228.

⁵ *Ibid.*, hal. 227.

Trade Organization (WTO). WTO merupakan organisasi internasional yang kuat dalam mewujudkan perdagangan bebas.⁶ Optimisme utama bahwa WTO akan membantu menciptakan perdagangan dunia yang lebih bebas dan adil. Dikemukakan dasar ekonomi yang digunakan bahwa semakin bebas perdagangan, semakin besar arus laba, baik negara maupun pelaku perdagangan, maka masyarakat dunia akan semakin sejahtera.⁷

WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. WTO terbentuk sebagai hasil dari Putaran Uruguay dan aktif beroperasi sejak 1 Januari 1995 sebagai transformasi dari *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Berbeda dengan pendahulunya (GATT), WTO tidak hanya menetapkan standar minimal perdagangan barang namun meluas ke sektor pertanian, jasa dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). WTO juga mengikat secara hukum, memiliki badan penyelesaian sengketa yang terintegrasi dan dapat menerapkan sanksi silang. Secara sederhana, WTO mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan internasional.

Prinsip dasar WTO terdiri dari tiga pokok. *Pertama*, hubungan perdagangan internasional didasarkan atas “prinsip *resiprositas*”, artinya pada dasarnya perlakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagang negara tersebut, perlakuan tersebut bersifat timbal balik. *Kedua* adalah prinsip perlakuan sama atau non diskriminasi. Dikenal sebagai prinsip “*most favoured nation* (MFN)”, artinya apabila mengistimewakan suatu negara, maka keistimewaan tersebut juga harus berlaku bagi negara-negara lain. Dengan kata lain, perlakuan istimewa harus berlaku umum, dilarang melakukan diskriminasi, semua negara diperlakukan *most favoured*. Jadi sebenarnya yang diinginkan tidak boleh mengistimewakan suatu negara. *Terakhir* yaitu “*transparancy*”. Artinya, perlakuan dan kebijakan yang dilaksanakan suatu negara harus transparan, dapat diketahui oleh mitra dagangnya. Negara-negara anggota harus selalu mengumumkan perubahan-perubahan kebijakan atau aturan berkaitan dengan seluruh perjanjian WTO kepada seluruh anggota.⁸

⁶ *Ibid.*, hal. 235.

⁷ Hira Jhamtani, *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, Insist Press, Yogyakarta, 2005, hal. 9.

⁸ R. Hendra Halwani, *Op. Cit.*, hal. 345.

WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian, yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir, dan importir dalam melakukan kegiatannya. Lebih lanjut, WTO merupakan forum untuk menegosiasikan perjanjian baru atau perjanjian lama. Tujuannya untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional dan menciptakan *level playing field* bagi seluruh negara anggota, serta membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Seperti halnya globalisasi ekonomi, ketidaksetaraan juga terjadi di dalam WTO antara negara maju dan negara-negara. Walaupun jumlah anggota negara berkembang dalam WTO sekitar 80 persen, namun tetap saja negara maju terutama AS dan Uni Eropa mendominasi proses pengambilan keputusan dalam sidang-sidang menteri anggota WTO.⁹ Banyak kebijakan WTO yang dibuat berdasarkan kepentingan AS dan negara-negara industri lainnya. Kebijakan-kebijakan WTO sendiri banyak mendapatkan kontroversi bagi negara berkembang. AS membela keberadaan kartel-kartel global dalam industri baja dan aluminium karena industri domestiknya terancam oleh impor produk-produk ini.¹⁰ Honduras menuduh Uni Eropa telah bertindak illegal dengan menolak sejumlah aturan WTO yang diterapkan negara-negara Amerika Latin. Negara Latin menganggap rezim tarif Brussels secara serius membatasi kemampuan mereka untuk mengekspor buah-buahan.¹¹ Selain Honduras, negara-negara produsen kapas dari Afrika juga memperingatkan bahwa mereka akan menolak mengesahkan sejumlah konsensus jika negara-negara kaya tidak mengurangi subsidi kapas secara resmi.¹² Joseph E. Stiglitz dalam “*Globalization dan its Discontents*” (2002) mengkritik pemaksaan AS atas negara-negara berkembang untuk membuka pasar produk mereka, sementara itu menutup pasarnya atas masuknya produk tekstil dan pertanian. Adanya keengganan negara-negara maju untuk memenuhi komitmennya yang diwujudkan dengan adanya proteksi melalui

⁹ Bob Widyahartono, *Bangkitnya Naga Besar Asia: Peta Politik, Ekonomi, dan Sosial China Menuju China Baru*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004, hal. 92.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 102.

¹¹ <http://kompas.com/kompas-cetak/0512/16/ln/2292674.htm>, diakses pada 19 Mei 2010, pukul 01.58 WIB.

¹² *Ibid.*

penerapan tarif impor komoditi pertanian yang tinggi serta pemberian berbagai fasilitas subsidi, baik dalam bentuk dukungan domestik maupun subsidi ekspor. Ini bertolak belakang dengan sikap negara-negara berkembang yang sudah meliberalisasikan pasar pertanian domestiknya.¹³

Berdasarkan laporan dari *Third World Network & UNDP*, 2001, paling tidak masalah yang dihadapi negara berkembang berkaitan dengan WTO, antara lain:

1. Struktur sistem dan perjanjian WTO tidak adil terhadap kepentingan negara berkembang. Contoh, subsidi yang biasa diterapkan oleh negara-negara maju (untuk riset dan adaptasi pada lingkungan) dimasukkan dalam kelompok *non-actionable subsidy*, yaitu subsidi yang tidak terkena ketentuan pembalasan silang, sementara subsidi yang biasa diberikan oleh negara-negara berkembang (untuk diversifikasi, pengembangan teknologi, dan semacamnya) justru dimasukkan dalam kategori *actionable subsidy*, sehingga menimbulkan pengaduan apabila dianggap mengacaukan pasar.
2. Keuntungan yang diharapkan oleh negara berkembang ketika bergabung dengan WTO, ternyata tidak terwujud. Salah satu alasan utamanya karena negara-negara maju gagal memenuhi komitmen mereka. Negara berkembang terus ditekan untuk meliberalisasi pasarnya, sementara negara maju memproteksi pasar mereka.
3. Negara berkembang terus ditekan untuk menerima isu-isu baru dan menyepakati perundingan baru di bidang perdagangan.
4. Proses pengambilan keputusan di dalam WTO tidak transparan dan tidak adil, sehingga negara berkembang tidak dapat berpartisipasi secara penuh untuk merumuskan perjanjian yang ada, ataupun menyampaikan pendapat dan masalah mereka. Untuk negara berkembang sendiri, WTO belum dirasakan cukup membantu dalam perekonomian internasionalnya.¹⁴

¹³ Ferry J. Juliantono, *Pertanian Indonesia di bawah Rezim WTO*, Penerbit Banan, Jakarta, 2007, hal. 82.

¹⁴ Hira Jhamtani, *Op. Cit.*, hal. 43-44.

Berbagai perselisihan tidak hanya terjadi antara negara maju dengan negara berkembang. Salah satunya bahkan terjadi diantara anggota *Quad* (Gang Empat dengan anggotanya Uni Eropa, Jepang, AS dan Kanada) yang merupakan kelompok kekuasaan (*power bloc*). AS mengatakan bahwa tindakan Uni Eropa sebagai perlakuan tidak adil (diskriminasi) terhadap pisang produksi perusahaan-perusahaan AS di Amerika Tengah. Uni Eropa lebih menyukai pisang yang berasal dari Karibia, negara bekas jajahan mereka. Gugatan AS terhadap Uni Eropa dibawa ke panel penyelesaian sengketa di WTO yang memutuskan bahwa Uni Eropa melanggar ketentuan WTO.¹⁵

1.2 Rumusan Masalah

Globalisasi menimpa Cina dan Cina masuk ke dalamnya. Bangsa Cina, menariknya, dengan penuh semangat menyambut datangnya globalisasi. Deng Xiaoping menciptakan slogan yang tepat: *Gaige, kaifang* (Reformasi dan Membuka Diri). Hal ini menjadikan Cina menganut prinsip ekonomi pasar bebas, meski belum sepenuhnya. Dampaknya adalah gelombang pasang kapitalisme Cina yang menerpa wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Sejak tahun 1990, Cina menjadi penghasil TV terbesar dunia, kemudian lima tahun kemudian menjadi penghasil semen terbesar dunia. Tahun 1998, Cina telah menduduki tempat tertinggi di dunia sebagai produsen pupuk buatan dan baja. Sementara itu, secara perlahan tapi pasti Cina menjadi penghasil banyak barang elektronik, termasuk komputer; yang memasuki peringkat atas dunia.

Dilihat dari struktur ekspornya, Cina bukan lagi pengeksport produk primer/hasil pertanian. Pada tahun 1980-an, ekspor barang-barang manufaktur masih di bawah ekspor hasil pertanian, tapi di tahun 1990-an perbandingan menjadi terbalik. Yang mengalami kenaikan cepat adalah ekspor barang-barang elektronik dan mesin. Dari sekitar 15 miliar US Dollar pada 1980 menjadi lebih dari 40 miliar US Dollar pada akhir 2000.

Tumbuhnya perekonomian Cina dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sejak membuka diri dan mengadakan reformasi, di tahun 1984, ekonomi bertumbuh pada kisaran 15 persen. Tahun 1992, juga mencapai 14

¹⁵ Hira Jhamtani, *Op. Cit*, hal. 25-26.

persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini, selain didukung dari sisi ekspor, juga terkait dengan besarnya penanaman modal asing (*Foreign Direct Investment* – FDI) yang masuk ke Cina. Di tahun 1988 misalnya, jumlah modal asing yang masuk Cuma 2 miliar US Dollar. Tapi di tahun 2000, angka tersebut melejit menjadi lebih dari 45 miliar US Dollar.¹⁶ Keberhasilan ekspor dan masuknya modal asing sesuai dengan transformasi ekonomi Cina yakni pembangunan ekonomi dari pertanian yang subsisten ke ekonomi modern (*industrialized*). Transformasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan globalisasi ekonomi dari autarki ke suatu kapasitas profesional dalam jaringan produksi global.¹⁷ Terkait dengan transformasi ekonomi selanjutnya, masuk menjadi anggota WTO menjadi kampanye nasional besar Cina.

Cina resmi menjadi anggota WTO di tahun 2001. Masuknya Cina ke dalam WTO memerlukan proses dan waktu yang panjang dan lama yang waktu itu masih berupa *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Cina merupakan salah satu pendiri GATT pada 1948. Tetapi pada 1950 Cina yang waktu itu diwakili oleh Republik Cina di Pulau Taiwan memutuskan keluar. Masuk kembali ke dalam GATT dimulai lagi pada 1987. Kemudian terjadi pembantaian berdarah Tian'namen pada 4 Juni 1989. Berhentilah seluruh proses lamaran. Lalu, untuk kedua kalinya, Cina mengajukan lamaran kembali pada tahun 1992. Baru pada tahun 2001, Cina resmi diterima ke dalam WTO.¹⁸

Status keanggotaan WTO memberi Cina akses ke pasar luar negeri yang lebih stabil dan luas, sekaligus menembus pasar negara-negara maju. Seperti yang diungkapkan mantan Presiden Perancis, Jacques Chirac, “Kita menghadapi masalah serius di Eropa. Peningkatan jumlah ekspor tekstil Cina ke negara kita mengancam pekerjaan ribuan buruh. Kita tidak dapat menerima pukulan mematikan pada lapangan kerja sekian banyak pekerja di negara kita”. Kota Aschersleben, Jerman Timur, melalui Shenyang Machine Tool telah memindahkan banyak pekerjaan di Schiess ke Cina pada awal 2005 lalu. Di Swiss, perusahaan ABB telah merencanakan untuk mempekerjakan 5.000 pekerja

¹⁶ I. Wibowo, *Belajar dari Cina*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2004, hal. 25-33.

¹⁷ Bob Widyahartono, *Op. Cit*, hal. 63.

¹⁸ I. Wibowo, *Op. Cit*, hal. 33-35.

¹⁸ Bob Widyahartono, *Op. Cit*, hal. 63.

baru pada 2008 di Cina yang merupakan tambahan dari 7.000 pekerja yang sudah bekerja di Cina. Sementara itu, IBM mengumumkan akan merumahkan 13.000 pekerjanya di Eropa.¹⁹

Dengan terintegrasinya kegiatan perekonomian, perdagangan dan industri Cina dengan pasar global telah menyebabkan terjadinya ekspansi besar-besaran dari industri manufaktur Cina ke seluruh dunia. Status keanggotaan WTO mendorong terbukanya berbagai kegiatan industri di berbagai sektor di tingkat domestic, mulai dari industri manufaktur dan kendaraan bermotor ke *domestic retail and created greater foreign competition*.²⁰ Sebagai contoh adalah industri otomotif Cina, tahun 2001 mencapai 2,1 juta unit, pada tahun 2005 meningkat pesat menjadi 5,7 juta unit yang menjadikan Cina sebagai negara produser mobil terbesar ketiga setelah AS dan Jepang. Dalam industri besi/baja, tahun 2001 produksi Cina 152 juta ton, pada tahun 2005 menjadi 397 juta ton. Ini berarti industri baja/besinya meningkat pesat dalam 4 tahun sehingga menjadikan negara tersebut sebagai *world's top steel producer*.²¹ Hal yang sama juga terjadi dalam *merchandise trade* seperti yang tercatat di dalam *World Trade Report 2009* sebagai berikut:

¹⁹ James Kynge, *Rahasia Sukses Ekonomi Cina: Kebangkitan Cina Menggeser Amerika Serikat Sebagai SuperPower Ekonomi Dunia*, <http://www.bukukita.com/infodetailbuku.php?idBook=4692>, diakses pada 17 Mei 2010 pukul 11.52 WIB.

²⁰ John Wong, *China's Economy in Search of New Development Strategies*, dalam *Saw Swee Hock, ASEAN-China Economic Relations*, ISEAS, Singapore, 2007, hal. 13, dalam Zainuddin Djafar, *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 2008, hal. 85.

²¹ *Ibid.*, hal. 14.

Tabel 1.1
Merchandise trade: leading exporters, 2008
(Billion dollars and percentage)

Rank Exporters	Value	Share	Annual Percentage
			Change
1 Germany	1465	9.1	11
2 China	1428	8.9	17
3 United States	1301	8.1	12
4 Japan	782	4.9	10
5 Netherlands	634	3.9	15
6 France	609	3.8	10
7 Italy	540	3.3	10
8 Belgium	477	3.0	10
9 Russian Federation	472	2.9	33
10 United Kingdom	458	2.8	4
11 Canada	456	2.8	8
12 Korea, Republic of	422	2.6	14
13 Hong Kong, China	370	2.3	6
- domestic export	17	0.1	...
- re-export	353	2.2	...
14 Singapore	338	2.1	13
- domestic export	176	1.1	13
- re-export	162	1.0	13
15 Saudi Arabia	329	2.0	40
16 Mexico	292	1.8	7
17 Spain	268	1.7	6
18 Taipei, Chinese	256	1.6	4
19 United Arab Emirates	232	1.4	28
20 Switzerland	200	1.2	16
21 Malaysia	200	1.2	13
22 Brazil	198	1.2	23
23 Australia	187	1.2	33
24 Sweden	184	1.1	9
25 Austria	182	1.1	11
26 India	179	1.1	22
27 Thailand	178	1.1	17
28 Poland	168	1.0	20
29 Norway	168	1.0	23
30 Czech Republic	147	0.9	20
Total of above	13120	81.4	-
World	16127	100	15

Sumber: WTO *Secretariat*

Cina telah berhasil mengirimkan barang-barang hasil produksinya untuk diekspor ke seluruh negara di dunia.²² Pada tahun 2007, untuk pertama kalinya nilai total ekspor Cina sebesar 1.218 miliar dolar melebihi nilai total ekspor

²² I. Wibowo dan Syamsul Hadi, *Merangkul Cina*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2009, hal. 284.

Amerika Serikat (AS) sebesar 1.162 miliar dolar.²³ Volume perdagangan Cina seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:²⁴

Tabel 1.2
Volume Perdagangan Cina dengan Negara-Negara Partner Tahun 2007

Country Name	Total in Billion US\$
United States	302.1
Japan	236
Hong Kong	197.2
South Korea	159.9
Taiwan	124.5
Germany	94.1
Russia	48.2
Singapore	47.2
Malaysia	46.4
The Netherlands	46.3

Sumber: *People's Republic of China Administration of Custom, China's Custom Statistic*

Sesuai laporan Bank Dunia, angka *Gross Domestic Product* Cina dan sebagian negara maju adalah sebagai berikut:

²³ Wayne M. Morrison, *CRS Report for Congress – China's Economic Conditions*, http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/key_workplace/499/, diakses pada 30 Maret 2010 pukul 11.32 WIB

²⁴ Xie Hao, *The Relation Between China's Economic Growth and Sino-US Trade*, Lund University, <http://biblioteket.ehl.lu.se/olle/papers/0002992.pdf>, hal. 34, diakses pada 29 Maret 2009 pukul 10.29 WIB.

Tabel 1.3
GDP (Constant 2000 US\$)
(Billion Dollars)

Year	China	France	Germany	Japan	United Kingdom	United States
2002	1,416,070	1,366,470	1,923,780	4,688,320	1,545,700	9,997,600
2003	1,557,670	1,381,330	1,919,600	4,754,590	1,589,250	10,249,800
2004	1,715,000	1,415,470	1,942,790	4,886,300	1,633,080	10,623,900
2005	1,908,790	1,442,300	1,957,420	4,980,840	1,668,570	10,948,400
2006	2,151,210	1,474,280	2,019,360	5,082,420	1,716,170	11,241,000
2007	2,456,680	1,509,280	2,069,150	5,202,510	1,760,090	11,481,800
2008	2,692,530	1,512,560	2,095,180	5,139,980	1,769,730	11,532,100
2009	2,937,550	1,472,800	1,991,810	4,870,450	1,682,660	11,250,700

Sumber: Bank Dunia

Dengan demikian, posisi tiap negara berdasarkan GDP tiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
GDP Position

Posisi/ Peringkat	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	AS	AS	AS	AS	AS	AS	AS	AS
2	Jepang	Jepang	Jepang	Jepang	Jepang	Jepang	Jepang	Jepang
3	Jerman	Jerman	Jerman	Jerman	Cina	Cina	Cina	Cina
4	Inggris	Inggris	Cina	Cina	Jerman	Jerman	Jerman	Jerman
5	Cina	Cina	Inggris	Inggris	Inggris	Inggris	Inggris	Inggris

Sumber: Bank Dunia

Untuk di bidang investasi, Kongres Rakyat Nasional memberlakukan UU Usaha Investasi Sepenuhnya Milik Asing (*Wholly Foreign Investment Enterprise*) yang memperbolehkan usaha-usaha sepenuhnya milik asing didirikan di wilayah Cina. Menurut catatan, investasi asing yang masuk ke Cina saat ini berasal lebih dari 180 negara dan wilayah. Tahun 2004, Cina berhasil menarik investasi langsung asing sebesar US\$ 60,6 miliar. Hal ini menstimulus perusahaan domestik untuk berkembang. Investor Cina kini menanamkan modalnya di berbagai negara. Menurut *Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation* (MOFTEC), terdapat lebih dari 6.000 usaha investasi Cina di luar negeri dengan

nilai kontrak mencapai US\$ 6,95 miliar yang tersebar di lebih dari 160 negara dan wilayah.²⁵

Menurut Bank Dunia, diperkirakan pada tahun 2020 *share* Cina pada perdagangan akan naik tiga kali lipat dari sekarang, mencapai 10%. Menurut perhitungan ini juga, Cina akan menjadi *trading nation* nomor dua terbesar di dunia sesudah AS (dengan *share* sebesar 12%) dan mendahului Jepang (dengan *share* sebesar 5%). Kalau ekonomi Cina tumbuh dengan angka 7% pertahun, maka Bank Dunia memperkirakan *share* Cina pada *output* dunia akan naik dari 1% pada 1992 menjadi 4% pada 2020. Ekonom lain punya metode lain, misalnya dengan memakai PPP (*purchasing power parity*). Tapi dengan memakai ukuran inipun, Cina akan tetap menjadi ekonomi terbesar di dunia nomor dua pada tahun 2020 karena sumbangannya 8% dari *output* global. Cina hanya ada di belakang AS yang menguasai 19% dari ekonomi global.²⁶

Kombinasi dari surplus perdagangan, arus investasi asing dan pembelian mata uang asing dalam jumlah sangat besar telah menjadikan Cina sebagai negara dengan pemegang cadangan devisa terbesar di dunia, yakni sebesar 1,9 triliun dolar pada akhir September 2008.²⁷ Cina kini menduduki peringkat tinggi dunia dalam banyak indikator kekuatan ekonomi: pertumbuhan, perdagangan internasional, investasi asing hingga cadangan devisa. Angka agregat ekonomi yang serba besar membuat Cina menerima predikat sebagai *next superpower*.²⁸

Berdasarkan paparan di atas dengan melihat kronologi di awal Cina menjadi anggota WTO yakni 2001 sampai dengan 2009 pertanyaan yang kemudian muncul adalah **mengapa Cina dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di WTO (Periode 2001-2009)?** Pertanyaan ini menjadi menarik karena di satu sisi, Cina tidak terlibat dalam Perang Dingin dan di sisi lain, Cina juga sebelumnya tidak terlibat dalam konteks riil dengan internasional. Selain itu juga, sebagai kekuatan ekonomi baru di WTO secara langsung dapat mengantarkan Cina sebagai kekuatan ekonomi dunia.

²⁵ Effendi Siradjuddin, *Memerangi Sindrom Negara Gagal*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 61-62.

²⁶ The World Bank, *China 2020: China Engaged*, The World Bank, Washington DC, 1997, hal. 36.

²⁷ Wayne M. Morrison, *Op. Cit.*, diakses pada tanggal 30 Maret 2010 pukul 21.13 WIB.

²⁸ Effendi Siradjuddin, *Loc. Cit.*

Penelitian ini akan fokus pada periode 2001-2009. Periode tersebut dipilih karena tahun 2001 merupakan resminya Cina masuk menjadi anggota WTO dan sampai tahun 2009, penulis melihat bahwa Cina pasca keanggotaannya di WTO terlihat semakin 'yakin' dengan performanya di kancah perdagangan internasional.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Menjabarkan lingkungan internasional yang dihadapi Cina.
- Mengetahui tentang apa yang dilakukan Cina sehingga dapat memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut.

Merujuk pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi *policy learning* bagi Indonesia dalam melihat kemampuan Cina mencari solusi, bahkan mengatasi tekanan dari lingkungan internasionalnya dan sekaligus juga mencapai kepentingan nasionalnya di saat yang bersamaan.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan disampaikan diskusi tentang teori realis, yakni teori E. H. Carr dan teori dari Hans J. Morgenthau. Dilatarbelakangi oleh Perang Dunia I (PD I), Carr memberikan kritik terhadap kaum internasionalis liberal, atau disebut dengan 'kaum utopia'. Di dalam bukunya *The Twenty Years' Crisis 1919-1939*, Carr meyakini bahwa realisme merupakan koreksi yang diperlukan terhadap maraknya utopianisme yang telah mengabaikan elemen utama kekuasaan dalam pemikiran mengenai politik internasional.²⁹ Kaum utopia-liberal hendak menghilangkan kekuasaan sebagai pertimbangan negara dalam sistem internasional. Sementara Carr percaya bahwa pencarian kekuatan nasional adalah dorongan alami yang memiliki resikonya sendiri jika diabaikan oleh negara. Negara yang menjauhkan diri dari pencarian kekuatan (*persuit of power*) sebagai pegangan prinsipnya pada dasarnya membahayakan keamanan mereka sendiri.

²⁹ Edward Hallet Carr, *The Twenty Years' Crisis 1919-1939*, MacMillan & Company Ltd., London, 1939, hal. 14.

Menurut Carr, pencarian kekuatan oleh suatu negara terwujud dalam perjuangan kepentingan nasional dalam bentuk kebijakan luar negeri. Benturan kepentingan-kepentingan nasional tidak dapat dihindarkan. Ia cenderung menekankan bahwa kekuasaan adalah elemen penting dari setiap tatanan politik. Keyakinan ini menempatkan Carr pada pengutamaan kekuatan, dan pengejarannya oleh negara, daripada faktor-faktor lain.³⁰

Selanjutnya, Morgenthau di dalam bukunya *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, berpendapat bahwa hubungan dan politik internasional pada dasarnya adalah hubungan antar negara dimana masing-masing negara berupaya untuk memperjuangkan dan memperoleh *power* serta mendominasi negara lain melalui kekuatan militer (*struggle for power*).³¹ Negara sebagai aktor utama hubungan internasional dipandang sebagai individu yang senantiasa mempunyai hasrat untuk mendominasi individu yang lain atau sekurang-kurangnya mempertahankan keamanan dirinya masing-masing. Dengan demikian, diasumsikan sebagai kumpulan negara-negara yang memperjuangkan keamanan dan kepentingan nasional masing-masing dengan instrumen utamanya adalah kekuatan dan keunggulan militer.³²

Teks dasar seperti yang ditulis Carr dan Morgenthau menegaskan bahwa realisme akan berkaitan dengan sejumlah wacana empiris dan normatif tertentu, yang meliputi: (a) negara berdaulat adalah pelaku utama sekaligus unit dasar analisis, (b) sikap negara-intra berlaku dalam sebuah lingkungan anarkis yang tidak dapat dicegah, dan (c) sikap negara bisa dipahami 'secara rasional' sebagai pencarian kekuasaan yang didefinisikan sebagai kepentingan. Realisme mempertahankan pandangan bahwa pencarian kekuasaan dan keamanan adalah logika dominan dalam politik global, dan bahwa negara sebagai pelaku utama dalam kancah ini tidak punya pilihan selain menghimpun cara kekerasan dalam pencarian perlindungan diri. Realisme menggunakan gagasan tentang ketertiban, stabilitas, pencegahan dan terutama keseimbangan kekuasaan, untuk

³⁰ *Ibid.*, hal. 297.

³¹ Hans J. Morgenthau dan Kenneth W. Thompson, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Alfred A. Knoff Inc., New York, 1948, seperti dikutip dalam Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, McMillan Publishing Company, New York, 1990, hal. 86.

³² *Ibid.*

menyampaikan pesan pengekangnya dan membebaskan struktur sistem internasional. Ini dikarenakan sifat dari sistem internasional yang dianggap anarkis, yakni tidak mempunyai wewenang untuk mengatur sikap negara dan bangsa. Akibatnya, realisme mengabaikan dampak struktur pada sikap negara.

Dalam kaitannya dengan Cina, dapat pula diperhatikan tulisan David Shambaugh yang berjudul *The Rise of China and Asia's New Dynamics*, yang mengemukakan antara lain bahwa saat ini Asia sedang berubah dan Cina merupakan penyebab utamanya. Cina telah memposisikan diri sebagai aktor utama dan sebagai kekuatan yang bertanggung jawab dalam peningkatan stabilitas dan keamanan di kawasan. Saat ini, Cina telah menunjukkan sikap kepercayaan diri dalam urusan eksternalnya dan telah membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga serta aktif dalam organisasi-organisasi regional, multilateral, maupun global.³³ Selanjutnya dapat pula diperhatikan tulisan dari Avery Goldstein yang berjudul *Rising to the Challenge: China's Grand Strategy and International Security*. Ia mengatakan bahwa Cina melihat hubungan antara kekuatan-kekuatan besar saat ini sedang mengalami perubahan dan penyesuaian strategis. Dalam kondisi ini, upaya untuk memperluas aliansi militer sudah bukan waktunya lagi dan tidak kondusif dalam menciptakan keamanan dan perdamaian dunia. Aliansi model lama dalam pandangan Cina sudah harus digantikan pendekatan baru yang bersifat *international partnership* yang diwujudkan dalam komitmen untuk membangun hubungan bilateral yang stabil tanpa ditujukan pada pihak ketiga, meredam ketidaksepahaman untuk kepentingan kerjasama dalam diplomasi internasional, serta meningkatkan hubungan antar pejabat melalui kunjungan timbal balik terutama pejabat militer maupun pertemuan puncak pemimpin negara secara berkala.³⁴

Kritik pertama yang dapat disampaikan bahwa realisme memiliki keterbatasan metodologi behavioralnya. Fokus dari realisme merupakan aksi dan interaksi dari unit yang menjadi prinsip kodrat manusia, gagasan tentang kepentingan didefinisikan dalam istilah kekuasaan serta sikap negarawan – ketimbang menyoroiti batasan sistemis politik internasional. Ini berakibat pada

³³ David Shambaugh, *China and Asia's New Dynamic*, Berkeley, California, 2006, hal. 1.

³⁴ Avery Goldstein, *Rising to the Challenge: China's Grand Strategy and International Security*, Standford University Press, California, 2005, hal. 134.

ketidakmampuan realisme untuk menjelaskan bahwa politik internasional sebenarnya dapat dipikirkan sebagai sebuah sistem dengan struktur yang didefinisikan secara tepat. Pada akhirnya realisme tidak dapat mengkonsepkan sistem internasional serta memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai keberlangsungan sistem internasional. Selain itu, realisme juga melawan adanya perubahan struktural dalam sistem internasional. Realisme secara efektif melumpuhkan kemungkinan terjadinya perubahan. Keterbatasan realisme tersebut kemudian menjadikannya tidak mampu memberikan penilaian yang meyakinkan mengenai mengapa kebijakan-kebijakan luar negeri negara-bangsa sangatlah mirip, meski sifat internal mereka jauh berbeda, dimana ini merupakan kritik terhadap realisme selanjutnya.

Kritik lainnya mengenai pengabaian realisme terhadap kekuatan ekonomi. Realisme memberikan perhatian besar terhadap kekuatan militer. Ini dikarenakan PD I yang melatarbelakangi pendekatan realisme tersebut, sehingga dirasakan tidak aktual lagi untuk membahas situasi hubungan internasional saat ini. Semula didominasi oleh aspek militer. Kemudian meluas meliputi aspek-aspek non-militer seperti aspek ekonomi yang memfokuskan pada hubungan atau persaingan perdagangan antar negara, sanksi ekonomi, embargo dan lain sebagainya. Selain itu, hubungan internasional yang ditandai dengan globalisasi dengan berbagai variannya telah mengubah politik internasional, dengan mulai mengemukanya aktor non negara sebagai aktor dominan bahkan dengan kapasitas dan kapabilitas interaksi yang melebihi aktor negara. Hal tersebut menjadikan tata interaksi internasional menjadi kompleks.³⁵

1.4.2 Kerangka Teori

Neo-realisme muncul pada 1970-an, sebagian sebagai respon atas tantangan yang dikemukakan oleh teori independensi dan sebagian lain sebagai koreksi terhadap pengabaian realisme tradisional terhadap kekuatan ekonomi. Pencetus neorealis adalah Kenneth Waltz. Neorealis ini sering disebut juga dengan realis struktural. Yang membedakan neorealis dengan realis tradisional

³⁵ Scott Burchill & Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 90-122 (Terjemahan dari Scott Burchill & Andrew Linklater, *Theories of International Relations*, ST Martin's Press. INC., New York, 1996)

adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan *outcomes* atau sikap negara-negara. Realis tradisional menggunakan Teori Reduksionis sementara neorealist menggunakan Teori Sistemik. Teori Reduksionis menjelaskan *outcomes* atau sikap negara-negara melalui elemen-elemen yang berada di level nasional atau subnasional.³⁶ Adanya dorongan-dorongan yang berasal dari internal suatu negara menghasilkan *outcomes* negara tersebut. Dengan kata lain, pendekatan reduksionis ini menunjukkan adanya kaitan antara maksud (tujuan) para pelaku individu seperti negara-bangsa, dan akibat dari tindakan mereka.

Berbeda dengan realis tradisional, neorealis seperti Waltz melihat bahwa sistem internasional yang mempengaruhi sikap suatu negara. Pendekatan ini memfokuskan pada struktur sistem dan pada unit-unitnya yang berinteraksi. Atau dengan kata lain bahwa hubungan internasional terletak pada level sistem yang mencakup interaksi antar unit atau aktor melalui berbagai bentuk aturan yang menggambarkan kondisi hubungan antar negara. Sistem itu sendiri bersifat abstrak dan nyata. Secara spesifik, hubungan antar unit atau aktor yang berada dalam tataran internasional itu yang disebut dengan sistem atau sistem internasional. Keberadaan kondisi internasional sebagai sistem merupakan medan interaksi antar unit atau aktor yang menjelaskan bagaimana aktor A berinteraksi dengan aktor B. Karena itu, sistem merupakan sebuah variabel yang mampu menarik keberadaan unit-unit sebagai bagian dari sistem itu sendiri. Dengan kata lain, sistem terdiri dari sebuah kumpulan unit-unit yang berinteraksi di dalamnya. Sebagai sebuah lingkup di mana terdapat unit-unit yang berinteraksi, sistem mengakomodasi interaksi antar unit melalui sebuah struktur yang memaksa dan menentukan bagaimana setiap unit berperilaku dan berinteraksi.³⁷

Waltz percaya bahwa sistem internasional memiliki sebuah struktur yang bisa didefinisikan dengan tepat, dengan tiga karakteristik penting, yaitu³⁸:

1. Prinsip tatanan sistem
2. Karakter unit dalam sistem
3. Distribusi kemampuan unit dalam sistem.

³⁶ Kenneth N. Waltz, *Reductionist & Systemic Theories*, didalam Robert O. Keohane, *Neorealism & Its Critics*, Columbia University Press, New York, 1986, hal 47.

³⁷ Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, New York, 1979, hal. 38-56.

³⁸ Scott Burchill & Andrew Linklater, *Loc. Cit*, hal. 117.

Prinsip tatanan sistem politik internasional adalah anarkis, dengan tidak adanya otoritas apapun yang mengatur sikap negara-bangsa terhadap satu sama lain. Dengan kata lain, prinsip tatanan sistem internasional memaksa negara untuk menunjukkan fungsi utama yang sama persis meski mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dalam prosesnya, mereka menjadi tersosialisasi ke dalam sikap yang berkisar pada ketidakpercayaan satu sama lain.

Adanya tatanan sistem internasional yang seperti itu mendorong negara-negara untuk bertindak rasional, yang mana mereka bertindak semata-mata untuk kepentingannya sendiri. Negara tidak dapat menggantungkan kelangsungan hidupnya kepada negara atau institusi lain, namun kepada kemampuannya sendiri. Menurut Waltz, obyek analisis dalam studi hubungan internasional adalah perjuangan demi kekuasaan oleh negara-bangsa dalam sistem internasional yang anarkis.³⁹

Selanjutnya menurut Waltz, karakter unit-unit dalam sistem politik internasional identik, atau dalam kata lain semua negara dalam sistem internasional dibuat sama secara fungsional oleh tekanan struktur. Namun yang menjadi masalah adalah kemampuan negara-negara dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut berbeda. Desakan struktur internasional yang anarki ini kemudian melandasi setiap negara untuk mencapai *power*-nya melalui persaingan di bidang politik, militer, dan ekonomi melalui tujuan negara yang dikeluarkan melalui kebijakan luar negeri, dan diimplementasikan melalui perilaku negara. Kebijakan luar negeri dan perilaku negara merupakan bentuk aksi negara yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti *self-help* atau aliansi untuk mencapai kondisi seimbang (*balance of power*). Bentuk *self-help* atau aliansi yang dilakukan negara merupakan proses untuk menggalang kekuatan di dalam mencapai kepentingan nasional atau distribusi kekuatan untuk kepentingan nasional, baik melalui bidang militer maupun ekonomi. Tujuan distribusi kekuatan ini, secara komprehensif, dilakukan sebagai bentuk maksimalisasi kekuatan, agar negara dapat mencapai level yang lebih tinggi dari negara lain. Hal ini disebabkan oleh desakan struktur yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara di dalam struktur hubungan yang anarki. Konteks ini kemudian disikapi

³⁹*Ibid.*, hal. 22.

negara lain dengan melakukan distribusi kekuatan yang sama sehingga menimbulkan adanya polarisasi atau kutub sebagai proses perimbangan (*balance of power*). Proses hubungan antar negara di dalam sistem internasional akan menjadi sangat dinamis mengingat setiap negara akan terus melakukan perimbangan kekuatan melalui distribusi kekuatan sehingga terdapat tarik menarik di dalam struktur.⁴⁰

Neorealis muncul sejak tahun 1970-an sebagai koreksi terhadap pengabaian realisme tradisional terhadap kekuatan ekonomi.⁴¹ Jika sebelumnya realis tradisional sangat perhatian terhadap kekuatan militer dan cenderung mengabaikan kekuatan ekonomi, hal sebaliknya yang terjadi dengan neorealis. Neorealis bisa dilihat sebagai kombinasi ide-ide realis tradisional mengenai *power* dan sentralitas negara dalam hubungan internasional, dengan beberapa ide liberal mengenai kerjasama ekonomi.⁴²

Dalam penelitian ini selanjutnya diperlukan pemahaman mengenai bagaimana negara sebagai unit yang berinteraksi di dalam sistem internasional dapat bertahan dari tekanan struktur internasional. Menurut John Ikenberry di dalam teorinya "*The State and Strategies of International Adjustment*",⁴³ mengatakan bahwa negara merupakan interaksi dari sistem ekonomi politik domestik dan internasional serta bagaimana negara dapat secara konsisten melakukan penyesuaian baik secara domestik maupun internasional. Secara krusial, Ikenberry mengatakan bahwa hubungan yang terbentuk antara negara dengan masyarakatnya merupakan hubungan yang sangat dekat dengan tekanan internasional dimana hubungan tersebut dipengaruhi oleh struktur internasional. Sebagai konsekuensinya, negara perlu melakukan perubahan maupun penyesuaian. Hal ini sejalan dengan argumen Gilpin yang mengatakan bahwa

In every international system there are continual occurrences of political, economic, and technological changes that promise gains and losses for one or

⁴⁰ *Ibid.*, hal 118.

⁴¹ *Ibid.*, hal 113.

⁴² Jill Steans & Lloyd Pettiford, *International Relations: Perspectives & Themes*, Essex: Pearson Education Limited, 2001, hal 36.

⁴³ Little Richard & Smith, Michael (Eds.), *Perspectives on World Politics*, Routledge, 1991, hal. 157-167.

*another actor ... in every system, therefore, a process of disequilibrium and adjustment is constantly taking places.*⁴⁴

Penyesuaian dan perubahan yang dilakukan suatu negara memiliki strategi-strategi yang sifatnya ofensif dan defensif. Menurut Ikenberry, *offensive adjustment strategies* berusaha untuk *create new international regime*, sementara secara domestik akan berusaha *create domestic structure*. Untuk *defensive adjustment strategies*, suatu negara akan melakukan penyesuaian internasionalnya dengan *maintain or protect regime*, sementara strategi secara domestiknya adalah *protect domestic structure*. Untuk mengetahui strategi yang mana ditempuh oleh suatu negara, perlu diketahui lebih dulu preferensi atau kepentingan negara tersebut. John Ikenberry mengatakan bahwa untuk menganalisa kepentingan suatu negara haruslah juga menelaah beragam kemungkinan yang diambil oleh suatu negara, yaitu *rational* dan *structural constraints*. *Rational constraints* merupakan *economic cost* yang timbul atas pilihan kebijakan menjadi bagian dari sistem internasional dimana memiliki *cost* yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan *cost* yang timbul dari suatu system internasional dibebankan secara merata oleh negara-negara anggota dari sistem tersebut. Sementara *structural constraints* mengacu kepada kemampuan negara untuk mengatur aktor-aktor domestiknya serta akses negara kepada peraturan dan norma internasional.

Selain mengenai pemahaman mengenai negara, konsep yang perlu dipahami adalah tentang struktur internasional itu sendiri yang di dalamnya berlaku norma-norma yang mengatur tingkah laku negara sebagai unit-unitnya. Atau dengan kata lain diperlukan suatu rezim internasional yakni suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor-aktor dalam hubungan internasional.⁴⁵ Keohane dan Nye mendefinisikan rezim internasional sebagai serangkaian rencana yang di dalamnya terdapat aturan, norma dan prosedur-prosedur yang mengatur tingkah laku dan mengontrol efek yang ditimbulkan oleh rezim itu

⁴⁴ R. Gilpin, *War and Change in World Politics*, Cambridge University Press, New York, 1981, hal. 13.

⁴⁵ Stephen D. Krasner, *International Regimes*, Cornell University Press, New York, 1983, hal. 7.

sendiri.⁴⁶ Rezim internasional merupakan suatu pembatas dan kondisi dari perilaku negara yang berinteraksi satu sama lainnya.⁴⁷ Salah satu bentuk rezim internasional adalah Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade – GATT*) yang kemudian dilembagakan menjadi WTO. Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan suatu kebutuhan akan kerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dengan Charles Pentland di dalam *international organizations and their roles* yang mengatakan bahwa peranan organisasi internasional adalah; sebagai instrumen bagi negara untuk mencapai *policy goals*, sebagai *systemic modifiers state behaviours* dan aktor independen; sebagai aktor, organisasi internasional dalam perkembangannya mengarah kepada *autonomy* yang artinya akan terjadi *self maintaining* dan *self steering* di dalam organisasi tersebut. Kedua, akan mengarah kepada kapasitasnya mempengaruhi aktor lainnya atau penolakan terhadap pengaruh dari aktor lainnya. Kapasitas yang diperoleh berasal dari informasi, *financial*, sebagai pengambil keputusan, legitimasi, kemampuan *enforcement*, serta diplomasi.⁴⁸

1.5 Hubungan Antar Variabel

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan adanya interaksi dari dua jenis variabel yang berbeda, yaitu independen dan variabel dependen. Variabel dependen dari tesis ini adalah Cina berhasil menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di dalam struktur internasional yaitu WTO. Sementara itu untuk variabel independennya, penulis memilih strategi-strategi penyesuaian yang dilakukan Cina pasca aksesinya di WTO

⁴⁶ Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition*, Little Brown Company, Boston, 1977, hal. 24-25.

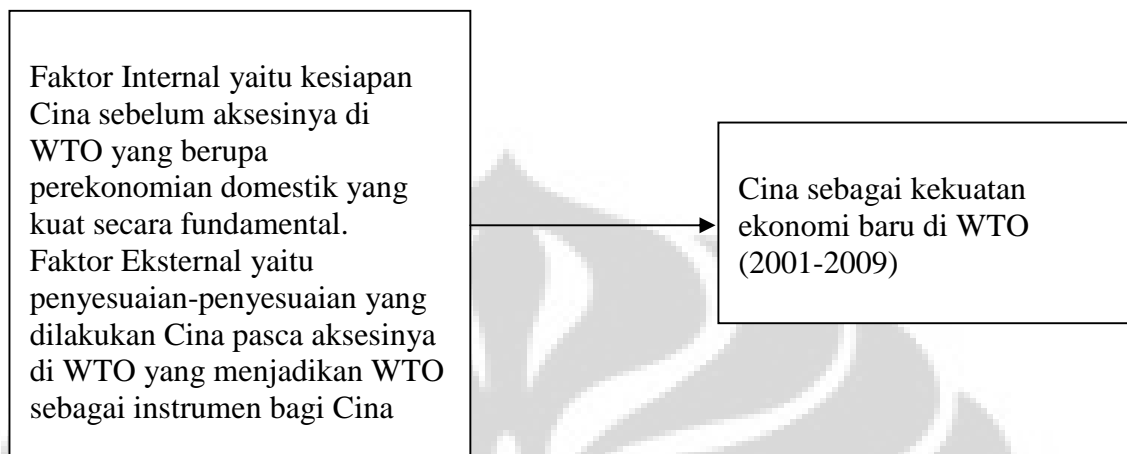
⁴⁷ Stephen D. Krasner, *Op. Cit.*, hal. 9.

⁴⁸ Little Richard & Smith, Michael (Eds.), *Op. Cit.*, hal. 242-249.

1.6 Model Analisis

Variabel Independen

Variabel Dependen



1.7 Hipotesa

Dari penjabaran hubungan antar variabel di atas, penulis mencoba mengajukan hipotesa bahwa keberhasilan Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di WTO ditentukan oleh faktor internal yaitu kesiapannya yang berupa perekonomian domestik yang kuat secara fundamental serta faktor eksternal yaitu penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan Cina pasca aksesinya di WTO yang menjadikan WTO sebagai instrumen bagi negara tersebut.

1.8 Metode Penelitian

Untuk dapat memperoleh data dan informasi atas konsep pemikiran yang terkandung dalam hipotesa tersebut diatas, maka lebih lanjut dilakukan penelitian dengan metode yang relevan dengan topik tulisan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan variabel independen yaitu mengenai faktor internal yaitu tentang kesiapan Cina yang berupa perekonomian domestik yang kuat secara fundamental dan faktor eksternal Cina yang berupa penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan Cina pasca aksesinya di WTO, dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan bahan-bahan lainnya seperti artikel koran, majalah, jurnal dan internet, yang memiliki kaitan erat dengan tema penelitian, dengan disertai upaya analitis terhadap referensi-

referensi yang digunakan. Setelah itu, penulis menggunakan metode kuantitatif untuk menjelaskan variabel dependen yang diperoleh melalui laporan-laporan yang bersifat angka yang kemudian di interpretasikan oleh penulis. Kombinasi dari kedua metode di atas menjadi pokok bahasan metodologi penelitian ini.

1.9 Sistematika Penulisan

Atas dasar konsep yang terkandung dalam hipotesis dan data serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, maka sistematika penulisan ini dapat disampaikan dalam 4 bab secara berurutan sebagai berikut:

Bab 1 merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang gambaran umum mengenai hal yang akan dibahas, dengan uraian latar belakang, perumusan masalah, signifikansi penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka teori, hubungan antar *variabel*, model analisis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab 2 merupakan penjelasan konsep variabel dependen penelitian ini yaitu mengenai konsep kekuatan ekonomi yang disertai dengan berbagai indikatornya. Selanjutnya penulis akan mencoba mengaplikasikan konsep dan indikator kekuatan ekonomi tersebut di dalam konteks Cina.

Bab 3 akan dibagi menjadi beberapa bagian yang antara lain memuat faktor internal dan eksternal Cina. Faktor internal Cina merupakan kesiapan negara tersebut dalam memasuki WTO yang ditandai dengan perekonomian yang relatif kuat secara fundamental. Sementara faktor eksternal merupakan berbagai penyesuaian yang dilakukan Cina pasca aksesinya di WTO dengan pertimbangan kendala ekonomis dan struktural.

Bab 4 merupakan kesimpulan.

Bab 2

Cina sebagai Kekuatan Ekonomi Baru di WTO

Dalam bab 2 akan dibahas mengenai Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di WTO. Bab ini akan diawali dengan konsep kekuatan ekonomi beserta penjelasan mengenai indikator-indikatornya. Selanjutnya bab ini akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan tahun per tahun pasca aksesinya Cina di WTO dengan menggunakan indikator yang telah dijelaskan sebelumnya.

2.1 Kekuatan Ekonomi atau *Economic Power*

Menurut Ellen L. Frost kekuatan ekonomi merupakan *condition of having sufficient productive resources at command that give the capacity to make and enforce economic decisions, such as allocation of resources and apportioning of goods and services*. Kekuatan ekonomi juga didefinisikan sebagai *the ability to control or influence the behavior of others through the deliberate and politically motivated use of economic assets, the ability to resist external control or influence because dependence on external suppliers is sufficiently diverse to preclude vulnerability to outside pressure*.⁴⁹

Bagi Ray S. Cline, kekuatan ekonomi dapat diukur secara relatif.⁵⁰ Senada dengan Frost, bahwa kekuatan ekonomi diukur dengan menggunakan tolak ukur ekonomi makro suatu negara.⁵¹ Ini dikarenakan hubungan yang ada di dalam ekonomi makro merupakan hubungan kausal antara variabel-variabel agregatif, yang diantaranya; pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, investasi, tingkat tabungan, belanja pemerintah, jumlah uang yang beredar (inflasi), tingkat bunga, neraca pembayaran (ekspor dan impor) dan lain-lain.⁵² Artinya, ekonomi makro

⁴⁹ Ellen L. Frost, *What Is Economic Power*, http://findarticles.com/p/articles/mi_m0KNN/is_53/ai_n31506031/pg_4/, diakses pada 26 Maret 2011 pukul 23.15 WIB.

⁵⁰ Ray S. Cline, *World Power Assessment: A Calculus of Strategic Drift*, Georgetown University, Washington D.C., 1975, hal. 11.

⁵¹ Ellen L. Frost, *Op. Cit.*

⁵² Iskandar Putong, *Economics, Pengantar Mikro dan Makro*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hal. 253.

menganalisa keadaan keseluruhan dari kegiatan perekonomian suatu negara.⁵³ Dengan kata lain, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kekuatan fundamental ekonomi suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonomi yang antara lain: pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, cadangan devisa, suku bunga, serta kondisi perbankan. Begitu pula halnya dengan *World Economic Indicators*, bahwa perekonomian suatu negara dapat juga dilihat dengan menggunakan indikator, antara lain: *rates of inflation, the unemployment rate, the real GDP growth rate, GDP-Per Capita, GDP-Purchasing Power Parity, amounts of foreign direct investment, populations living below the poverty line, and current account balances.*⁵⁴

Pokok pembahasan awal dalam ekonomi makro suatu negara adalah pendapatan nasional. Hal ini dikarenakan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari mengetahui besaran pendapatan nasional suatu negara yang antar lain: *pertama*, dapat diketahui kekuatan ekonomi suatu negara, *kedua*, dapat diketahui potensi sumber daya suatu negara, *ketiga*, dapat ditentukan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan lain-lain. Sehingga pendapatan nasional menjadi alat pengukur kegiatan ekonomi yang paling penting.⁵⁵ Meski demikian, tidak ada ukuran standar mengenai bagaimana tinggi pendapatan suatu negara yang harus dicapai, akan tetapi berdasarkan perbandingan pada negara lain tentu saja dapat diketahui apakah pendapatan nasional suatu negara lebih besar atau kecil dari negara lainnya. Membandingkan tingkat pendapatan nasional suatu negara dengan negara lain merupakan ukuran relatif.

Penghitungan pendapatan nasional juga dapat diukur melalui Produk Domestik Neto atau *Gross National Product* (GNP) yang memiliki metode penghitungan yang kurang lebih sama dengan GDP. GNP merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu (satu tahun) yang diukur dengan satuan uang.⁵⁶ GNP perkapita adalah GNP dibagi dengan jumlah penduduk. GNP berfungsi sebagai indikator yang berguna untuk

⁵³ Ekawarna & Fachruddiansyah Muslim, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Gaung Persada, Jakarta, 2010, hal. 6.

⁵⁴ http://www.economywatch.com/world_economy/world-economic-indicators/, diakses pada 23 April 2011 pukul 10.53 WIB.

⁵⁵ Iskandar Putong, *Op. Cit.*, hal. 358.

⁵⁶ Iskandar Putong, *Ibid.*, hal. 353.

mengetahui pertumbuhan ekonomi. GNP dapat dipakai sebagai alat analisis untuk membandingkan perkonomian suatu negara dengan keadaan sebelumnya ataupun untuk diperbandingkan dengan perekonomian negara lain. Dalam membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi, GNP harus disesuaikan dengan nilai mata uang yang berlaku untuk mencegah penyimpangan perhitungan yang disebabkan oleh perubahan harga akibat inflasi.⁵⁷

Akan halnya dengan pendapatan nasional yang tinggi, maka tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dikarenakan tingginya tingkat pendapat nasional secara relatif, melainkan seberapa besar produktivitas penduduk negara tersebut mampu meningkatkan pendapatannya secara kumulatif.⁵⁸ Dengan kata lain, istilah yang paling sering dipakai untuk pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestic Product* (GDP).⁵⁹ GDP merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil dari warga negara yang bersangkutan ditambah warga negara asing yang bekerja di negara yang bersangkutan termasuk juga didalamnya adalah pendapatan atas aset asing. Sementara GDP perkapita merupakan GDP dibagi dengan jumlah penduduk. Konsep GDP memiliki pengertian yang dapat dipakai sebagai pengukur aktivitas ekonomi suatu masyarakat karena konsep GDP memiliki tujuan: *pertama*, memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara ke luar negeri dan kecenderungan ini dapat berakhir dengan penaklukan atau invasi atas negara lain. *Kedua*, menciptakan suatu 'welfare state', yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif. *Terakhir* yaitu mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat dari konsumsi kebutuhan pokok yang sederhana ke tingkat konsumsi yang lebih tinggi.⁶⁰

Nilai GDP atau pendapatan nasional dapat dihitung dengan beberapa metode. Salah satunya dengan metode pengeluaran. Menurut metode ini, nilai

⁵⁷ Jack C. Plano, *The International Relations Dictionary* (Kamus Hubungan Internasional), CV. Putra A. Bardin, 1999, hal. 115.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 259.

⁵⁹ Ekawarna & Fachruddiansyah Muslim, *Op. Cit.*, hal. 187.

⁶⁰ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 33-35.

GDP merupakan total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Nilai GDP dapat diperoleh sebagai berikut:

GDP = C + G + I + (X-M) di mana:

C = Konsumsi Rumah Tangga

G = Konsumsi Pemerintah

I = Investasi

X = Ekspor

I = Impor

Di dalam metode pengeluaran, ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian, antara lain:

1. Konsumsi Rumah Tangga (*Household Consumption*)

Pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang maupun jasa yang habis dipakai dalam tempo setahun atau kurang maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun.⁶¹ Konsumsi rumah tangga atau masyarakat erat terkait dengan pendapatan dan perbankan melalui tabungan serta tingkat suku bunga. Pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan konsumsi. Namun adalalanya ketika tingkat suku bunga tinggi ada masyarakat yang mau mengorbankan konsumsi untuk mendapatkan perolehan yang lebih besar dari suku bunga yang berlaku dari uang yang ditabung.⁶² Hal lain yang terkait dengan konsumsi rumah tangga adalah jumlah penduduk. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh.⁶³

2. Konsumsi Pemerintah (*Government Consumption*)

Merupakan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa akhir.⁶⁴ Konsumsi pemerintah biasanya dalam bentuk belanja pegawai negeri, penyediaan sarana publik dan subsidi. Konsumsi pemerintah ini tidak terlalu “bermasalah” dalam perekonomian karena sebagai penyelenggara administrasi negara pemerintah berhak dengan sendirinya untuk memperbesar atau memperkecil daya belanjanya dengan

⁶¹ Ekawarna & Fachruddiansyah Muslim, *Op. Cit.*, hal. 199.

⁶² Iskandar Putong, *Op. Cit.*, hal. 328.

⁶³ Ekawarna & Fachruddiansyah Muslim, *Op. Cit.*, hal. 154.

⁶⁴ Ekawarna & Fachruddiansyah Muslim, *Ibid.*

memandang kondisi perekonomian yang ada.⁶⁵ Untuk pengeluaran yang berupa tunjangan-tunjangan sosial tidak termasuk didalamnya.

3. Pengeluaran sektor Perusahaan (*Investment Expenditure*)

Dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan nilai tambah atau investasi. Pengukuran yang akurat adalah investasi neto yaitu investasi bruto dikurangi penyusutan. Tinggi rendahnya investasi turut menentukan tinggi rendahnya GDP. Hal ini karena investasi dipahami sebagai penanaman modal dalam suatu usaha atau perusahaan sehingga menyebabkan terjadinya akumulasi modal yang akan menambah sumber daya-sumber daya baru.⁶⁶ Akibatnya investasi menjadi terkait dengan sektor perbankan dalam hal suku bunga. Kaum klasik berpandangan bahwa besar kecilnya investasi tergantung dari besar kecilnya tingkat suku bunga. Bila suku bunga tinggi, maka investasi semakin kecil, begitu pula sebaliknya.⁶⁷

4. Ekspor Neto (*Net Export*)

Merupakan selisih antara nilai ekspor dengan impor. Ekspor neto yang positif menunjukkan bahwa ekspor lebih besar daripada impor. Begitu pula sebaliknya. Penghitungan ekspor neto dilakukan bila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian luar (dunia) atau dengan kata lain adalah perdagangan internasional.⁶⁸ Menurut pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan Keynes, perdagangan internasional merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pendapatan suatu negara karena di dalam perdagangan internasional, ada dua hal penting yang sangat membantu pembangunan ekonomi sebuah negara yaitu: adanya pergerakan modal dari satu negara ke negara lain atau dengan kata lain meningkatkan terjadinya investasi asing yang dapat meningkatkan produktivitas di suatu negara serta *transfer of technology* melalui *Multi National Corporation* (MNC).⁶⁹

⁶⁵ Iskandar Putong, *Op. Cit.*

⁶⁶ Subandi, *Op. Cit.*, hal. 88.

⁶⁷ Iskandar Putong, *Op. Cit.*, hal. 337.

⁶⁸ Ekawarna & Fachruddiansyah Muslim, *Op. Cit.*, hal. 199-200.

⁶⁹ Didin S. Damanhuri, *Ekonomi Politik dan Pembangunan*, PT. Penerbit IPB Press, Bogor, 2010, hal. 22.

Secara ekonomis, keuntungan atau kerugian sebagai dampak perdagangan internasional terdeteksi melalui analisis neraca pembayaran (*Balance of Payment* atau BOP) dan atau nilai tukar mata uang. BOP adalah ikhtisar sistemis dari semua transaksi ekonomi dengan luar negeri selama jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam uang. Neraca pembayaran suatu negara merupakan indikator yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan ekonomi negara tersebut di dalam ekonomi internasional. Sebaliknya, ketidakseimbangan jangka panjang yang serius, mencerminkan kelemahan ekonomi suatu bangsa, dan diperlukan tindakan pemerintah untuk memperbaiki defisit keuangan, yang meliputi penetapan bea tarif yang tinggi, pengawasan ekspor, kuota, pengendalian pertukaran barang, serta tindakan lainnya untuk mengurangi impor, meningkatkan pendapatan ekspor atau menjalankan kedua-duanya. Setiap negara berusaha untuk mendapatkan surplus sehingga dapat memiliki cadangan mata uang asing dan emas yang memadai untuk menanggulangi krisis pembayaran di masa mendatang.⁷⁰

Hal terkait berikutnya adalah cadangan devisa. Cadangan devisa (*Foreign Exchange Reserves*) adalah simpanan oleh bank sentral dan otoritas moneter. Cadangan devisa merupakan posisi aktiva luar negeri pemerintah dan bank-bank devisa yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. Dalam mengelola cadangan devisa, Bank Sentral mengutamakan tercapainya tujuan likuiditas dan keamanan daripada keuntungan yang tinggi. Menurut Bank Dunia, peranan cadangan devisa adalah: *pertama*, untuk melindungi negara dari guncangan eksternal. Krisis keuangan pada akhir 1990 an membuat para pembuat kebijakan memperbaiki pandangannya atas nilai dari cadangan devisa sebagai proteksi dalam melindungi dari krisis mata uang. *Kedua*, tingkat cadangan devisa merupakan faktor penting dalam penilaian kelayakan kredit dan kredibilitas kebijakan secara umum, sehingga negara dengan tingkat cadangan devisa yang cukup dapat memberi pinjaman dengan kondisi yang lebih nyaman. *Ketiga*, kebutuhan likuiditas untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar. Cadangan devisa bertambah ataupun berkurang tampak dalam neraca lalu lintas moneter. Cadangan devisa disimpan dalam neraca pembayaran (BOP). Cadangan devisa

⁷⁰ Jack C. Plano, *Op. Cit.*, hal. 91-92.

lazim diukur dengan rasio cadangan resmi terhadap impor, yakni jika cadangan devisa cukup untuk menutupi impor suatu negara selama 3 bulan, lazim dipandang sebagai tingkat yang aman, dan jika hanya 2 bulan atau kurang maka akan menimbulkan tekanan terhadap neraca pembayaran.⁷¹

Selanjutnya yang terkait dengan cadangan devisa yaitu nilai tukar mata uang. Merupakan perbandingan nilai dua mata uang yang berbeda atau dikenal dengan sebutan kurs. Nilai tukar didasari konsep nominal, merupakan konsep untuk mengukur perbedaan harga mata uang yang menyatakan berapa jumlah mata uang suatu negara yang diperlukan guna memperoleh sejumlah mata uang dari negara lain. Selain itu juga didasari konsep riil yang dipergunakan untuk mengukur daya saing komoditi ekspor suatu negara di pasaran internasional.⁷²

Berhubung dengan pendapatan nasional atau GDP/GNP perkapita, yaitu pertumbuhan penduduk. Selain terkait erat dengan tingkat konsumsi rumah tangga, tingginya pertumbuhan penduduk juga dianggap sebagai peningkatan tenaga kerja. Namun bagi negara-negara berkembang, keadaan justru terbalik. Tingginya pertumbuhan penduduk akan menemui kesulitan dalam penyediaan lapangan kerja sehingga melahirkan pengangguran (*unemployment*).⁷³ Pengangguran sejatinya terjadi karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Selain itu juga bisa terjadi karena keterbatasan informasi dan perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan.⁷⁴ Pada akhirnya, tingkat pengangguran yang tinggi mengakibatkan penurunan pendapatan perkapita.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga diyakini sebagai salah satu penyebab terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan.⁷⁵ Secara teoritis, tingkat pendapatan masyarakat dalam kesatuan wilayah perekonomian pastilah tidak sama jumlahnya, hal mana disebabkan oleh perbedaan keahlian dan pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat upah, dan sebagainya. Yang jadi permasalahan adalah apabila perbedaan tingkat pendapatan itu timpang, dimana yang memiliki pendapatan tinggi dengan yang rendah tidak proporsional dengan

⁷¹ Subandi, *Op.Cit.*, hal. 99.

⁷² R. Hendra Halwani, *Op. Cit.*, hal. 186.

⁷³ Subandi, *Op. Cit.*

⁷⁴ Iskandar Putong, *Op. Cit.*, hal. 256.

⁷⁵ Subandi, *Op.Cit.*, hal. 72.

jumlah masyarakat yang menjadi penduduk suatu wilayah. Secara kasat mata tidak mudah untuk mengetahui apakah distribusi pendapatan masyarakat pada suatu wilayah atau antar wilayah merata karena satuan ukuran yang digunakan relatif tidak menjamin kebenarannya.⁷⁶ Berdasarkan standar dari Bank Dunia (menggunakan *relative inequility*), penggolongan distribusi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Distribusi pendapatan sangat timpang (*high inequility*) apabila 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari GNP.
2. Dikatakan moderat (*moderate inequility*) atau sedang apabila 40 persen menerima antara 12 – 17 persen dari GNP.
3. Dikatakan merata (*low inequility*) apabila 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari GNP.

Terkait dengan GNP perkapita selanjutnya adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan secara umum tingkat harga barang dalam perekonomian suatu negara. Inflasi dapat diakibatkan oleh meningkatnya uang dan kredit, hilangnya kondisi persaingan di pasaran atau karena menurunnya pasokan barang yang tersedia. Inflasi keuangan dapat merupakan ancaman serius terhadap perekonomian suatu negara. Perkembangan ke arah tujuan pembangunan ekonomi dapat terhalang oleh lingkaran inflasi yang menelan seluruh tabungan nasional yang seyogyanya disalurkan untuk penanaman modal. Perdagangan luar negeri dapat menjadi korban karena harga barang ekspor tidak mampu bersaing di pasaran dunia.⁷⁷ Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian, akan tetapi inflasi dapat dijadikan salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian negara.⁷⁸ Sampai tingkat tertentu, inflasi dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan penawaran sebab kenaikan harga akan memacu produsen untuk meningkatkan *outputnya*. Umumnya ekonom sepakat bahwa inflasi yang ideal adalah sekitar 5 persen per tahun. Jika terpaksa maksimal

⁷⁶ Iskandar Putong, *Op. Cit.*, hal. 283.

⁷⁷ Jack C. Plano, *Op. Cit.*, hal. 116.

⁷⁸ Iskandar Putong, *Op. Cit.*, hal. 406.

10 persen per tahun. Angka inflasi melebihi 10 persen per tahun sudah mulai mengganggu stabilitas ekonomi.⁷⁹

2.2 Cina Sebagai Kekuatan Baru di WTO

Ketika Cina bergabung dengan WTO di tahun 2001, maka mulailah suatu tahap baru dalam pencatatan keseimbangan perdagangan dan investasi internasional. Bangsa ini memperluas bingkai tempat dunia akan melakukan bisnis di Cina dan tempat Cina akan melakukan bisnis di dunia.⁸⁰ Seperti yang diungkapkan oleh David Scott dalam *Journal of World-Systems Research*, surplus perdagangan Cina secara keseluruhan dengan dunia telah meningkat cukup signifikan. Di tahun 2001 sebesar 23 miliar Dollar, dan mencapai 262 miliar Dollar di tahun 2007.⁸¹ Di tahun 2008 bahkan mencapai US\$ 2,5 triliun.⁸² Diperkirakan pada 2020 *share* Cina pada perdagangan akan naik tiga kali lipat mencapai 10 persen. Menurut perhitungan ini juga, Cina akan menjadi *trading nation* nomor dua terbesar di dunia setelah AS (dengan *share* 12 persen) dan mendahului Jepang (dengan *share* 5 persen). Perdagangan Cina akan didominasi oleh industri tekstil dan pakaian jadi sebagai produk dengan biaya tenaga kerja yang murah.⁸³ Peran Cina sebagai pemain utama di pasar global sudah jelas.

2.2.1 Tahun 2002 - 2005

Periode ini merupakan periode awal Cina menjadi anggota WTO yang dapat dikatakan sebagai masa transisi. Keanggotaan Cina di WTO berarti pengimplementasian komitmennya di organisasi internasional tersebut yang kurang lebih sama artinya dengan terjadinya penyesuaian-penyesuaian baik secara domestik maupun internasional. Strategi-strategi penyesuaian yang ditempuh Cina menghasilkan dampak yang akan penulis coba uraikan selanjutnya.

⁷⁹ Ekawarna & Fachruddiansyah Muslim, *Op. Cit.*, hal. 261.

⁸⁰ John dan Doris Naisbitt, *China's Megatrends*, HarperCollins, New York, 2010, hal. 159.

⁸¹ David Scott, *The 21st Century as Whose Century?*, *Journal of World-Systems Research*, Vol. XIII, No. 2, 2008, hal. 102.

⁸² John dan Doris Naisbitt, *Loc. Cit.*

⁸³ Fan Zhai & Shantong Li, *The Implication of Accession to WTO on China's Economy*, <http://monash.edu.au/policy/conf/76FanZhai.pdf>, hal. 1, diakses pada 10 November 2010 pukul 12.34 WIB.

Berdasarkan “2004 Economic Outlook for East Asia” yang dikeluarkan oleh Institute of Developing Economies/JETRO December 2003, pertumbuhan GDP Cina diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Proyeksi Pertumbuhan GDP dan Inflasi Cina, 2002-2004

Pertumbuhan GDP (nilai nyata)			Tingkat Inflasi (diukur dengan GDP deflator)		
2002	2003	2004	2002	2003	2004
8,0	8,6	8,5	-0,3	1,0	1,1

Sumber: JETRO December 2003.

Angka pertumbuhan GDP di tahun 2002 berkisar di angka 8 persen. Di tahun ini, Cina menjadi penerima FDI terbesar di duni untuk pertama kalinya. Angka pertumbuhan GDP di tahun 2003 sebesar 8,6 persen. Kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan konsumsi sebesar 6,8 persen yang meningkat sebesar 0,2 persen dari tahun sebelumnya. Konsumsi pemerintah juga meningkat sebesar 7,7 persen dalam tahun 2003, yang artinya terjadi peningkatan sebesar 0,7 persen dari tahun 2002. Investasi dalam harta tetap juga mengalami peningkatan sekitar 30,5 persen dalam tiga kuartal pertama tahun 2003 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tahun 2004 ekonomi Cina diperkirakan akan tumbuh sebesar 8,5 persen yang distimulir oleh permintaan yang kuat secara domestik sebagai kelanjutan tahun 2003. Pertumbuhan yang diperkirakan ini akan membawa tekanan inflator naik menjadi 1,1 persen. Bahkan menurut ekonom CSIS, Marie Pangestu, untuk triwulan pertama 2004, ekonomi Cina sudah tumbuh sebesar 9.7 persen. Sementara inflasi sendiri sebenarnya belum mencapai tingkat mengkhawatirkan, yakni mencapai 2.7 persen.⁸⁴ Ekspor memberikan kontribusi sebesar US\$ 80,3 miliar yang diperoleh dari zona ekonomi khusus dengan nilai kontrak FDI sebesar US\$ 22 miliar.

Tahun 2005, besar FDI yang masuk ke Asia Timur sebesar US\$ 118,2 miliar, dan lebih dari setengahnya sebesar US\$ 72,4 miliar masuk ke Cina. Ini

⁸⁴ Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik 4.7 Persen, *Tempo* (7 Juli 2004), hal. 35.

menempatkan Cina sebagai negara penerima FDI terbesar di dunia setelah AS dan Inggris.⁸⁵ Ini berimplikasi pada semakin terbukanya lapangan pekerjaan, diantaranya membuat rakyat Cina meraih pendapatan perkapita menjadi USD 1.100, bahkan di beberapa kota besar seperti Shanghai mencapai USD 6.700.

Peningkatan FDI ini sekaligus menandai pergeseran perekonomian Cina sejak reformasi. Sektor pertanian yang dominan mengalami penurunan pada dekade 1970-an digantikan oleh sektor industri. Struktur ekspor Cina yang berasal dari pertanian hanya 14,8 persen, sedangkan untuk sektor industri sebesar 52,9 persen dan sisanya di sektor jasa.⁸⁶ Kenaikan dalam sektor ini terutama dalam industri padat karya, seperti mainan, sepatu, alat olahraga dan tekstil. Industri manufaktur ini sebagian besar diproduksi oleh perusahaan asing maupun perusahaan asing yang terkait dengan perusahaan asing.

Menurut David Shambaugh, Direktur Program Kebijakan Cina dari Universitas George Washington, perdagangan antara UE dengan Cina meningkat cepat, dan telah tumbuh 25 persen pada tahun 2003, dan naik hampir 40 persen pada tahun 2004. UE dan Cina adalah sama-sama mitra dagang terbesar dan akan segera melakukan pertukaran barang dengan nilai lebih dari USD 30 miliar lagi. Cina kini menjadi kediaman bagi lebih dari 18.000 perusahaan yang dibangun dengan dana dan orang-orang berbakat dari UE.⁸⁷

Antara tahun 2004-2005, ekspor tekstil dan pakaian jadi Cina meningkat pesat dalam jumlah dan nilai ke UE, dan dalam waktu yang bersamaan harga perunit untuk produk tekstil di UE menurun drastis. Menurut Euratex sebagai asosiasi perdagangan UE, dominasi Cina di pasar impor UE dapat mengancam produsen UE serta negara pemasok/pengekspor tekstil lainnya. Kekhawatiran ini diperkuat dengan adanya data berikut ini:⁸⁸

⁸⁵ United Nations Conference on Trade and Development, *World Investment Report 2006: FDI from Developing and Transition Economies*, United Nations, 2006, hal. 2, http://www.unctad.org/en/docs/wir2006overview_en.pdf, diakses pada 25 Mei 2011 pukul 18.23 WIB.

⁸⁶ FDI, <http://www.fdiintelligence.com/>, diakses pada 23 Mei 2011 pukul 16.00 WIB.

⁸⁷ David Shambaugh, *China and Europe: The Emerging Axis for the Twenty First Century*, Brooking Institution, 2004, hal.243-249.

⁸⁸ External Trade, European Communities, *EU-25 Trade in Textile 2005*, Gambini Gilberto, 2007, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-063/EN/KS-SF-07-063-EN.PDF, diakses pada 27 Mei pukul. 09.30 WIB.

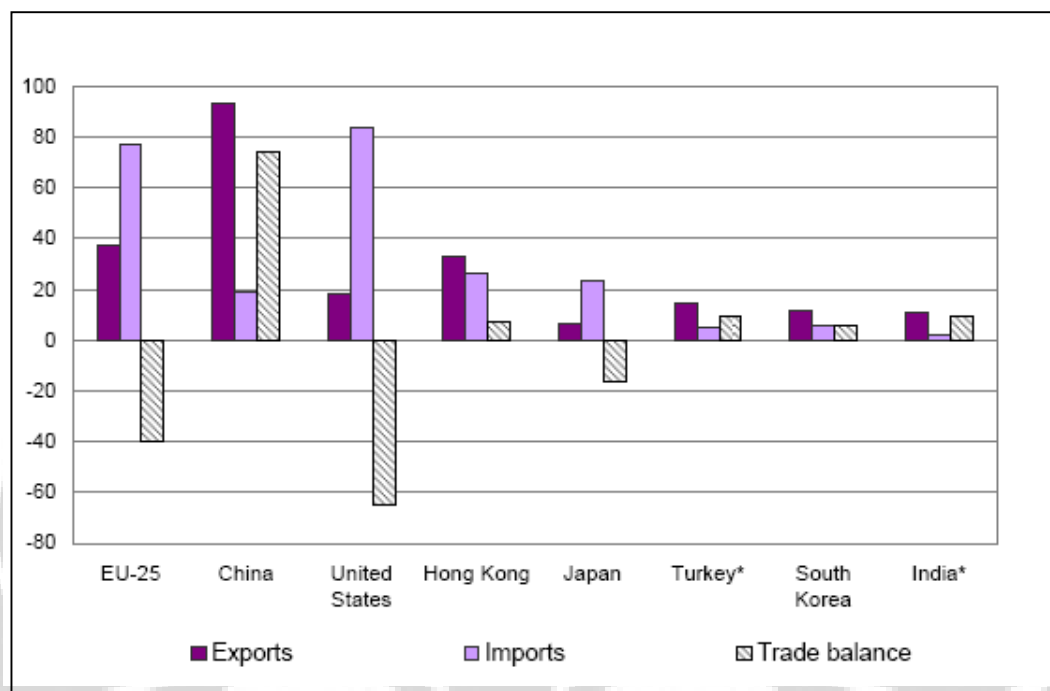
Tabel 2.2
Perdagangan Tekstil UE-25 dengan 8 Mitra Dagang Terbesar
(EUR Juta)

No	Negara	Ekspor				Impor				Trade Balance 2005
		2000	2003	2004	2005	2000	2003	2004	2005	
1	China	536	721	812	955	11770	14605	16427	22903	-21947
2	Turki	1638	1718	2007	1885	7958	10302	10788	11157	-9237
3	India	188	229	216	236	4591	4548	4792	5591	-5355
4	Bangladesh	17	25	23	30	2722	3245	3898	3715	-3685
5	Pakistan	42	61	72	78	2057	2329	2554	2256	-2178
6	Indonesia	128	122	124	111	2542	1877	1801	1621	-1510
7	Rumania	2102	2834	2982	2842	2853	4221	4286	4068	-1226
8	Thailand	158	159	175	176	1453	1276	1328	1234	-1057

Sumber: Eurostat, Comext.

Hampir 30 persen impor tekstil UE berasal dari Cina, mengalahkan Turki yang sebesar 14 persen. Impor dari Turki meningkat sekitar 7 persen pertahun antara 2000-2005. Namun impor dari Cina meningkat hampir dua kali lipat pada periode yang sama (14 persen pertahun). Sebaliknya, impor dari AS, Hongkong dan Korea mengalami penurunan sekitar 10-12 persen pertahun. Hal ini memberikan kontribusi tersendiri bagi Cina yang tercatat sebagai eksporter tekstil terbesar di tahun 2005, seperti yang dapat dilihat dari grafik 2.5 di bawah ini:

Grafik 2.1
UE dan Pemain Utama Perdagangan Tekstil Internasional, 2005
(EUR Miliar)



Sumber: Eurostat, Comext.

Neraca perdagangan tekstil UE pada tahun 2005 menunjukkan defisit perdagangan sebesar EUR 39.5 miliar. Nilai ekspor hanya mencapai EUR 37.6 miliar, sedangkan impor EUR 77.1 miliar. Sementara di pihak Cina, perubahan yang cukup signifikan terjadi dalam surplus perdagangannya, menerima surplus berkisar UER 75 miliar.

Hal yang sama juga terjadi pada AS. Nilai ekspor tekstil AS hanya separuh dari nilai ekspor EU, yaitu sebesar EUR 18,4 miliar. Nilai impor AS yang lebih besar menjadikan negara tersebut mengalami defisit perdagangan sekitar EUR 65 miliar. Industri AS mencurigai bahwa produk impor Cina yang meningkat dari kurang sejuta pasang pada tahun 2001 meningkat signifikan menjadi 22 juta pasang pada tahun 2003 telah menjadikan *market disruption* yang parah.⁸⁹ Dari grafik 2.5 di atas, dapat disimpulkan bahwa Cina memimpin sebagai eksportir terbesar di bidang tekstil. Hal ini juga telah menjadikan Cina sebagai negara

⁸⁹ Vivian C. Jones, *Safeguard on Textile and Apparel Import from China*, CRS Report for Congress, <http://www.usis.it/pdf/other/RL32168.pdf>, diakses pada 23 Mei 2011 pukul 15.23 WIB.

pengekspor pakaian jadi terbesar di dunia dengan *share of growth* 74,6 persen pada tahun 2004-2005. Sejak 2002 sampai dengan 2005, Cina berhasil menggeser posisi Meksiko sebagai pengekspor utama pakaian jadi ke AS.⁹⁰ Hanya dalam waktu tiga tahun juga Cina telah menggantikan posisi Jepang sebagai negara pengekspor ketiga terbesar di dunia, setelah Jerman dan AS.⁹¹ Pada tahun ini pula perkembangan ekonomi Cina pertama kalinya ditandai sebagai *world's foremost manufacturing base*.⁹²

2.3.2 Tahun 2006

Sejak 2005, perkembangan ekonomi, perdagangan dan industri Cina mengalami peningkatan yang amat berarti. Terintegrasinya kegiatan perekonomian, perdagangan dan industri Cina dengan pasar global telah menyebabkan terjadinya ekspansi besar-besaran dari industri manufaktur Cina ke dunia.⁹³ Berdasarkan Bank Dunia, dari total GDP Cina di tahun 2006 yang sebesar USD 2.1 triliun, perdagangan memberikan kontribusi sebesar 70.5 persen terhadap GDP.⁹⁴ Di tahun 2006, perekonomian Cina tumbuh 10,7 persen, yang merupakan tercepat sejak tahun 1995. "Pada tahun 2006, perekonomian nasional Cina masih tetap kuat dan pertumbuhannya cepat," ujar Xie Fuzhan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Cina.⁹⁵

Pertumbuhan GDP sekitar 10.7 persen di tahun 2006 merupakan hasil terjadinya *twin surpluses* pada dua hal sekaligus yaitu *capital and current accounts*. *Twin surpluses* terjadi karena besarnya nilai investasi yang diperoleh Cina, dengan nilai investasi terbesar di tahun 2004 sebesar 60 juta dollar AS ditambah dengan *domestic saving* yang cukup tinggi senilai 45 persen dari nilai

⁹⁰ The Sucking Sound from East, *The Economist* (26 Juli 2003), hal. 36.

⁹¹ Amity, Mary & Caroline Freund, *China's Export Boom*, Finance and Development, IMF Quarterly Magazine, Vol. 44 No. 3, 2007.

⁹² John Wong, *China's Economy in Search of New Development Strategies*, dalam Saw Swee Hock, *ASEAN-China Economic Relations: A Review*, ISEAS Publisher, Singapore, 2007, dalam Zainuddin Djafar, *Op. Cit.*, hal. 86.

⁹³ Zainuddin Djafar, *Op. Cit.*, hal. 85.

⁹⁴ <http://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS>, diakses pada 25 Mei 2011 pukul 12. 30 WIB.

⁹⁵ <http://preview.detik.com/detiknews/read/2007/01/25/123933/734585/4/ekonomi-cina-tumbuh-107-tercepat-sejak-11-tahun-terakhir>, diakses pada 30 Mei 2011 pukul 12.08 WIB.

GDP, dan diikuti oleh *re-evaluation* renminbi sebesar 2.1 persen pada July tahun sebelumnya.⁹⁶

GDP Cina pada 2006 apabila dikonversikan ke dollar AS, mencapai 2.8 triliun yang menjadikannya negara keempat dengan perekonomian terbesar di dunia, berada di bawah AS, Jepang dan Jerman, meski GNP perkapita hanya sebesar 1.900 dollar AS, berada pada posisi hampir terbawah. Walaupun demikian, menurut Bank Dunia, Cina masuk ke dalam kategori *one of the lower middle-income economies*. Dalam penghitungan menggunakan metode *purchasing power parity* pun Cina merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua setelah AS.⁹⁷

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa perdagangan internasional merupakan kontributor utama di dalam pertumbuhan GDP Cina. Perdagangan Cina tercatat sebesar 970 miliar dollar AS yang memberikan *share of the world's export markets* sebesar 7 persen di tahun yang 2006.⁹⁸ Salah satu penyebabnya adalah menyangkut pola perdagangan Cina yang tidak mengalami perubahan, dimana AS merupakan pasar utama Cina (21 persen), diikuti UE (19 persen), Hong Kong (16 persen), Jepang (11 persen) dan ASEAN (6 persen).⁹⁹ Ini dapat dilihat dengan ekspor industri tekstil ke AS, Cina pada tahun 2006 menggeser Kanada sebagai eksporter utama yang telah diduduki sejak tahun 1993. Tiga tahun sebelumnya, yaitu tahun 2002-2005, Cina menduduki posisi kedua setelah Kanada.

Menyangkut sisi impor dari Cina, *share* Jepang menduduki posisi tertinggi sebesar 16 persen, diikuti Korea Selatan (12 persen), Taiwan (11 persen) dan terakhir ASEAN sebesar 11 persen. Yang cukup menarik dari pasar Cina, bahwa Cina mengalami defisit perdagangan dengan negara-negara tetangganya yakni Jepang, Korea Selatan, ASEAN-5, Australia dan India. Namun sebaliknya dengan AS dan UE, Cina mengalami surplus perdagangan yang amat signifikan. Ini disebabkan ekspor Cina yang umumnya merupakan *process products* dan

⁹⁶ Zainuddin Djafar, *Op. Cit.*, hal. 74-75.

⁹⁷ Wang Gungwu & John Wong, *Interpreting China's Development*, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, 2007, hal. 84-85.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Zainuddin Djafar, *Op. Cit.*, hal. 26.

finalisasi produknya terdiri dari *low domestic value added* dan *low domestic contents*. Intinya, Cina harus melakukan impor, agar dapat melakukan ekspor, karena 50 persen dari perdagangan luar negeri Cina ditangani oleh perusahaan asing berupa *invested enterprises*, khususnya mereka berasal dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Hong Kong. Terkait dengan hal tersebut, Cina menjadi negara yang amat penting sebagai *integrator of global production networks*.¹⁰⁰

Kondisi perekonomian Cina di tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Ekonomi Cina, Januari-September 2006

	Jan.-Sept. 2005 % Growth	Jan.-Sept. % Growth over Year-Earlier Period	2006 Jan.-Sept. Amount
Gross domestic product (GDP)	9.9	10.7	RMB 14.1 trillion
Industrial value-added output	16.3	17.2	RMB 6.2 trillion
Fixed-asset investment	26.1	27.3	RMB 7.2 trillion
Retail sales	13	13.5	RMB 5.5 trillion
Consumer price index	(year-end) 1.8	1.3	NA
Imports	16	21.7	\$581.4 billion
Exports	31.3	26.5	\$691.2 billion
Urban per capita income (RMB)	9.8	10	RMB 8,799
Rural per capita income (RMB)	11.4	11.4	RMB 2,762
Financial indicators			
M2	(year-end) 17.6	16.8	NA
Foreign exchange reserves	(year-end) 34.3	28.5	\$987.9 billion

Note: NA = Not available

Sources: AP, Bloomberg, Merrill Lynch, PRC National Bureau of Statistics, PBOC, USCBC, Xinhua News Agency

Pertumbuhan GDP Cina melambat di angka 10.7 persen yang disebabkan pertumbuhan investasi sekitar 27.3 persen. *Fixed-asset investment* growth sekitar 30 persen, yang membantu pertumbuhan GDP hampir menjadi 11 persen. Pertumbuhan *retail sales* berkisar 13.5 persen yang disertai dengan inflasi yang telah dihitung berdasarkan *consumer price index* berada pada 1.3 persen selama Januari sampai September 2006. Ekspor bertumbuh cepat menyentuh angka 26.5 persen sementara import meningkat menjadi 21.7 persen selama sembilan bulan pertama di tahun 2006. Menghasilkan surplus perdagangan sekitar 110 miliar

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 27.

dollar AS. Nilai cadangan devisa berada pada 987.9 miliar dollar AS.¹⁰¹ Pada tahun 2006 Cina juga menghabiskan 87 miliar dollar AS untuk membiayai R&D. Sehingga mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan baru berbasis inovasi muncul di Cina.¹⁰²

Pertumbuhan ekonomi Cina di tahun ini juga ditandai dengan penancangan *sustaining high rates of GDP growth to the nature of growth and its broad social implications*. Sejak itu pemerintah Cina mulai membicarakan soal pengembangan pasarnya dengan istilah '*sustainable growth*' untuk mengantisipasi maraknya pembangunan yang bersifat industrialisasi dan urbanisasi.¹⁰³

2.3.3 Tahun 2007

Tahun 2007 merupakan tahun pertama *after the ending of China's five-year transition period* sebagai anggota WTO sekaligus kelanjutan dari *sustainable economic growth*. Seperti yang dilansir dari *China Embassy*, perekonomian Cina tercatat sebagai berikut: GDP mencapai 24.953 triliun yuan, meningkat 11.9 persen dari 2006. *Fixed Assets Investment* berkisar 13.7239 triliun yuan, naik sebesar 24.8 persen dari 2006. *Total Retail Sales of Consumer Goods* berada pada 8.921 triliun yuan. *Foreign Trade* mencapai 2.1738 triliun dollar AS. *Foreign Exchange Reserves* sebesar 1.5282 triliun dollar AS, adanya kenaikan of \$461.9 billion as compared with that at the end of the pervious year. *Foreign Direct Investment* terdiri dari 37,871 *enterprises* dengan *foreign direct investment established in non-financial sectors*, turun 8.7 persen; total *paid-in foreign capital* sebesar 74.8 miliar dollar AS. *Overseas Direct Investment* senilai 18.7 miliar dollar AS meliputi *non-financial sectors*. *Consumer Price Index* meningkat 4.8 persen dari tahun 2006. *Amount of Expenditures on Research and Development Activities* sebesar 366.4 miliar yuan, meningkat cukup tinggi yaitu 22 persen dari 2006 and terhitung 1.49 persen dari GDP. *Number of Employed People* adalah 769.9 miliar, 5.9 juta lebih banyak dibanding tahun 2006. *Per-capita Net Income of Rural*

¹⁰¹ <http://www.uschina.org/info/chops/2006/china-economy.html>, diakses pada 26 Mei 2011 pukul 12.33 WIB.

¹⁰² <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/03/30/paten-dan-pertumbuhan-ekonomi-cina/>, diakses pada 27 Mei 2011 pukul 12.08 WIB.

¹⁰³ Zainuddin Djafar, *Op. Cit.*, hal. 17.

Residents sebesar 4,140 yuan, meningkat 9.5 persen dari 2006 dihitung setelah inflasi. Sementara *Per-capita Disposable Income of Urban Residents* adalah 13,786 yuan, atau meningkat sekitar 12.2 persen yang juga dihitung setelah inflasi.¹⁰⁴ Dengan kondisi ekonomi makro ini, pertumbuhan perekonomian/GDP Cina berada pada angka 9.7 persen di tahun 2007. Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah Cina untuk memperlambat laju pertumbuhan untuk stabilitas pertumbuhan perekonomian. *Stable growth* merupakan kunci terpenting dalam *central authorities' plans for next year's economic performance*.¹⁰⁵

Salah satu upaya untuk keberhasilan *sustainable growth* di Cina, tingkat konsumsi domestik perlu ditingkatkan. Seperti diketahui dalam ilmu ekonomi, mesin penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi asing, net ekspor serta konsumsi domestik (rumah tangga dan pemerintah). Untuk investasi asing dan net ekspor, Cina tidak perlu diragukan lagi. Keanggotaan Cina di WTO telah menyebabkan kerjasama perdagangan antara Cina dan AS semakin meningkat sehingga menghasilkan surplus perdagangan bagi Cina namun tidak demikian dengan AS. Defisit neraca pembayaran AS dapat digambarkan seperti dalam tabel perdagangan AS dan Cina¹⁰⁶ di bawah ini:

Tabel 2.4
Perdagangan Cina-AS Periode 2001 – 2007 (\$ Bilion)

	2001	2001	2003	2004	2005	2006	2007
US Exports	19.2	22.1	28.4	34.7	41.8	55.2	65.2
US Imports	103.2	125.2	152.4	196.7	243.5	287.8	321.5
Total	121.5	147.3	180.8	231.4	285.3	343	386.7
US Balance	-83	-103.1	-124	-162	-202.6	-232.5	-256.3

Sumber: US International Trade Commission, US Department of Commerce, and US Census Bureau

¹⁰⁴ <http://al.china-embassy.org/eng/zgk/1514666.htm>, diakses pada tanggal 27 Mei 2011 pukul 13.08 WIB.

¹⁰⁵ http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2006-12/14/content_758772.htm, diakses pada tanggal 27 Mei 2011 pukul 14.08 WIB.

¹⁰⁶ Xie Hao, *The Relation Between China's Economic Growth and Sino-US Trade*, Lund University, 2008, hal. 28, <http://biblioteket.ehl.lu.se/olle/papers/0002992.pdf>, diakses pada tanggal 27 Mei 2011 pukul 16.25 WIB.

Tabel 2.3 diatas memperlihatkan bahwa Cina terus mengalami surplus perdagangan semenjak keanggotaannya di WTO. Di sisi lain, AS justru mengalami defisit yang terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini menjadikan Cina sebagai kontributor terbesar kedua setelah AS terhadap *global economic imbalance*.

Nilai net ekspor Cina yang besar ini tidak terlepas dari besarnya investasi asing yang masuk yang berperan penting, memerikan kontribusi senilai 58 persen dari ekspor dan impor. Pada tahun 2007 ini total investasi asing di Cina sebesar 82.7 miliar dollar AS.¹⁰⁷

2.3.4 Tahun 2008

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi China tahun 2008 sebesar 9,8 persen, yang kemudian direvisi lagi menjadi 9,4 persen. Biro Statistik Cina melaporkan pertumbuhan ekonomi 2008 sebesar 9,6 persen yang menjadikan selisih pertumbuhan ekonomi antara Cina dan Jepang kian menyempit. Pemerintah Cina mengatakan, GDP tahun lalu mencapai 31,40 triliun yuan atau setara 4,6 triliun dollar AS.¹⁰⁸ China jauh di atas negara-negara lain yang menjadi mesin ekonomi dunia. Sebagai perbandingan, ekonomi AS tumbuh kurang dari 1 persen di tahun 2008. Ekonomi Jepang justru turun 1,2 persen. Lalu, India tumbuh 6,7 persen. Hal ini terkait dengan krisis keuang global yang terjadi yang berawal dari krisis finansial di AS. Istilah *subprime mortgage*¹⁰⁹ pun selalu muncul dalam setiap pemberitaan tentang krisis tersebut yang memiliki efek menular (*contagion effect*) pada setiap negara tanpa terkecuali Cina. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa krisis tersebut tidak menghantam sektor perbankan di Cina, tidak seperti halnya perbankan di AS dan UE. *Industrial and Commercial Bank of China*, yang sekarang merupakan bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia

¹⁰⁷ The US-China Business Council, *Foreign Investment in China*, hal. 1, <http://www.uschina.org/public/documents/2008/02/2008-foreign-investment.pdf>, diakses pada tanggal 29 Mei 2011 pukul 13.08 WIB.

¹⁰⁸ <http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/12/27/brk,20091227-215827.id.html>, diakses pada tanggal 27 Mei 2011 pukul 13.08 WIB.

¹⁰⁹ *Subprime mortgage* adalah kredit perumahan berbunga tinggi yang memiliki resiko tinggi akibat rendahnya aset dari peminjam. Merupakan kredit perumahan yang skema peminjamannya telah dimodifikasi sehingga mempermudah kepemilikan rumah oleh orang yang berpenghasilan tidak layak mendapatkan kredit.

membukukan peningkatan 35.2 persen keuntungan bersih sebesar 111.2 renminbi atau sekitar 16.26 miliar dollar AS. Kemudian *China Construction Bank*, yang merupakan bank terbesar kedua, tetap mengalami peningkatan 33.99 persen keuntungan bersih sebesar 92.64 renminbi. Sementara itu, *Bank of China* mengalami peningkatan 14.42 persen keuntungan bersih sebesar 64.36 miliar renminbi. Bank-bank lain di seluruh dunia tidak ada yang mengalami peningkatan sebesar bank-bank tersebut di atas. Dalam kondisi krisis keuangan yang tidak menentu, bank-bank di Cina terus mengalami peningkatan.¹¹⁰

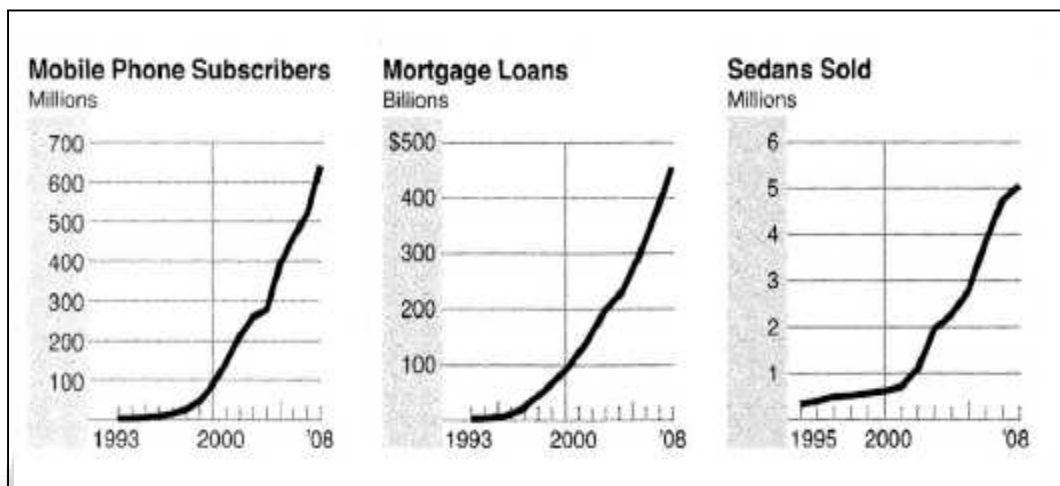
Dengan pertumbuhan GDP yang tetap tinggi dibandingkan negara-negara lain bahkan negara dengan yang memiliki perekonomian besar seperti AS dan Jepang, serta kondisi perbankan Cina yang tetap positif, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan krisis finansial global yang tengah terjadi di tahun 2008 ini. Analisis ekuitas pada Goldman Sachs Asia, Ning Ma, mengatakan bahwa Cina sangat positif dengan kondisi perbankannya dikarenakan perbankan Cina terkait sangat erat dengan sektor ekonomi makro sehingga dapat menunjang pertumbuhan GDP Cina pada 2 atau bahkan 5 tahun mendatang.¹¹¹

Sementara itu, di tengah krisis ekonomi global yang melanda yang memberikan dampak pada ekspor dan investasi asing yang masuk, Cina berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangganya. Seperti pada grafik berikut ini:

¹¹⁰ Chris Wright, *Crisis? What Crisis?*, di dalam Allen T. Cheng, *What China Wants*, International Institutional Investors, 2009, hal. 48.

¹¹¹ *Ibid.*

Grafik 2.2
Pertumbuhan Pasar Seluler, Kredit Perumahan & Automotif



Sumber: China Statistical Yearbook

Dari grafik 2.6 diatas, terlihat bahwa pengguna telepon seluler di Cina mengalami peningkatan signifikan yang mencapai puncaknya di tahun 2008. Hal yang sama juga terjadi pada kredit perumahan dan industri automotif khususnya jenis sedan yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya terutama sejak tahun 2000-an. Meningkatnya konsumsi pada bidang-bidang ini memperlihatkan adanya peningkatan dari pendapatan masyarakat Cina pada umumnya.¹¹²

2.3.5 Tahun 2009

Cina menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Tahun 2009 merupakan tahun yang sulit bagi pembangunan ekonomi Cina. Permintaan dari pasar internasional terus turun, kecenderungan deflasi global sangat nyata dan proteksionisme perdagangan mulai bermunculan. Cina berusaha menangani kondisi tersebut dengan meningkatkan belanja pemerintah. Belanja keamanan sosial ditingkatkan menjadi 293 miliar yuan, layanan kesehatan dinaikkan menjadi 118,1 miliar yuan serta penciptaan lapangan kerja baru sebesar 42 miliar yuan.¹¹³ Hal yang serupa seperti yang diberitakan oleh Japan Times, untuk mengurangi

¹¹² Edward Tse, *The China Strategy; Harnessing the Power of the World's Fastest Growing Economy*, Perseus Books Group, New York, 2010, hal. 27.

¹¹³ China Percaya Diri, *Kompas* (6 Maret 2009), hal. 10.

surplus perdagangannya, Cina mendorong konsumsi domestiknya, yang didukung dengan jumlah populasinya yang besar yaitu 1.3 miliar *people*.¹¹⁴

Cadangan devisa Cina pada tahun 2009 tercatat melebihi 1.9 triliun dollar AS sehingga peran Cina dibutuhkan untuk mengatasi krisis ekonomi global. Presiden AS, George W. Bush berbicara langsung dengan Presiden Hu Jintao mengenai pinjaman dana demi penanggulangan krisis. Kenyataan ini menegaskan bahwa Cina memang merupakan kekuatan ekonomi baru yang harus diperhitungkan. seperti yang dikemukakan oleh K. Deutsch, bahwa pengukuran *power* dapat dilakukan sebagai suatu bentuk mata uang yang memungkinkan pemiliknya untuk membeli nilai-nilai yang penting dan untuk mencapai tujuan-tujuannya.¹¹⁵ Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Cina dalam membantu mengatasi krisis ekonomi global yang berawal dari krisis finansial di AS sejak 2006.¹¹⁶ Pada Maret 2009, Perdana Menteri Cina, Wen Jiabao mengatakan bahwa Cina telah meminjamkan sejumlah uang yang sangat besar kepada AS dan meminta AS untuk memelihara kreditnya dengan baik sebagai upaya menghormati janjinya dan menjamin keamanan aset-aset yang dimiliki Cina di AS. Cina merupakan kreditur terbesar bagi AS, memiliki 776 miliar dolar AS surat-surat berharga AS dan saham senilai 450 miliar hingga 490 miliar dolar AS dari Fannie Mae, Freddie Mac, dan agen-agen sekuritas lainnya. Ini dimungkinkan karena Cina memiliki cadangan devisa terbesar di dunia, yang meningkat 178 miliar dolar AS pada kuartel kedua tahun 2009. Saat ini devisa Cina berjumlah 2,13 trilyun dolar AS. Cina juga sedang dalam perjalanannya menggantikan Jerman sebagai eksportir terbesar di dunia sebagaimana menurut WTO, dan menggantikan Jepang pada tahun 2010 sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia.

Sejalan dengan pencapaiannya, pada saat yang sama dengan pemberian pinjaman ke AS yaitu Maret 2009, Gubernur *People's Bank of China*, Zhou Xiaochuan, mengambil perhatian para pengambil kebijakan di seluruh dunia. Ia mengusulkan langkah yang dramatis bagi sistem keuangan internasional untuk mengeliminir mata uang dolar AS sebagai nilai tukar mata uang global. Sebagai gantinya adalah gabungan berbagai mata uang yang berfungsi sebagai unit

¹¹⁴ Five Myths about China's Economy, *The Japan Times* (15 April 2010), hal. 13.

¹¹⁵ Karl Deutsh, *The Analysis of International Relations*, *Op. Cit.*

¹¹⁶ Lili Hermawan, *Keluar dari Krisis Global*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2008, hal. 15.

akuntansi dari IMF (*special drawing rights*/SDR), yang akan memasukkan mata uang Yuan Cina. Hal ini disambut baik oleh Presiden AS, Obama yang memberikan sinyal tentang keinginan untuk menerapkan sistem SDR yang diusulkan Zhou. Sinyal yang diberikan Obama tersebut disambut terbuka oleh Menteri Keuangan AS, Timothy Geithner. Beberapa analis barat pun menyambut penggunaan sistem SDR tersebut dalam sistem keuangan dunia.

Meskipun Cina secara formal belum melakukan langkah tersebut sebagai kebijakan resmi, pemerintahnya telah memulai untuk memperbolehkan sejumlah perusahaan untuk menghargai barang-barang ekspornya dengan Yuan dan sekaligus memulai sistem *special drawing rights* (SDR).¹¹⁷

2.4 Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan dalam bab ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tidak diragukan lagi bahwa Cina memang merupakan kekuatan ekonomi baru di WTO mengingat periode waktu yang terjadi antara tahun 2002 sampai dengan 2009. Keberhasilan Cina sebagai kekuatan ekonomi baru sebagian besar diperoleh dari meningkatnya surplus perdagangan luar negrinya secara signifikan serta tingginya tingkat penanaman modal asing yang masuk ke negara tersebut. Signifikansi ekspor yang diperoleh Cina, khususnya di bidang tekstil bahkan berhasil menjadikan negara tersebut menempati peringkat utama dan secara umum Cina berhasil menggeser posisi negara-negara perekonomian besar yang cukup *established* sebelumnya. Puncaknya adalah tahun 2009, bahwa akumulasi besarnya nilai net ekspor pada tahun-tahun sebelumnya serta penerimaan investasi asing langsung menjadikan Cina memiliki tingkat modal yang besar sehingga memberikan kontribusi tersendiri bagi negara tersebut untuk menjadi kekuatan ekonomi yang bersifat mendunia.

¹¹⁷ Allen T. Cheng, *What China Wants*, International Institutional Investors, 2009, hal. 41-42.

Bab 3

Faktor Internal dan Eksternal Cina

Pada Bab ini penulis masuk kedalam pembahasan mengenai faktor internal dan eksternal yang menjadikan Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di WTO. Faktor internal, berdasarkan neo-realis, merujuk pada kemampuan atau kekuatan relatif suatu negara. Di dalam konteks penelitian ini, kekuatan relatif Cina ditandai dengan perekonomian domestik yang relatif kuat sebagai bentuk kesiapan negara tersebut sebelum bergabung di WTO. Sedangkan faktor eksternal, menurut Ikenberry merupakan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan di dalam struktur internasional, dengan berbagai pertimbangan kendala yakni kendala ekonomis dan kendala struktural. Proses ini akan mengacu pada kemampuan negara untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Di dalam konteks Cina, akan terlihat kemampuan negara tersebut di dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian pasca aksesinya di WTO dan bahkan terlihat adanya kecenderungan bahwa WTO menjadi instrumen bagi Cina di dalam mencapai kepentingan-kepentingannya.

3.1 Faktor Internal

Seperti yang dikemukakan oleh Jim Rohwer, Cina pasca reformasi ekonominya di akhir tahun 1970an disebut sebagai salah satu potensi kekuatan ekonomi di Asia yang masih dan terus berkembang, khususnya di antara negara-negara anggota ASEAN. Secara umum, Cina berada di atas rata-rata negara-negara anggota ASEAN, terkecuali untuk Singapura yang selain sebagai salah satu anggota ASEAN juga termasuk dalam kelompok negara-negara industri baru bersama-sama dengan Korea Selatan, Hong Kong dan Taiwan. *Average* pertumbuhan perekonomian Cina sejak akhir 1970-an sampai dengan 1991 berkisar 9 persen, sedikit berada di bawah Korea Selatan. Bahkan pertumbuhan GDP Cina dalam kurun waktu ini mengungguli Jepang dan negara-negara-negara industri baru di Asia, juga berada di atas pertumbuhan GDP negara-negara ASEAN. Meski demikian, berdasarkan World Bank, GNP perkapita Cina hanya sekitar US\$ 370 di tahun 1990, tanpa ada peningkatan berarti dibandingkan GNP

perkapita di tahun 1979 yang sebesar US\$ 270. Hal ini dikarenakan penghitungan GNP internasional yang dikonversikan terhadap US Dolar sementara Renminbi sebagai mata uang Cina terus terdepresiasi dalam beberapa tahun.

¹¹⁸ Selain itu pertumbuhan ekonomi Cina juga diiringi dengan tingkat inflasi yang relatif cukup ideal, yaitu 6.2 persen. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa inflasi dengan *range* antara 5 – 10 persen dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan penawaran sebab kenaikan harga akan memacu produsen untuk meningkatkan *output*nya. Sementara untuk bidang ekspor, Cina berhasil mencapai jumlah 85 milyar US Dolar, cukup jauh berada di atas ekspor negara-negara ASEAN. Ekspor barang-barang manufaktur memberikan kontribusi terbesar dari total ekspor keseluruhan. Sejak tahun 1990, secara perlahan tapi pasti produk manufaktur mulai memperlihatkan perkembangan. Cina menjadi penghasil TV terbesar dunia, kemudian diikuti penghasil semen terbesar di dunia. Cina juga menduduki tempat tertinggi di dunia sebagai produsen pupuk buatan dan baja. Secara perlahan dan pasti, menjadi penghasil banyak barang elektronik, seperti yang terlihat di bawah ini:

Tabel 3.1
Kontribusi Manufaktur Cina terhadap Dunia

46% of the world's motorcycle
40% of the world's DVD players
23% of the world's the VCRs
13% of the world's cell phones
12% of the world's desktop PCs
7% of the world's hardisk drives

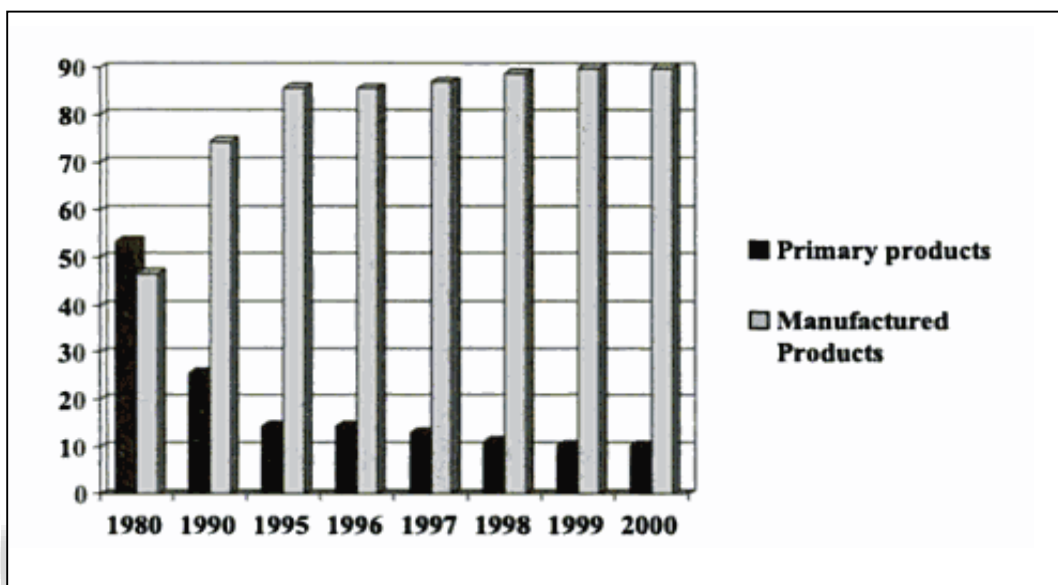
Sumber: diolah dari data dalam John Wong et al. (eds.), *Analysing China* (Singapore: East Asia Institute, 2002), hlm. 23

Dilihat dari struktur ekspornya, Cina bukan lagi pengeksport produk primer/hasil pertanian. Pada tahun 1980-an, ekspor barang-barang manufaktur masih di bawah ekspor hasil pertanian, tapi di tahun 1990-an perbandingan menjadi terbalik.¹¹⁹ Seperti yang terlihat berikut ini:

¹¹⁸ John Wong, *Understanding China's Socialist Market Economy*, Times Academic Press, Singapore, 1993, hal. 1-5.

¹¹⁹ I. Wibowo, *Op. Cit.*, hal. 30.

Grafik 3.1
Perubahan Struktur Ekspor di Cina, 1980-2000



Sumber: diolah dari data dalam John Wong et al. (eds.), *Analysing China* (Singapore: East Asia Institute, 2002), hlm. 28.

Program yang terfokus pada pertumbuhan dalam perdagangan luar negeri merupakan hasil berbagai kebijakan promosi ekspor. Terjadi juga pertumbuhan perdagangan dalam bentuk pengolahan dan perakitan (*processing and assembling*). Menurut angka resmi Cina, sekitar 70 persen kenaikan ekspor di tahun 1992 sampai dengan 1996. Pengolahan dan perakitan merupakan bentuk perdagangan dimana suatu negara asing mensuplai bahan baku dan suku cadang atau komponen yang digunakan untuk pengolahan dan perakitan di Cina dan kemudian Cina mengekspor dalam bentuk barang jadi. Dalam jenis perdagangan ini, tarif bea masuk atas bahan baku dan komponen yang digunakan untuk pengolahan dan perakitan serta mesin yang digunakan tidak masuk dalam hitungan. Adanya pesanan dari perusahaan asing atau dikerjakan sendiri oleh perusahaan asing menunjukkan bahwa jenis perdagangan ini dimungkinkan tanpa pihak Cina harus memastikan sarana ekspor atau mengembangkan teknologi khusus untuk itu. Selain itu, karena pajak tidak diperhitungkan, pemanfaatan posisi yang unggul dalam biaya produksi menjadi mungkin karena jumlah tenaga kerja yang besar dan murah. Dalam tahun 1996, biaya pengolahan dan perakitan

mencakup 56 persen dari nilai total ekspor.¹²⁰ Cina bahkan menduduki peringkat kesepuluh sebagai eksporter dunia, hanya sedikit berada di belakang negara-negara industri maju. Ini artinya bahwa perdagangan luar negeri Cina mengalami peningkatan tiga kali lebih cepat dibandingkan perdagangan luar negeri dunia secara keseluruhan. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Perdagangan Luar Negeri Cina, 1978 - 94

Year	Total	% Change	Total	% Change	Trade	Total	% of World	Foreign
	Exports*	Year on	Imports*	Year on	Balance*	Trade*	Year	Direct
		Year		Year				Investment*
1978	10.1	20.0	10.2	41.1	-0.3	20.2	0.9	
1979	13.6	26.3	14.3	29.6	-0.7	27.9		
1980	18.1	28.1	18.3	23.0	-0.2	36.4	0.9	
1981	21.6	35.5	19.6	23.1	1.8	41.3		
1982	21.1	12.8	17.3	-12.3	3.8	38.5		
1983	20.7	-2	19.6	12.0	1.1	40.3		0.9
1984	23.9	15.4	24.3	24.1	-0.4	46.2		1.4
1985	25.1	5.0	39.4	62.0	-14.2	84.5	0.9	2.0
1986	25.8	2.6	39.8	1.2	-14.1	65.6		2.2
1987	34.7	34.9	39.8	0.0	-5.1	74.5		2.8
1988	41.1	18.2	46.4	16.5	-5.3	87.4		3.7
1989	43.2	5.3	48.8	5.3	-5.6	92.1		3.8
1990	51.5	19.2	42.4	-13.3	9.2	93.9	1.6	3.8
1991	58.9	14.4	50.2	18.5	8.7	109.1		4.7
1992	69.9	18.1	64.4	28.3	5.2	134.0	2.2	11.3
1993	75.7	6.8	86.3	34.1	-10.7	162.0	2.5 (a)	25.8
1994	119.8	58.2	105.1	21.8	14.7	224.9		34.0

*(Billions of US Dollars)

Note (a) Estimated. Data from 1978-81 are from Department of Trade; otherwise from BOP.

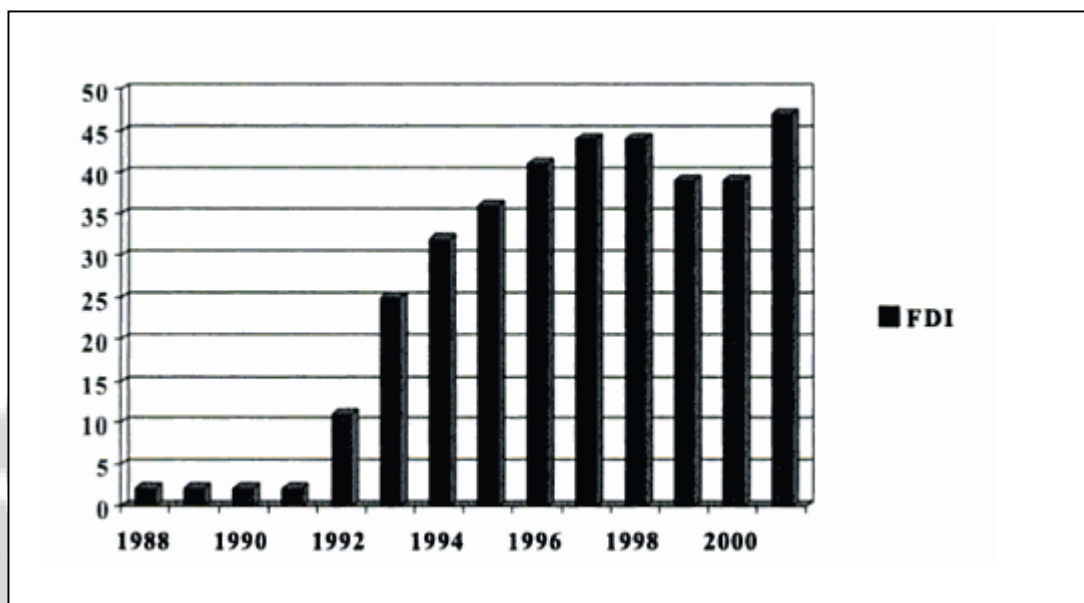
Source: State Statistical Bureau, *Chinese Statistical Abstract 1993*, 101; New China Agency, *People's Daily*, 10 January 1994, "China's Foreign Trade Increases to Reach \$195.7 Billion"; *China Daily Business Weekly*, 3 January 1994, "China to Slow Down GDP Growth", and IMF, *International Financial Statistics* (Year Book and June 1995).

Perdagangan luar negeri Cina sejak 1978 sampai dengan 1994 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meski tidak menghasilkan surplus perdagangan di setiap tahun, namun perdagangan luar negeri Cina memiliki nilai 2,5 persen dari total perdagangan dunia di tahun 1993. Cina juga terbuka bagi modal asing. Angka penanaman modal asing terus tumbuh sejak 1983 sampai

¹²⁰ Bob Widyahartono, *Op. Cit.*, hal. 47-48.

1994. Peningkatan modal asing Cina dapat terus dipertahankan sampai tahun 2000, seperti yang terlihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.2
Penanaman Modal Asing di Cina, 1988-2000



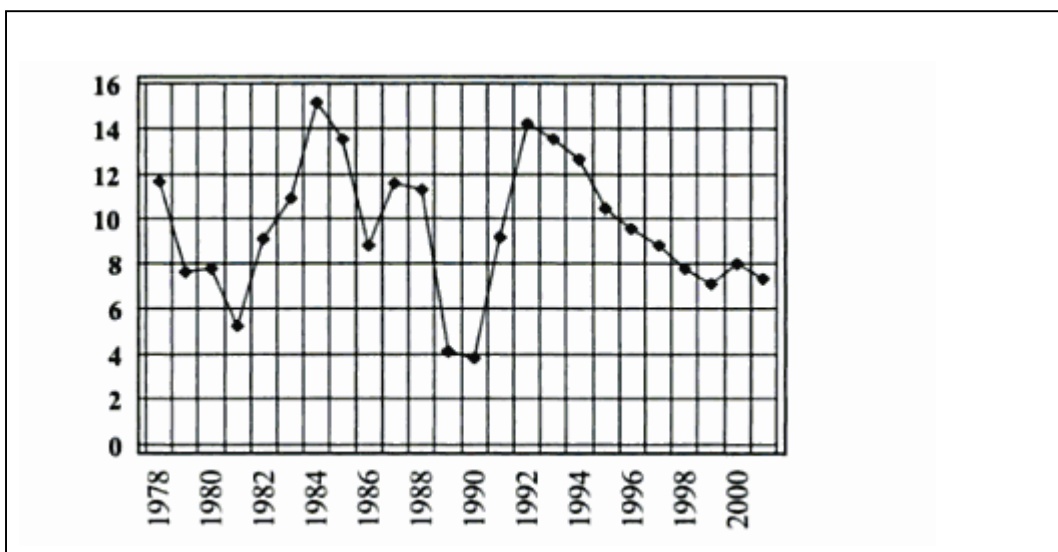
Sumber: diolah dari data dalam John Wong et al. (eds.), *Analysing China* (Singapore: East Asia Institute, 2002), hlm. 31.

Investor asing yang masuk ke Cina pada 1988 berkisar 2 miliar US Dolar. Tetapi tiga belas tahun kemudian yaitu pada 2001 angka tersebut meningkat melebihi 45 miliar US Dolar.¹²¹

Pertumbuhan GDP Cina sejak awal reformasi ekonominya sampai sebelum keanggotaannya di WTO dapat dilihat pada grafik berikut ini:

¹²¹ I. Wibowo, *Op. Cit.*, hal. 33.

Grafik 3.3
Pertumbuhan GDP Cina, 1978-2000



Sumber: diolah dari data dalam John Wong et al. (eds.), *Analysing China* (Singapore: East Asia Institute, 2002), hlm. 31.

Angka pertumbuhan ekonomi Cina mencapai puncaknya di tahun 1984 pada fase pertama reformasi ekonomi, yaitu 15 persen. Kemudian terus turun, hingga terendah pada 4 persen. Ini sehubungan dengan pemboikotan negara-negara barat atas peristiwa Tian'anmen. Di tahun 1990 kembali naik, mencapai angka 14 persen di tahun 1992. Mengalami *overheating* selama beberapa tahun, tapi kemudian tumbuh di sekitar angka 8 persen pertahun. Angka yang dikeluarkan pemerintah Cina menunjukkan untuk tahun 2002 adalah 7 persen yang merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia.¹²²

Pertumbuhan GDP pada grafik di atas diiringi dengan laju inflasi yang dapat digambarkan dalam grafik berikut ini:

¹²² I. Wibowo, *Op. Cit.*, hal. 30-31.

Grafik 3.4
Tingkat Inflasi Cina
Perubahan Annual pada Indeks Konsumsi



Sumber: TradingEconomics.com, China Economic Information Net

Grafik di atas memperlihatkan tingkat inflasi di Cina tertinggi terjadi di tahun 1994. Namun dapat diturunkan pada tahun-tahun berikutnya, bahkan mencapai angka minus di tahun 2000.

Salah satu tolak ukur di dalam penghitungan GDP adalah konsumsi masyarakat yang berhubungan dengan animo menabung masyarakat. Seperti yang dikemukakan IMF di dalam IMF Working Paper tentang tingkat konsumsi rumah tangga di Cina, tingkat konsumsi yang dihasilkan dapat dikatakan cukup rendah. Berada pada tingkat di bawah 40 persen dari total GNP. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Mark Baker dan David Orsmond yang mengatakan bahwa tingkat konsumsi Cina turun dari 52 persen dari GDP di awal 1980an menjadi 46 persen di akhir 1990an. Penurunan ini berbanding terbalik dengan tingkat tabungan masyarakat yang ditenggarai sebagai akibat tingginya tingkat suku bunga tabungan.¹²³ Suku bunga yang tinggi mengakibatkan meningkatnya animo menabung masyarakatnya selain juga karena adanya faktor historis tekanan dari pemerintah. Sejak akhir 1970 Cina merupakan negara kelima terbesar dalam tingginya tingkat tabungan masyarakat. Bahkan di tahun 1998, Cina menduduki posisi ketiga dibawah Singapura dan Malaysia (Bank Dunia, 1998), yang

¹²³ Mark Baker and David Orsmond, *Household Consumption Trends in China*, <http://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2010/mar/pdf/bu-0310-3.pdf>, diakses pada 30 April 2011 pukul 22.10 WIB.

menjadikan peningkatan investasi domestik.¹²⁴ Peningkatan tabungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Sumber Tabungan Domestik Cina, 1978-2001

Tahun	Sumber Tabungan Domestik			Total
	Belanja Pemerintah	Usaha Swasta	Rumah Tangga	
1978	51.40%	34.60%	14.00%	100.00%
1979	42.80%	33.70%	23.50%	100.00%
1980	32.10%	36.60%	31.30%	100.00%
1981	22.30%	45.80%	31.90%	100.00%
1982	18.40%	47.10%	34.50%	100.00%
1983	20.30%	35.00%	44.70%	100.00%
1984	20.60%	33.50%	45.90%	100.00%
1985	19.00%	31.00%	50.00%	100.00%
1986	18.80%	21.70%	59.50%	100.00%
1987	13.10%	25.80%	61.10%	100.00%
1988	7.30%	30.10%	62.60%	100.00%
1989	5.80%	28.30%	65.90%	100.00%
1990	5.20%	26.40%	68.40%	100.00%
1991	4.10%	25.40%	70.50%	100.00%
1992	3.47%	26.08%	70.45%	100.00%
1993	2.83%	25.62%	71.55%	100.00%
1994	2.35%	25.89%	71.76%	100.00%
1995	2.46%	24.84%	72.70%	100.00%
1996	2.04%	25.12%	72.84%	100.00%
1997	1.91%	24.78%	73.31%	100.00%
1998	2.29%	23.95%	73.77%	100.00%
1999	1.96%	24.18%	73.86%	100.00%
2000	2.84%	23.02%	74.14%	100.00%
2001	2.59%	22.10%	75.31%	100.00%

Sumber: 1978-1991 Xie Ping (1993); 1992-2003 Statistical Year Book of China (various issues).

Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa di dalam total tabungan domestik terjadi penurunan kontribusi dari sektor pemerintah, dari 51.4 persen di tahun 1978, terus turun hingga mencapai 2.59 persen di tahun 2001. Hal yang sama juga terjadi pada perolehan tabungan dari dunia usaha. Perbandingan terbalik terjadi pada sektor rumah tangga yang terus meningkat sejak 1978. Memberikan kontribusi sebesar 75 persen dari total tabungan domestik di tahun 2001.

¹²⁴ Jahangir Azis & Li Cui, *Explaining China's Low Consumption*, IMF Working Paper, IMF, 2010, hal. 5-6.

Sementara di sektor pengeluaran pemerintah, terjadi defisit yang dikalkulasikan oleh *International Monetary Fund* (IMF) sebagai berikut ini:

Tabel 3.4
Komponen-komponen Defisit Pemerintahan Cina
1987 – 1993

Komponen-komponen Defisit (as % of GDP)	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Budget Deficit*	2.2	2.4	2.3	2.1	2.4	2.5	2.1
PBC lending to Banks for policy loans	1.3	4.0	4.2	4.3	3.3	3.3	6.8
Consolidated government deficit	3.5	6.4	6.5	6.3	5.7	5.8	8.9

Note* This is the deficit of government at all levels calculated according to IMF rather than China standards.

Sumber: World Bank, China: Country Economic Memorandum, "Macroeconomic Stability in a Decentralized Economy" (October 26, 1994)

Defisit pengeluaran pemerintah telah ada sejak reformasi ekonomi dicanangkan. Defisit tertinggi terjadi di tahun 1993, sampai pada 9 persen dari GDP yang dihasilkan.¹²⁵ Salah satu penyumbang defisit adalah *People's Bank of China* (PBC) yang merupakan bank sentral sejak tahun 1984. Berada di bawah Menteri Keuangan, yang artinya PBC harus memenuhi tuntutan Menteri Keuangan untuk menutupi tingkat defisit kementerian tersebut karena penurunan pendapatan dan peningkatan kerugian perusahaan milik negara. Dengan kata lain, sebagian dari kegiatan PBC adalah membiayai sektor-sektor negara.¹²⁶ Juga adanya kelemahan struktural dan masih belum dapat diatasinya *non Performing Loans* (NPL) yang melanda bank-bank. Bank-bank dipaksa mengejar kredibilitas dan kompetensi profesional untuk mengurangi terlalu banyaknya campur tangan pemerintah dalam arena finansial.¹²⁷

Cina dikenal sebagai negara dengan jumlah kredit domestik yang berlebih di Asia sejak awal reformasi di tahun 1978 sampai akhir 1997, dengan perkembangan kredit dari 190 miliar renminbi ke 7,5 trilyun renminbi. Hal ini

¹²⁵ Jim Rohwer, *Op. Cit.*, hal. 154-155.

¹²⁶ Financial Service Liberalization in the WTO: Case Studies China, <http://www.iie.com/CATALOG/casestudies?DOBSON/hotchina.htm>, diakses pada 10 Mei 2011, pukul 10.20 WIB, hal 2-3.

¹²⁷ Bob Widayartono, *Op. Cit.*, hal. 8.

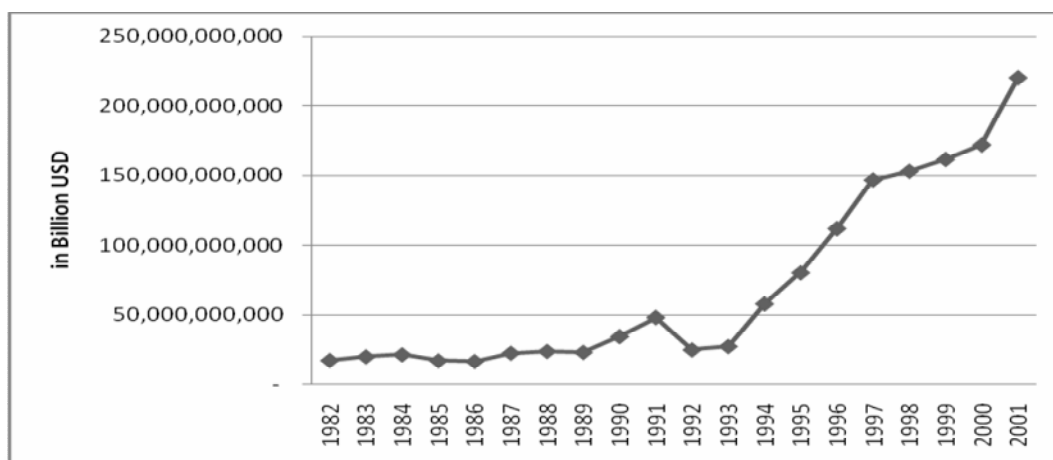
disebabkan oleh meningkatnya pinjaman bank milik negara ke perusahaan milik negara sehingga pada akhir 1995, rasio *debt-to-equity* (perbandingan antara seluruh utang suatu perusahaan terhadap modalnya sendiri) dari seluruh perusahaan milik negara Cina, termasuk pengembangan komersial dan pembentukan perusahaan telah melebihi 500 persen. Apalagi perusahaan negara tidak bisa menutupi biaya operasi dengan pendapatan mereka dan tidak bisa membayar utang jika pertumbuhan ekonomi lambat. Hal ini ikut melemahkan posisi keuangan bank milik negara.¹²⁸

Selanjutnya, semua kegiatan ekonomi agregat yang terjadi di Cina sejak reformasi ekonominya di tahun 1978 sampai dengan 2001 sebelum keanggotaannya di WTO tercatat di dalam neraca pembayaran pada tabel 2.6. Untuk beberapa kategori dapat dikatakan kurang stabil, cenderung fluktuatif. Termasuk di dalamnya adalah *current account* serta *errors and omissions* dimana terjadi kealpaan pencatatan dari *capital movement* sehingga perlu penambahan unsur *transfers and errors*. Pada perdagangan barang luar negeri, tercatat fluktuatif dari 1978 sampai dengan 1993. Mulai 1994 sampai 2001, BOP di bidang ini tercatat mengalami surplus perdagangan dan terus meningkat. Di bidang investasi asing langsung, sejak 1978 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 46,66 miliar US Dolar di tahun 2001. Hal ini menjadikan GDP Cina terus mengalami peningkatan pada mata uang *renminbi*, meski tidak demikian halnya apabila dikonversikan ke dalam US Dolar.

Berdasarkan Bank Dunia (lihat grafik 3.5) jumlah cadangan devisa Cina sejak 1982 sampai 1993 tercatat cukup konstan tanpa ada peningkatan yang signifikan. Baru pada tahun 1994 cadangan devisa Cina menembus di atas 50 miliar US Dolar dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2001, seperti yang terlihat berikut ini:

¹²⁸ Nicholas R. Lardy, *China and the Asian Financial Contagion*, di dalam Karl D. Jackson, *Asia Contagion: The Causes and Consequences of a Financial Crisis*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1998, hal. 80-81.

Grafik 3.5
Cadangan Devisa Cina 1982-2001



Sumber: Bank Dunia

Melihat angka-angka kegiatan agregat perekonomian Cina di atas, tidak heran dunia merasakan potensi besarnya perekonomian Cina. Yang ditakuti adalah potensi ekspornya yang meningkat signifikan setinggi 23 persen pada 2001 menjadi US\$ 266 miliar dan merupakan 4,4 persen dari ekspor dunia. Tetapi angka ini masih jauh dari Jepang yang berhasil menyumbang 6,6 persen dari total ekspor dunia di tahun yang sama.¹²⁹ Meningkatnya ekspor Cina terutama ke pasaran ASEAN dan AS. Peningkatan daya saing ekspor Cina adalah karena masuknya perusahaan-perusahaan asing yang memberikan kontribusi pada ekspor sebesar 50,1 persen pada ekspor tahun 2001.

Dengan menyimak berbagai laporan seperti laporan UNCTAD akan tampak bahwa daya tarik Cina terhadap PMA tetap kontinu dan menunjukkan angka meningkat tiap tahunnya. Tabel berikut menggambarkan perbandingan arus moda PMA sebagai berikut:

¹²⁹ I. Wibowo, *Op. Cit.*, hal. 38-40.

Tabel 3.5
Arus Penanaman Modal Asing (US\$ Miliar)

Negara	1990-1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
RRC	19,4	40,2	44,2	43,8	40,3	40,8	46,8
Korea Selatan	1,0	2,3	2,8	5,4	9,3	9,3	3,2
Malaysia	4,7	7,3	6,3	2,7	3,9	3,8	0,5
Thailand	2,0	2,3	3,6	5,1	3,6	2,8	3,8
Vietnam	0,9	1,8	2,6	1,8	1,5	1,3	1,3
Indonesia	2,3	6,2	4,7	-0,4	-2,7	-4,6	-3,3

Sumber: UNCTAD (2002) sebagai dikutip oleh Business News, 34.4.2003

Arus modal asing yang masuk ke Cina mulai terjadi di awal 1990-an karena jumlah penduduknya sebesar 1,2 miliar dengan daya beli yang relatif, upah buruh murah dan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen di tengah-tengah masih belum meningkatnya secara signifikan negara-negara asia lainnya. PMA yang masuk ke Cina tidak terbatas pada dana saja, tetapi juga teknologi dan tenaga ahli yang dikemas dalam satu paket. Ini berakibat pada kenaikan upah tenaga kerja sehingga dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat.¹³⁰ Ini artinya Cina merupakan ancaman serius di antara negara-negara di Asia tetapi belum menjadi ancaman serius bagi negara-negara maju.¹³¹

3.2 Faktor Eksternal

3.2.1 Biaya Ekonomi Keanggotaan Cina di WTO

Seperti yang dikemukakan Ikenberry bahwa akan ada *economic cost* yang timbul sebagai akibat pilihan kebijakan untuk bergabung dengan struktur internasional. *Economic cost* yang timbul atas kebijakan Cina untuk bergabung menjadi anggota di WTO antara lain: pertama, pada tingkat perusahaan akan timbul biaya-biaya yang tidak kecil dalam menghadapi perusahaan-perusahaan multi-nasional dari negara maju yang lebih berpengalaman untuk menjadi lebih kompetitif. Cina tercatat tidak memiliki satupun perusahaan dalam 300 perusahaan paling puncak di dunia dalam hal pengeluaran di bidang Research and Development. Selain itu, Cina juga tidak memiliki wakil dalam daftar perusahaan

¹³⁰ Bob Widyahartono, *Op. Cit.*, hal. 57-61.

¹³¹ I. Wibowo, *Op. Cit.*, hal. 38-40.

yang mempunyai *competitive edge*.¹³² Kedua, pada bidang pertanian. Akademi Ilmu Sosial Cina meramalkan bahwa jumlah gandum yang harus diimpor oleh Cina akan naik yang mengakibatkan hilangnya pendapatan petani. Padahal diketahui harga gandum terus merosot sejak 1997.¹³³ Situasi ini akan memaksa para petani meninggalkan sawah-ladangnya dan pergi ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Ini menjadi masalah pengangguran baru di kota. Ketiga, privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara yang dapat berakibat pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar. Sebelum masuk WTO, antara tahun 1997-2000 tercatat lebih dari 24 juta buruh pada perusahaan milik negara diberhentikan.¹³⁴ Mereka yang di *re-employed* Cuma mencapai angka 26 persen. Ini pun dengan pengertian pekerjaan dengan gaji yang rendah dan tunjangan yang tipis dibandingkan dulu waktu masih menjadi perusahaan milik negara.

Maka, akibat masuk WTO, akan terjadi kenaikan angka pengangguran besar-besaran, baik di kota maupun di desa. Pengangguran, pada gilirannya, akan menimbulkan aneka masalah berantai, seperti kriminalitas, penyakit, buta huruf, putus sekolah dan sebagainya.¹³⁵ Beberapa institusi dan akademisi di Cina memperkirakan bahwa dampak ini akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang hanya akan berkisar 6 persen.

Meski demikian, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa *economic cost* yang timbul sebagai akibat pilihan kebijakan Cina untuk bergabung dengan WTO akan dibebankan secara merata oleh negara-negara yang menjadi bagian dari WTO. Pembebanan ini diungkapkan dengan adanya kekhawatiran dari negara-negara yang akan menjadi partner dagang Cina. Bagi negara-negara berkembang, ekspor mereka akan kalah bersaing dengan produk Cina serta terjadinya dominasi aliran investasi asing. Sementara bagi negara-negara industri maju, pasar domestik mereka akan dibanjiri oleh produk-produk Cina yang

¹³² Peter Nolas, *China and the Global Economy*, Palgrave, New York, 2001, hal, 187.

¹³³ Antara 1997-2000 harga gandum merosot lebih dari 30 persen. Lihat Lu Xuei dan Yu Yongding dan Xeng Chengwen, *Zhongguo rushi yanjiu baogao: jinru WTO de Zhongguo chanye* dalam I. Wibowo, *Op. Cit.*, hal 70.

¹³⁴ Fan Gang, *Reform and Development: The Dual Transformation of China*, dalam Pamela C. M. Mar dan Frank Jurgen Richter (eds.), *China, Enabling a New Era of Changes*, John Wiley & Sons, Singapore, 2003, hal. 41.

¹³⁵ I. Wibowo, *Op. Cit.*

kompetitif dalam harga.¹³⁶ Diperkuat kemudian dengan adanya prediksi dari pihak US International Trade Commission (USITC) yang mengatakan bahwa pasca aksesinya Cina ke WTO akan menyebabkan defisit perdagangan bagi pihak AS sampai beberapa tahun ke depan.¹³⁷ Keanggotaan Cina di WTO berarti memecahkan masalah *normal trading relations* dengan AS sehingga dapat menyingkirkan hambatan-hambatan yang telah lama terjadi dalam hubungan antar kedua negara tersebut. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh He Qinglian yang mengatakan bahwa aksesinya Cina ke WTO akan memberikan *benefits* bagi Cina di dalam ekspansi eksportnya, seperti misalnya potensi ekspor di bidang tekstil, mainan anak, maupun elektronik. Ekspor Cina yang kompetitif merupakan hasil dari *low labor cost* yang pada akhirnya akan menyerap investasi asing.¹³⁸ Menurut China Daily News penyerapan investasi asing juga merupakan dampak dari meningkatnya sektor swasta yang selama sebelum aksesinya masih mendapat perlakuan diskriminatif, bahwa mereka akan mendapatkan hak yang sama dengan perusahaan pemerintah. Begitu pula halnya pada sektor usaha domestik yang akan dapat secara bebas dan mandiri untuk berkecimpung di bidang perdagangan luar negeri sehubungan dengan adanya adanya restriksi atau pembatasan, terkecuali untuk komoditi vital seperti minyak, gandum dan tembakau.¹³⁹ Keuntungan juga dapat diperoleh dari peningkatan konsumsi domestik, dengan adanya penurunan tarif impor. Semua *benefits* yang telah disebutkan pada akhirnya akan menstimulus pertumbuhan GDP Cina.¹⁴⁰ Dengan kondisi *cost benefit* seperti diatas, He Qinglian mengatakan bahwa *China should enter into WTO*.¹⁴¹

¹³⁶ Ramesh Adhikari & Yongzheng Yang, *What Will WTO Membership Mean for China and Its Trading Partners?*, http://relooney.fatcow.com/3040_c188.pdf, diakses pada 26 April 2011 pukul 19.20 WIB.

¹³⁷ Robert E. Scott, *The High Cost of the China-WTO Deal*, Economic Policy Institute, Washington, 2000, hal. 2-4.

¹³⁸ He Qinglian, *What Are the Benefits of China's Entry into WTO?*, http://www.uscc.gov/researchpapers/2000_2003/pdfs/whatbene.pdf, hal. 1-3, diakses pada 10 Mei 2011 pukul 9.30 WIB.

¹³⁹ WTO Entry Boosts China's Economy, <http://www.china.org.cn/english/49058.htm>, diakses pada 11 Mei 2011 pukul 12.09 WIB.

¹⁴⁰ Gregory C. Chow, *The Impact of Joining WTO on China's Economic, Legal and Political Institutions*, *Journal of Economic Literature*, hal. 2, <http://www.princeton.edu/~gchow/WTO.pdf>, diakses pada 12 Desember 2010 pukul 10.33 WIB

¹⁴¹ He Qinglian, *Op. Cit.*

Meskipun biaya liberalisasi pasar sangat tinggi, dalam jangka panjang akan memberikan keuntungan.¹⁴²

3.2.2 Kendala Struktural Keanggotaan Cina di WTO

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa *structural constraints* merupakan kendala-kendala bersifat struktural yang pada akhirnya mengacu pada kemampuan negara untuk mengatasi kendala struktural tersebut baik yang bersifat domestik serta kendala yang bersifat dari luar/internasional.

I. Kendala Struktural Internal/Domestik

I.1 Model Negara, Sistem Politik dan Pemerintahan di Cina

Cina merupakan salah satu negara model “negara organis tenaga kerja” atau yang disebut Harding sebagai “Organis Labour State”. Negara semacam ini diorganisir secara ketat untuk menjalankan kediktatoran atas kaum proletar dengan tujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang dipimpin oleh anggota partai yang tersebar di dalam maupun di luar administrasi pemerintahan. Tujuan terakhir bukan negara, bukan juga partai, melainkan produksi.¹⁴³

Ada sepuluh ciri dari sebuah organis labour state, antara lain: pertama, negara memiliki monopoli eksklusif untuk menyusun rencana pembangunan ekonomi. Kedua, negara menguasai kepemilikan (*ownership*) dan sekaligus kendali (*control*) atas kekuatan produksi. Ketiga, negara menggabungkan dan menyamakan tujuan negara dan masyarakat, menurut logika ini tidak ada perbedaan antara lingkungan sosial, lingkungan produktif, dan lingkungan politik. Keempat, negara menjadi satu-satunya agensi yang menentukan ukuran tenaga kerja dan norma-norma masyarakat. Kelima, lama-sebentar dan intensitas tenaga kerja merupakan prinsip bagi keadilan distributif. Keenam, negara memberikan pekerjaan, promosi, dan pensiun sedemikian rupa sehingga mayoritas penduduk bergantung pada negara. Ketujuh, warga negara memiliki hak sesuai dengan

¹⁴² Umar Suryadi Bakry, *Cina, Quo Vadis? Pasca Deng Xiaoping*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 167.

¹⁴³ Neil Harding, *The State in Socialist Society*, Macmillan, London, 1984, hal. 15.

kontribusi masing-masing bagi sistem produksi. Tetapi hak ini tidak boleh dipakai untuk menentang negara atau mempertanyakan tujuan yang telah dirancang oleh negara. Tanda dari kesantunan adalah bersuara sama. Delapan, hanya ada satu partai politik tempat mengungkapkan kepentingan sosial, dan partai ini sekaligus juga merupakan kendaraan untuk menyalurkan gagasan-gagasan sosialis menjadi kekuatan inspirasi dari masyarakat, membuat perencanaan ekonomi, dan menggalang rakyat untuk mematuhi peraturan negara. Negara dan partai terkait satu sama lain dalam banyak hal, terutama dalam hal fungsi, personel dan hak-hak prerogatif. Partai secara khusus adalah agen penasehat utama dalam membagikan welfare benefits serta menjatuhkan sanksi di bidang welfare. Sembilan, pemilihan umum ada tetapi merupakan ritus untuk menggalang persatuan masyarakat, partai dan negara, juga untuk mengiklankan rencana produksi, serta untuk menggairahkan masyarakat agar memenuhi semua itu. Sepuluh, sistem produksi sosialis bersifat amat kompleks dan ekstensif, sehingga menyedot banyak orang ke dalam partai maupun aparat negara yang berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat. Pada gilirannya, hal ini menyebabkan fungsi, kekuasaan dan kompleksitas organisasi terus bertambah.¹⁴⁴

Namun di akhir tahun 1970-an, ciri no 1-6 telah mengalami perubahan fundamental, yaitu perubahan dalam sistem ekonomi. Sementara ciri no 7-10 masih dipertahankan. Karena itu, setiap pembahasan mengenai struktur pemerintahan Cina, selalu ada pembahasan mengenai Partai, yakni Partai Komunis Cina (PKC). PKC disusun secara hirarkis, yang terdiri dari: Komite Harian Politbiro: setiap hari bertemu, berjumlah kurang dari 10 orang, Politbiro; merupakan badan tertinggi dalam sistem PKC yang berjumlah sekitar 20 orang. Secara undang-undang, kekuasaan tertinggi partai ada pada kongres nasional partai yang diadakan setiap lima tahun sekali. Kongres partai inilah yang menggariskan kebijakan dan juga memilih pemimpin tertinggi mereka. Roda pemerintahan dijalankan oleh Komite Sentral: setahun sekali bertemu, berjumlah sekitar 150 orang, Kongres Partai: bertemu sekali lima tahun, berjumlah sekitar 2000 orang, Massa anggota partai. Keputusan besar dan vital biasanya diambil pada kesempatan kongres, tetapi kadang juga dalam sidang tahunan komite

¹⁴⁴ I. Wibowo, *Negara dan Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2000, hal. 91-93.

sentral. Semua keputusan dan kebijakan selalu diambil di pusat dan diteruskan ke daerah. Jalur komando dalam partai mengalir dari pusat kepada komite-komite partai, yang akan meneruskan lagi kepada cabang-cabang dan akhirnya kepada anggota. Disini terlihat tegas dan ketatnya sentralisme.

Hubungan antara partai dan negara adalah hubungan yang sifatnya subordinatif, bahwa negara tunduk pada partai. Partai adalah pelaksana perencanaan dan sekaligus penguasa tunggal. Partai dengan penunjukkan kader-kadernya menduduki posisi penting dari setiap administrasi negara. Dominasi oleh partai seperti ini dengan sendirinya menimbulkan masalah yaitu tidak adanya pemisahan partai dari negara yang pada akhirnya terjadi penumpukan kekuasaan. Deng Xiaoping yang kemudian mengusulkan dilakukan pemisahan partai dari negara.¹⁴⁵

Rupanya eksperimen sistem dianggap tidak mampu menghasilkan stabilitas politik karena dianggap dapat menimbulkan perpecahan kepemimpinan. Hal ini didasarkan pada asumsi apabila pemimpin tertinggi partai adalah pemimpin tertinggi negara, maka dapat diambil keputusan final tanpa ada kesempatan untuk perbantahan. Peristiwa Tian'anmen di tahun 1989 merupakan bentuknya di mana Zhao Ziyang sebagai Sekretaris Jendral Partai bersebrangan dengan Li Peng sebagai Perdana Menteri.

Dengan kata lain, sistem politik Cina telah bergeser, kembali ke sebuah sistem penyatuan antara partai dan pemerintah. Partai tetap lebih tinggi daripada pemerintahan, tetapi tidak menghasilkan sebuah diktator oleh pemimpin tertinggi partai. Pemerintah dan semua lembaga tinggi negara adalah pelaksana dari kebijakan yang dibuat oleh partai.

Tidak ada sistem kontrol oleh rakyat. Masalah yang timbul dibawa ke Politbiro untuk dicarikan jalan keluarnya dan baru dikembalikan ke pemerintah atau lembaga tinggi negara lainnya. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh partai tetap berciri rasional.¹⁴⁶ Sistem satu partai sudah cukup menawarkan pluralisme rakyat Cina.¹⁴⁷ Hal ini dipertegas dengan pidato Wu Banggao sebagai ketua

¹⁴⁵ I. Wibowo, *Op Cit.*, hal. 130.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 127-131.

¹⁴⁷ John dan Doris Naisbitt, *Op. Cit.*, hal. 83.

komite pengawas Kongres Rakyat Cina di bulan Maret 2009, di hadapan 3000 anggota, yang berkata, bahwa Cina tidak akan memiliki kekuasaan multipartai, atau pemisahan kekuasaan legislatif dan yudikatif.¹⁴⁸

Karena itu, selain juga demi menjaga sentralisme, Cina dibagi menjadi pemerintah pusat (Zhongyang) dan pemerintah daerah (Difang) dimana pemerintah daerah dibagi lagi menjadi propinsi (Sheng), kabupaten (Xian) dan kota (Shi),¹⁴⁹ yang ditetapkan di dalam UUD tahun 1954.¹⁵⁰ Kota adalah bagian pemerintahan yang dapat masuk di segala tingkatan administratif negara, bergantung pada ukuran dan peranannya. Tiap kota memiliki serangkaian badan pemerintahan maupun partai yang paralel dengan yang terdapat di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten.

Kabupaten adalah organisasi pemerintahan utama yang berada di bawah propinsi. Memiliki jumlah terbanyak dibanding daerah-daerah administratif lainnya. Di tingkat inilah kebijakan dari pusat diimplementasikan. Serupa dengan propinsi, pemerintahpun dilengkapi dengan organ-organ pemerintahan yang paralel dengan yang terdapat di propinsi.

Propinsi adalah unit administrasi pemerintahan yang berada langsung di bawah pemerintahan pusat. Birokarasi pemerintahan propinsi, juga tingkat lain di bawahnya, merupakan replikasi dari birokrasi di tingkat pusat. Selain propinsi, daerah lain yaitu kota setingkat propinsi, dan daerah otonom juga masuk pada tingkat ini. Peranan propinsi cukup kuat karena posisinya yang setara dengan tingkat kementerian. Bahkan beberapa pimpinan propinsi duduk dalam politbiro partai.

Struktur pemerintahan pusat merepresentasikan struktur pemerintahan lainnya. Pada tingkat pusat dipimpin oleh Dewan Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan beberapa wakilnya serta beberapa kementerian dan komisi-komisinya yang berubah-ubah jumlahnya. Dewan negara benar-benar memegang kendali atas pemerintah-pemerintah di bawahnya.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal. 44.

¹⁴⁹ Bangkit A. Wiryawan, *Zona Ekonomi Khusus, Strategi China Memanfaatkan Modal Global*, CCS: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2008, hal. 16-17.

¹⁵⁰ I. Wibowo, *Negara dan Masyarakat, Op. Cit.*, hal. 96.

Anggota Dewan Negara dipilih melalui Konggres Rakyat Nasional, yang sekaligus juga berfungsi menangani urusan negara sehari-hari karena Konggres yang hanya bersidang satu tahun sekali.¹⁵¹ Pada kenyataannya, urusan sehari-hari negara banyak dikendalikan oleh partai melalui Komite Harian Politbiro, sementara Konggres hanya mengesahkannya.

Birokrasi di Cina tidak hanya mengurus administrasi pemerintahan, tapi juga perencanaan ekonomi. Hal ini sejalan dengan model negara organis tenaga kerja seperti diuraikan di atas. Untuk memnuhi fungsi ini, Dewan Negara juga merangkap menjadi dewan perencana ekonomi.¹⁵²

I.2 Sistem Ekonomi Cina

Cina merupakan salah satu model negara organis tenaga kerja, namun seperti yang telah dikemukakan diatas, pada akhir tahun 1970-an, ciri no 1-6 telah mengalami perubahan fundamental, yaitu perubahan dalam sistem ekonomi. Sementara ciri no 7-10 masih dipertahankan. Perubahan sistem ekonomi juga sejalan dengan perubahan pada sistem ideologinya. Hal ini karena ideologi merupakan cerminan dari basis ekonomi.

Berawal dari era “reformasi dan pembukaan diri” di tahun 1978, rakyat Cina memulai evolusinya dari masyarakat komunis pascaperang ke bentuk baru tata pemerintahan dan pembangunan.¹⁵³ Di bawah era kepemimpinan Deng Xiaoping, kebijakan Open Policy menitikberatkan pada ekspansi relasi ekonomi Cina terhadap dunia luar.¹⁵⁴ Pada intinya ada 9 main grand economics design yang ditekankan, antara lain sebagai berikut; 1. *A reduced military budget*, 2. *Subordination of geopolitics to economic growth*, 3. *Strategic reliance on the USA*, 4. *Subordination of ideology to economic pragmatism*, 5. *Substantial subordination of politics to economy* 6. *Acceptance of foreign corporations and technology*, 7. *An increasingly market-oriented economy*, 8. *Encouragement of domestic economic competition*, and 9. *An increasingly outward-looking*

¹⁵¹ Kenneth Lieberthal, *Governing China: From Revolution Through Reform*, WW Norton and Company, London, 1995, hal. 163.

¹⁵² I. Wibowo, *Negara dan Masyarakat*, Op. Cit., hal. 100.

¹⁵³ John dan Doris Naisbitt, Op. Cit., hal. 1.

¹⁵⁴ Jude Howell, *China Opens Its Doors*, Lynne Rienner Publishers Inc., USA, 1993, hal. 3.

economic and social picture.¹⁵⁵ Selanjutnya, semua kebijakan tersebut menekankan bahwa soal-soal yang terkait dengan ekonomi, teknologi, dan korporasi harus diutamakan. Dengan menyebutnya bahwa Cina memasuki era ‘planned economy’ yang cukup tegas dan realistis.¹⁵⁶

Kebijakan Open Policy memiliki tekad untuk lebih bermutu dalam karya dan strategi jangka panjang untuk kemakmuran bangsanya yang menandakan suatu proses evolusioner atau gradual.¹⁵⁷ Hal ini mengakibatkan terjadinya evolusi sistem ekonomi di Cina seperti pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.6
Evolusi Sistem Ekonomi

1978-79	Ekonomi Terencana
1979-84	Ekonomi Terencana didampingi dengan regulasi pasar
1984-87	Ekonomi komoditas terencana
1987-89	Ekonomi dimana negara mengatur pasar dan pasar mengatur perusahaan
1989-91	Ekonomi dengan integrasi organis antara ekonomi terencana dan regulasi pasar
1992	Ekonomi pasar sosialis dengan ciri khas Cina

Sumber: Fan Gang, *Reform and Development: the Dual Transformation in China*, dalam Pamela C. M. Mar dan Frank Jurgen Richter, *China. Enabling A New Era of Changes*, John Wileys & Sons, Singapore, 2003, hal. 37.

Untuk mewartahi kegiatan ekonomi jenis baru ini perlu ada ideologi baru yang mengijinkan mekanisme pasar. Atau dengan kata lain, perubahan sistem ekonomi mengakibatkan perubahan pada ideologi. Evolusi sistem ekonomi di Cina sejalan dengan pergeseran ideologi seperti yang nampak pada tabel 3.2 berikut ini:

¹⁵⁵ William M. Overholt, *China the Next Economic Superpower*, Weidenfeld & Nicolson, London, UK, 1993, hal 216-217.

¹⁵⁶ Jinglian Wu, *Understanding and Interpreting Chinese Economic Reform*, TEXERE, Thomson-South Western, UK, 2005, hal. 435.

¹⁵⁷ Bob Widyahartono, *Op. Cit*, hal. 11-12.

Tabel 3.7
Evolusi Ideologi Cina

1978-87	Komunisme
1987	Sosialisme tahap awal
1992	Pengesahan teori Deng Xiaoping
1993	Ekonomi pasar sosialis
1997	Penegasan sosialisme tahap awal

Sumber: I. Wibowo, *Belajar dari Cina*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2004, hlm. 83.

Para ideolog Partai menciptakan istilah baru, yaitu ekonomi pasar sosialis. Tetapi untuk sampai pada pencapaian ini, harus ada kerangka besar yang disebut teori Deng Xiaoping yang disahkan pada Kongres Partai ke-14 di tahun 1992, terutama pemikirannya tentang ekonomi, yang dilatarbelakangi terjadinya kebuntuan ekonomi selama tiga tahun (sejak 1989). Dikatakan bahwa ekonomi harus bertumbuh dengan cepat.

Pada tahap awal sosialisme ekonomi Cina dijalankan dengan mengurangi peran negara dan memperluas mekanisme pasar. pada 1 Januari 1985 pemerintah Cina menegaskan kembali keputusan untuk menghapus pembelian hasil panen dengan sistem monopoli oleh negara. Penghapusan monopoli negara berarti mekanisme pasar diberlakukan. Hal ini didukung dengan adanya jaminan dari pemerintah bahwa tidak akan terjadi kenaikan harga, mengingat ekonomi pasar di Cina belum melembaga dan sudah terbiasa dengan pengelolaan ekonomi secara terpusat.¹⁵⁸

Untuk mendukung sistem ekonomi pasar, serangkaian reformasi institusi ekonomi pasar juga dilakukan, antara lain:¹⁵⁹

- a. Reformasi fiskal pada tahun 1994 yang mengatur pembagian pendapatan pajak antara pemerintah pusat dan daerah.
- b. Dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur bank sentral dan komersial di tahun 1995.
- c. Pada 1994 didirikan pasar valuta asing antar bank yang disatukan pada tingkat nasional yang berarti berakhirnya peredaran sertifikat mata uang

¹⁵⁸ A. Zaenurrofik, *China Naga Raksasa Asia*, Garasi, Yogyakarta, 2008, hal. 128-129.

¹⁵⁹ Lu Ding, *China's Institution Development for a Market Economy since Deng Xiaoping's 1992 Nanxun*, dalam John Wong dan Zheng Yongnian (eds.), *The Nanxun Legacy and China's Development in the Post-Deng Era*, Singapore University Press, Singapore, 2001, hal 51-73.

asing dan membuka peluang besar bagi Cina untuk pengembangan perdagangan internasional.

- d. Pengimplementasian Undang-Undang Kebangkrutan yang mendorong negara lebih keras berjuang dalam kompetisi bisnis.
- e. Sebagai antisipasi UU Kebangkrutan, pemerintah membangun sistem “social security” untuk menanggulangi pemutusan hubungan kerja akibat reformasi di perusahaan negara. Akibatnya berkembang property market baik untuk tempat tinggal dan usaha.
- f. Diatas semuanya, di tahun 1999 UUD Cina diamandemen untuk menampung masuk kelompok pengusaha swasta. Hal ini ditindaklanjuti oleh Konggres Rakyat Nasional yang mengesahkan UU Perusahaan dengan Dana Individu, yang berlaku sejak 2000. Semua ini membuka jalan untuk terciptanya lingkungan yang ramah bagi pengusaha.

Cina juga terbuka bagi modal asing dimana para investor mendapatkan berbagai kemudahan yang secara khusus diberikan di wilayah-wilayah yang disebut “zona ekonomi khusus” atau *Special Economi Zone (SEZ)*¹⁶⁰ dan “zona pembangunan ekonomi dan teknologi” atau *Economic and Technological Development Zones (ETDZs)*.¹⁶¹ Kota-kota ini diarahkan untuk menopang perdagangan dengan luar negeri. Zona ekonomi khusus meliputi wilayah Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen, dan Hainan. Sedangkan zona pembangunan ekonomi dan teknologi atau kota-kota terbuka meliputi Qinguadao, Beijing, Dailan, Tianjin, Yantai, Qingdao, Lianyugang, Nanjing, Nantong, Shanghai, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Zhanjiang serta Beihai.¹⁶² Berbeda dari zona ekonomi khusus, zona pembangunan ini masih menjadi bagian dari sebuah kota, tapi dikhususkan

¹⁶⁰ SEZ adalah wilayah khusus untuk menarik investasi asing dan teknologi canggih ke Cina. SEZ merupakan terminal perdagangan dan investasi modern dengan infrastruktur yang superior. Pemerintah Cina memberikan kebijakan ekonomi khusus dan sistem manajemen ekonomi yang berbeda dari wilayah Cina lainnya, seperti konstruksi pembangunan area ini menggunakan investasi asing, dan pemerintahan memberikan preferensi khusus untuk masuk dan keluar Cina bagi investor asing. ETDZs merupakan kelanjutan dari pengembangan SEZ.

¹⁶¹ I. Wibowo, *Op. Cit.*, hal. 31.

¹⁶² Bob Widyahartono, *Op. Cit.*, hal. 46-47.

untuk investor asing. Fasilitas *tax deduction* maupun *tax exemption* diberikan di kawasan ini bagi para investor asing.¹⁶³

Tahapan selanjutnya rencana pembangunan ekonomi Cina adalah peningkatan pendapatan perkapita menjadi setingkat dengan negara maju madya (semi developed country) dengan mencapai modernisasi pada pertengahan abad ke-21. Cina membuka pasar untuk penanaman modal asing sejalan dengan dan dimantapkan (reinforced) oleh upaya Cina meningkatkan ekspor.¹⁶⁴ Perdagangan internasional memegang peranan penting¹⁶⁵ karena sejak awal reformasi ekonomi Cina menekankan bahwa perusahaan asing yang menanamkan modalnya diwajibkan menghasilkan sebagian besar produknya untuk ekspor.¹⁶⁶

Secara spesifik karakteristik ekspor Cina ke pasar global bercirikan sebagai berikut; pertama, 'labor intensive' dan 'low cost value added part of production', dan dengan harga produk yang murah. Ini dikarenakan Cina kaya akan bahan baku yang menjadi basis dari berbagai produk ekspornya. Tapi Cina masih menghadapi kendala dalam hal memasarkan produknya. Hasilnya, fix price yang dikuasai atau dimonopoli oleh para broker di Cina belum optimal.

Ciri khas penting kedua, Cina belum mempunyai trade power yang sejajar dengan Jepang maupun Korea Selatan. Pertumbuhan ekonominya belum menghasilkan value added yang besar. Karena itulah Cina berambisi menuju 'better economic life'. Ketiga, Cina menginginkan membuka pasar domestiknya seoptimal mungkin. Karena itulah diperlukan pendekatan secara bilateral dan multilateral. Sehingga aturan-aturan WTO merupakan basic requirements untuk sistem ekonomi pasar yang lebih terbuka dan akan menjadi panutan dalam melakukan transaksi perdagangannya dengan negara-negara lain.¹⁶⁷ WTO dianggap sebagai sarana untuk mencapai industrialisasi yang cepat yang dapat meningkatkan pendapatan melalui ekspor yang tinggi serta modal dari luar dan termasuk juga masuknya teknologi maju.¹⁶⁸ Selain itu, menurut Woo, akses Cina ke WTO juga menjadi komponen penting bagi restrukturisasi ekonomi Cina. Ini

¹⁶³ I. Wibowo, *Op. Cit.*, hal. 31-32.

¹⁶⁴ Bob Widyahartono, *Op. Cit.*, hal. 16.

¹⁶⁵ Jinglian Wu, *Op. Cit.*, hal. 435.

¹⁶⁶ Bob Widyahartono, *Op. Cit.*, hal. 16.

¹⁶⁷ Jinglian Wu, *Op. Cit.*, hal. 435.

¹⁶⁸ I. Wibowo, *Op. Cit.*, hal. 63.

artinya bahwa menjadi bagian dari WTO dirasakan sebagai kebutuhan mendesak demi pelaksanaan kebijakan peningkatan pendapatan perkapita menjadi setingkat dengan negara maju madya (semi developed country) dengan mencapai modernisasi pada pertengahan abad ke-21. Meskipun menimbulkan keragu-raguan dari Partai untuk membiarkan ekonomi berkembang bebas dari campur tangan Partai pada semua tingkat dari sistem tersebut, sehingga dapat melahirkan dilema politik jika struktur kekuatan politiknya tetap tidak berubah.¹⁶⁹

II. Kendal Struktural Eksternal/Internasional

II.1 Normatif

II.1.1 Transformasi GATT ke WTO

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dibentuk pada tahun 1995 dan merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur perdagangan antar negara-negara di dunia dan mempromosikan liberalisasi perdagangan. Sebelumnya, forum perdagangan barang dibicarakan pada Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade – GATT*), yang dibentuk pada tahun 1947.¹⁷⁰

Di bawah sistem GATT, masalah-masalah perdagangan diselesaikan melalui serangkaian perundingan multilateral yang dikenal dengan nama “Putaran Perdagangan” (trade round). Sejak tahun 1947 hingga 1994, GATT mengadakan delapan putaran perundingan perdagangan multilateral, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

¹⁶⁹ Joseph S. Nye Jr., *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*, Basic Books Inc., New York, 1990, hal. 135.

¹⁷⁰ Informasi mengenai sejarah GATT dan WTO hingga KTM-IV di Doha, Qatar, dikutip dari Das (1999) dan Das (2003) di dalam buku Hira Jhamtani, *Op. Cit.*, hal. 3.

Tabel 3.8
The GATT Trade Rounds¹⁷¹

Year	Place/Name	Subjects Covered	Countries
1947	Geneva	Tariffs	23
1949	Annecy	Tariffs	13
1951	Torquay	Tariffs	38
1956	Geneva	Tariffs	26
1960-1961	Geneva (Dillon Round)	Tariffs	26
1964-1967	Geneva (Kennedy Round)	Tariffs and anti-dumping measures	62
1973-1979	Geneva (Tokyo Round)	Tariffs, non-tariffs measures, "framework" agreements	102
1986-1994	Geneva (Uruguay Round)	Tariffs, non-tariffs measures, rules, services, intellectual property, dispute settlement, textiles, agriculture, creation of WTO, etc	123

Sumber: WTO 2006, <http://www.wto.org/>

Enam putaran pertama membahas penurunan tarif. Kemudian pada Putaran Kennedy dibahas Persetujuan Anti Dumping. Putaran ketujuh yang dikenal sebagai Putaran Tokyo merupakan upaya pertama mereformasi sistem perdagangan internasional.¹⁷² Putaran Tokyo mulai membahas hal-hal lain, yaitu hambatan-hambatan bukan tarif, tindakan balasan atas perdagangan tidak adil, dan perlakuan berbeda serta khusus bagi negara-negara berkembang (special and different treatment).

Setelah Putaran Tokyo, dirasakan penting untuk memperluas cakupan sistem perdagangan internasional. Ada tiga hal pokok: (1) daya saing dalam perdagangan internasional tergantung pada penggunaan jasa yang semakin berkembang serta teknologi canggih; (2) ada prospek untuk menjual jasa dan ekspor barang dengan komponen teknologi canggih ke negara sedang berkembang; dan (3) perlunya perluasan kesempatan investasi dari negara maju ke negara sedang berkembang. Perlindungan hak kekayaan (HaKI) juga dianggap penting demi melindungi pengetahuan dan teknologi.

¹⁷¹ <http://www.wto.org/>, diakses pada 23 November 2010 pukul 23.00 WIB.

¹⁷² *Ibid.*

Pada tahun 1986, negara-negara peserta yang disebut sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam GATT memulai putaran perundingan baru untuk memperluas cakupan kesepakatan. Perundingan paling lama yang pernah ada karena berakhir pada April 1994. Putaran tersebut, yang disebut sebagai Putaran Uruguay pada dasarnya membahas empat substansi, yaitu:

- Perluasan akses pasar (market access), antara lain penurunan bea masuk atau tarif, penghapusan hambatan bukan tarif, penataan aturan main dalam perdagangan tekstil dan pakaian jadi, serta pengurangan atau penghapusan distorsi dalam perdagangan hasil pertanian.
- Penyempurnaan aturan GATT, bertujuan memperjelas aturan GATT sehingga tidak mudah disalahgunakan. Diantaranya berkaitan dengan safeguard, yaitu aturan mengenai hak untuk membatasi impor dalam keadaan darurat serta subsidi.
- Penyempurnaan kelembagaan GATT, termasuk diantaranya mekanisme penyelesaian sengketa dan tata cara kerja organisasi multilateral di bidang perdagangan.
- Isu-isu baru (new issues), terdiri dari: (a) perdagangan di bidang jasa (trade in services), (b) hak kekayaan intelektual terkait perdagangan atau *Trade Related Aspects of Property Rights* (TRIPs), (c) penanaman modal yang terkait dengan perdagangan atau *Trade Related Investment Measures* (TRIMs).¹⁷³

Untuk melaksanakan hasil Putaran Uruguay inilah kemudian lahir WTO, yang pada dasarnya adalah perluasan mandat GATT.¹⁷⁴ Lahirnya WTO membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya mengenai jasa (GATS), penanaman modal (TRIMs), dan juga

¹⁷³ Uraian teknis tentang hasil Putaran Uruguay disadur dari <http://www.wto.org/>, diakses pada 16 November 2010 pukul 21.35 WIB

¹⁷⁴ Hira Jhamtani, *Op. Cit.*, hal. 8.

dalam perjanjian mengenai perdagangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs).¹⁷⁵

Pembentukan WTO menggantikan GATT itu sendiri disetujui 125 negara pada pertemuan para menteri di Marrakesh, Maroko pada 15 April 1994, sebagai bagian dari kesepakatan Putaran Uruguay, putaran terakhir perundingan perdagangan bebas multilateral di bawah GATT.

Legitimasi WTO sebagai sebuah organisasi tergantung pada kemauan anggota-anggotanya untuk mematuhi persetujuan-persetujuan yang telah disepakati bersama. Adapun fungsi utama WTO adalah untuk memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antara negara-negara anggota dalam implementasi perjanjian-perjanjian dan dihubungkan dengan instrumen-instrumen hukum, termasuk dalam Annex Perjanjian WTO.

Secara khusus, berdasarkan Pasal III Perjanjian WTO ditegaskan 5 fungsi WTO, antara lain: pertama, adalah memfasilitasi implementasi, administrasi dan pelaksanaan dari Perjanjian WTO serta perjanjian-perjanjian multilateral dan plurilateral lainnya. Fungsi kedua, adalah untuk memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan di antara anggota. Perundingan ini tidak saja menyangkut berbagai masalah/isu yang telah tercakup dalam Perjanjian WTO saja, tetapi juga berbagai masalah/isu yang belum tercakup dalam Perjanjian WTO. Fungsi ketiga, adalah sebagai administrasi sistem penyelesaian sengketa WTO. Keempat, adalah sebagai administrasi dan mekanisme tinjauan atas kebijakan perdagangan (trade policy review mechanism/TPRM). Fungsi kelima, adalah melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi non-permerintah.¹⁷⁶

WTO juga memiliki fungsi pokok menjamin terlaksananya kesepakatan-kesepakatan multilateral sebagai dasar hukum perdagangan internasional. Oleh karena itu, pemerintah negara anggota dan pelaku usaha dituntut untuk memahami dan melaksanakan seluruh aturan main yang ada dalam WTO.

¹⁷⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 97.

¹⁷⁶ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral – Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan – Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Edisi Kedua, 2003, hal. 1.

WTO bertujuan untuk mendorong pertumbuhan arus barang dan jasa antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan perdagangan, tarif dan non-tarif (subsidi, bantuan ekspor, aturan-aturan yang menghambat ekspor negara lain, dll). Selain itu, WTO juga memfasilitasi perundingan antar anggotanya dengan menyediakan forum-forum perundingan yang permanen, membantu penyelesaian sengketa di antara anggota dan mengawasi pelaksanaan aturan-aturannya di masing-masing negara anggota.

Sejak terbentuk di tahun 1994 dan resmi beroperasi di tahun 1995, WTO telah mengadakan beberapa KTM yang dijadwalkan diadakan sekali dalam dua tahun. KTM-KTM tersebut antara lain:

- KTM I Singapura di tahun 1996
- KTM II Jenewa di tahun 1998
- KTM III Seattle di tahun 1999
- KTM IV Doha di tahun 2001
- KTM V Cancun di tahun 2003

II.1.2 Prinsip-Prinsip WTO

Tujuan utama diadakannya perjanjian multilateral di bidang perdagangan yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap negara anggota untuk melakukan perdagangan dengan negara anggota yang lain. Untuk itu WTO memiliki prinsip dasar, yaitu:

- *Most Favoured Nation* (MFN)

Klausula ini menghindarkan diskriminasi dagang terhadap negara ketiga dengan memberikan perlakuan yang setara bagi semua pihak. Ini berarti bahwa negara anggota tidak akan membentuk perjanjian khusus secara bilateral yang akan mendiskriminasikan negara mitra dagang lainnya. Klausula ini dapat mengubah sejumlah perjanjian bilateral yang bersifat diskriminatif menjadi program outward looking dalam rangka mengurangi rintangan dagang. Keringanan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. Meskipun demikian terdapat pengecualian

yang diperbolehkan. Pada bidang jasa, sebuah negara diperbolehkan melakukan diskriminasi dalam batas dan kondisi tertentu.

- National Treatment (NT) atau perlakuan nasional.

Maksudnya, suatu negara anggota harus memperlakukan produk impor setara dengan produk sejenis yang dihasilkan di dalam negeri. Ada tiga unsur dalam hal ini, yaitu: (a) Perlakuan yang sama dalam hal syarat dan peraturan penjualan, distribusi atau penggunaan produk. (b) Peraturan sama dalam pungutan/pajak domestik. (c) Negara tidak boleh memberlakukan persyaratan muatan lokal. Artinya suatu negara tidak boleh mempunyai peraturan yang mengharuskan suatu produk mempunyai bahan kandungan yang berasal dari dalam negeri, dalam jumlah tertentu. Demikian pula investor asing tidak boleh diharuskan menggunakan kandungan lokal dalam kadar tertentu ketika memproduksi suatu barang di negara tuan rumah.

Prinsip National Treatment tercantum dalam tiga persetujuan utama WTO (pasal 3 GATT, pasal 17 GATS, dan pasal 3 TRIPs). Masing-masing persetujuan tersebut mempunyai perbedaan dalam implementasi prinsip dimaksud. Namun demikian, pengenaan bea masuk terhadap barang impor bukan merupakan pelanggaran terhadap perlakuan nasional, bahkan jika produk-produk lokal tidak dikenakan pajak yang setara.

- Transparansi (Transparency)

Ada prinsip lain yang penting, yaitu transparansi. Pada dasarnya, ketentuan transparansi mensyaratkan suatu negara untuk menerbitkan peraturan, hukum, kebijakan, dan praktik di bidang perdagangan agar diketahui oleh para pelaku perdagangan. Tujuannya adalah memastikan bahwa pelaku perdagangan mempunyai informasi yang lengkap tentang peluang dan kendala melakukan bisnis di suatu negara.¹⁷⁷ Untuk mendukung prinsip ini, negara anggota wajib menotifikasi segala kebijakannya yang terkait dengan perdagangan dan dilengkapi dengan mekanisme tinjauan kebijakan perdagangan dari masing-masing anggota

¹⁷⁷ Hira Jhamtani, *Op. Cit.*, hal. 30-31.

WTO secara periodik. Prinsip ini pula yang menjadi kunci bagi prasyarat perdagangan yang pasti (predictable).¹⁷⁸

Selanjutnya, unsur-unsur penting lain dalam peraturan WTO yang sangat menentukan bagi kebijakan perdagangan di negara anggota, adalah sebagai berikut:

- **Bea masuk atau Tarif Impor (Tariff):**

Bea tarif hampir secara universal dikenakan terhadap barang impor. Setiap negara mengukuhkan sistem tarif sebagai sarana untuk memperbaiki defisit neraca pembayaran, untuk melindungi industri yang baru tumbuh, mengimbangi biaya, menarik penanaman modal, memperbaiki perdagangan, meningkatkan penghasilan, mengurangi pengangguran, mengamankan industri ketahanan nasional, balasan terhadap kebijaksanaan dagang diskriminatif negara lain atau berfungsi sebagai alat penawaran untuk memperoleh konsensi dagang. Tarif seperti halnya perangkat pembatas lain cenderung mengurangi standar kehidupan semua negara karena membatasi arus perdagangan serta mengurangi pemilahan kerja internasional dan spesialisasi kerja nasional.

Salah satu tujuan utama peraturan multilateral di bidang perdagangan adalah menjamin akses pasar bagi barang. Pada dasarnya, setiap produk boleh diimpor ke suatu negara tanpa hambatan, kecuali pemberlakuan bea masuk atau tarif impor (tariff). Tarif impor merupakan pajak yang dikenakan oleh negara pengimpor atas suatu barang impor. Suatu negara mengenakan tarif impor karena tiga alasan: pertama, negara mendapatkan pendapatan dari tarif tersebut. Kedua, tarif dapat digunakan untuk melindungi industri lokal dalam negeri, dan terakhir, tarif yang berbeda-beda atas barang digunakan untuk mengalokasikan devisa secara rasional. Sebagai contoh, tarif yang tinggi atas barang-barang mewah diharapkan membatasi impor barang mewah sehingga menghemat devisa.

¹⁷⁸ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal. 116.

Suatu negara anggota harus menyampaikan daftar tarif impornya ke Sekretariat WTO yang berisi nilai ambang batas tarif untuk berbagai produk impor. Nilai tarif haruslah turun seiring dengan waktu dan tidak boleh dinaikkan, kecuali dalam situasi tertentu seperti yang akan dibahas berikutnya:

- *Technical Barriers to Trade* (Hambatan Teknis dalam perdagangan – TBT):

Merupakan kesepakatan untuk mengatasi kendala teknis, birokrasi, dan peraturan yang menghambat perdagangan. Dikenal sebagai *non-tariff barrier* atau hambatan non-tarif. TBT mengatur agar regulasi, standar, teknik pengujian dan prosedur di tingkat domestik tidak menjadi hambatan bagi perdagangan internasional.

- Pembatasan impor akibat keadaan darurat (*Safeguards*):

Merupakan tindakan darurat di bidang perdagangan yang dilakukan suatu negara untuk meringankan beban industri domestiknya apabila menghadapi masalah serius akibat peningkatan impor. Dalam kondisi tertentu, suatu negara boleh mengambil langkah untuk membatasi impor sebagai tindakan pengaman bagi industri dalam negerinya, tetapi tindakan ini bersifat sementara. Ada dua jenis *safeguards*: (1) dengan cara menaikkan tarif impor atas suatu produk dari daftar tarif yang sudah ada; (2) menaikkan tarif untuk impor yang sudah melampaui nilai atau jumlah tertentu.

- Neraca Pembayaran (*Balance of Payments* – BOP):

Negara berkembang diberikan kelonggaran untuk tidak menjalankan kesepakatan tertentu dari WTO apabila mereka menghadapi masalah neraca pembayaran. Sama halnya dengan safeguard, hal ini juga bersifat sementara. Tujuannya untuk meringankan beban negara berkembang dan memberikan kelonggaran apabila mereka menghadapi kekurangan devisa atau mengalami defisit neraca pembayaran luar negeri. Tetapi untuk menggunakan mekanisme ini, suatu negara harus terlebih dahulu memenuhi beberapa tolak ukur, menyampaikan pemberitahuan resmi (notifikasi) ke Sekretariat WTO, berkonsultasi dengan anggota WTO lain, dan seterusnya.

- Subsidi dan *Countervailing measures*

Adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen dan eskportir guna meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional. Subsidi diperlukan di banyak negara berkembang, karena para produsen dan eksportir mereka seringkali belum mempunyai kompetensi dan daya saing setara dengan para pesaingnya dari negara-negara maju.

WTO memperbolehkan dua jenis subsidi, yaitu, pertama, subsidi yang diperbolehkan (*permissible subsidy*), yaitu subsidi umum yang diterapkan pada semua jenis industri secara merata. Kedua, subsidi khusus (*specific subsidy*), misalnya untuk penelitian, pengembangan daerah tertinggal, dan subsidi untuk perlindungan lingkungan. Walaupun diperbolehkan, tetapi ada persyaratan dan batasan yang harus dipatuhi dalam pemberian subsidi tersebut. Pemahaman dan penerapan subsidi masih lemah di negara berkembang. Umumnya pemerintah di banyak negara berkembang takut memberikan subsidi, karena tidak paham dan tidak dipermasalahkan di WTO. Padahal, sepanjang memenuhi tolak ukur dan dapat menunjukkan bahwa kebijakan subsidi tidak merugikan anggota WTO yang lain, maka negara tersebut dapat memberikan subsidi guna meningkatkan daya saing produsen dan eksportirnya.

Negara yang merasa dirugikan atas pemberian subsidi yang bertentangan dengan WTO dapat melakukan *countervailing measures*, yaitu mengenakan pajak atas barang-barang, produk ekspor yang diberikan subsidi oleh negara mitra dagangnya dengan tujuan untuk meniadakan (*set off*) subsidi tersebut. Sebelum melakukan *countervailing measures* tersebut, negara yang dirugikan harus terlebih dahulu memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, seperti dilakukan atas dasar tertulis oleh dan atau atas nama industri dalam negeri yang dirugikan, telah dilakukan investigasi yang dilakukan secara transparan, serta memberikan kesempatan konsultasi kepada negara yang terkena *countervailing measures*.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Lebih jelasnya lihat Pasal VI dan XVI GATT 1994 dan *The Agreement of Subsidies and Countervailing Measures*.

- Dumping dan Anti Dumping

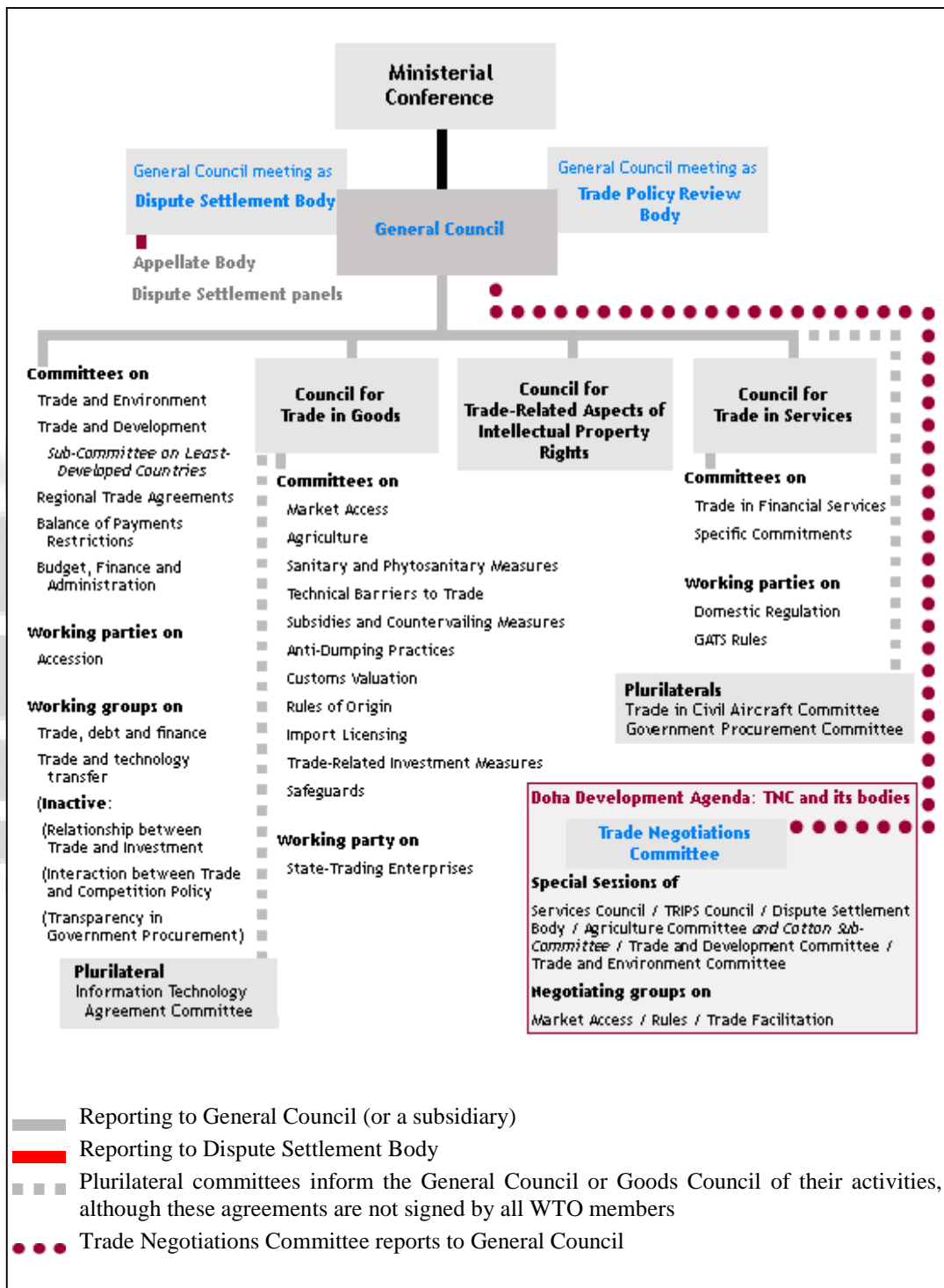
Dumping merupakan tindakan mengekspor produk dengan harga yang sangat rendah guna menguasai pangsa pasar di luar negeri dan menghapuskan persaingan terbuka. Untuk mengatur hal ini, WTO memiliki ketentuan yang disebut anti dumping.

Tindakan anti dumping dapat diambil setelah ada penyelidikan tentang suatu kegiatan dumping. Suatu negara anggota bisa mengajukan tindakan anti dumping jika bisa memberikan bukti: (a) memang terjadi praktik dumping, (b) ada kerugian material atau ancaman kerugian material pada industri domestik (disebut *injury*), dan (c) memang ada kaitan antara praktik dumping tersebut dengan *injury* yang diakibatkannya. Tentu saja proses ini sangat panjang dan berbelit, selain juga menguras biaya. Negara yang merasa dirugikan oleh kegiatan dumping bisa meminta Badan Penyelesaian Sengketa (BPS) membentuk panel atau menentukan pemecahan masalahnya. Peran panel ini hanya menentukan apakah pemerintah negara pengimpor (yang terkena dumping) sudah menyampaikan fakta secara benar dan obyektif. Langkah penyelesaian selanjutnya ditempuh oleh negara yang merugi dan dirugikan. Walaupun dumping dilakukan oleh perusahaan, tetapi tindakan anti dumping dikenakan kepada pemerintah negara anggota WTO asal pelaku dumping. Karena itu, perusahaan yang terkena *injury* harus berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan anti dumping. Dalam hal ini, negara harus mempersiapkan peraturan, perangkat kelembagaan dan tata cara administratif anti dumping bila tidak ingin dirugikan oleh praktik dagang curang ini.

II.1.3 Struktur dan Kewenangan WTO

Sebagai suatu organisasi permanen, peranan WTO akan lebih kuat daripada GATT selama ini. Hal ini tercermin dari struktur organisasi yang melibatkan negara anggotanya sampai pada tingkat menteri. Untuk menjalankan fungsinya, WTO mempunyai struktur organisasi dan mekanisme pengambilan

keputusan tertentu. Struktur organisasi WTO (pasca KTM Doha) adalah sebagai berikut:



Sumber: WTO 2006 <http://www.wto.org/>

Fungsi-fungsi struktural di WTO:

- **Ministrial Conference (Konferensi Tingkat Menteri – KTM):**
Merupakan badan tertinggi WTO yang bertemu paling sedikit sekali setiap dua tahun. KTM terdiri dari wakil semua negara anggota dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan fungsi WTO serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.¹⁸⁰ Semua keputusan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan multilateral dilakukan melalui badan ini.¹⁸¹
- **General Council (Dewan Umum – DU):**
Menjalankan fungsi KTM pada masa KTM tidak berfungsi. Dengan kata lain Dewan Umum menjalankan mandat KTM dengan mengadakan pertemuan secara rutin. DU terdiri dari wakil semua negara anggota.
- **Dispute Settlement Body (Badan Penyelesaian Sengketa – BPS):**
Badan yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa di antara anggota WTO. Dewan Umum mempunyai kewenangan untuk mengadakan sidang dan menjalankan fungsi BPS. Tetapi, dalam praktiknya, BPS beroperasi sebagai badan terpisah yang mempunyai ketua sendiri, walaupun terdiri dari wakil semua negara anggota. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa ini, negara-negara berkembang dapat terbantu ketika menghadapi sengketa dengan negara maju. Ada empat cara bagaimana WTO dengan mekanisme ini dapat membantu negara berkembang:
 1. WTO memiliki kekuatan untuk memaksa negara maju bernegosiasi dengan negara berkembang dan membicarakan permasalahan mereka. Berdasarkan pengamatan kami, seringkali negara maju susah jika diminta turun ke meja perundingan dan bernegosiasi dengan negara berkembang.
 2. Menggunakan hukum perdagangan internasional sebagai standar untuk mencapai kesepakatan.
 3. Adanya peraturan atau hukum bersama, sehingga memberikan kesempatan pada negara anggota untuk membentuk aliansi dengan negara lain yang memiliki kepentingan yang sama. Suatu masalah bilateral dapat menjadi masalah multilateral jika ternyata negara-negara anggota lain

¹⁸⁰ Hira Jhamtani, *Op. Cit.*, hal. 36.

¹⁸¹ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal. 36.

memiliki masalah yang sama. Konsep coalition building, pada kenyataannya memberikan manfaat yang besar (khususnya) bagi negara berkembang.

4. Adanya pertimbangan mengenai kepentingan ekonomi jangka panjang semakin mendorong kepatuhan dari negara-negara anggota. Karena jika misalnya mereka melanggar aturan, bisa saja mereka dikenai sanksi ekonomi dan ditakutkan sanksi tersebut akan berdampak pada perekonomian negara mereka.

Dalam sistem penyelesaian sengketa di WTO, mekanisme yang menggerakkan mekanisme penyelesaian sengketa adalah terjadinya dampak yang dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU) disebutkan:

- a) Terjadinya *nullification and impairment*, atau
- b) *Any objective of the agreement is being impeded*

Berdasarkan DSU, terjadinya *nullification and impairment*, ataupun *any objective of the agreement is being impeded* dapat disebabkan karena satu hal dari berikut ini: pertama, pelanggaran ketentuan WTO, kedua, tindakan yang merugikan pihak lain walaupun tidak melanggar aturan WTO, ketiga, *the existence of any other situation*. Pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan yang diambil oleh pihak lain dapat mengajukan *complaint* kepada WTO, yang dibedakan menjadi: (a) *Violation Complaint*, yaitu tuntutan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap anggota lain akibat pelanggaran aturan WTO yang menimbulkan kerugian terhadap pihak yang mengajukan *complaint* yang secara sadar atau tidak telah dilakukan oleh pihak yang melanggar. (b) *Non-Violation Complaint* merupakan pengaduan yang dapat diajukan apabila terjadi suatu kerugian yang dihadapi pihak lain akibat tindakan yang diambil oleh suatu pihak dalam perjanjian walaupun tindakan tersebut tidak melanggar aturan WTO. Sengketa timbul akibat tindakan yang tidak melanggar aturan tetapi merugikan pihak lain karena keuntungan yang telah diraih dari perjanjian ditiadakan akibat tindakan yang diambil dari salah satu anggota. (c) *Situation Complaint*, bahwa anggota dapat mengajukan *complaint* apabila

suatu situasi yang tidak tercakup dalam kategori *violation complaint* maupun dalam kategori *non-violation complaint* tetapi menimbulkan *nullification* atau *impairment* dari keuntungan yang telah diperoleh melalui negosiasi.

Meskipun demikian, WTO tidak dapat menjamin semua negara akan mendapatkan hasil yang memuaskan, setidaknya sengketa mereka akan mendapatkan penanganan yang adil dan jelas.

- *Council* (Dewan) lain:
Ada tiga dewan: Dewan Perdagangan Barang (*Council on Trade in Goods*), Dewan Perdagangan Jasa (*Council on Service in Goods*), dan Dewan untuk TRIPs (*Council for TRIPs*). Dewan-dewan ini berfungsi mengawasi operasionalisasi bidangnya masing-masing di bawah arahan Dewan Umum. Keanggotaannya bersifat terbuka bagi semua negara anggota WTO.
- *Committee* (Komisi):
Ada tiga Komisi, yaitu Komisi Perdagangan dan Pembangunan (*Committee on Trade and Development – CTD*), Komisi Neraca Pembayaran (*Committee on Balance of Payment – CBP*), dan Komisi Anggaran, Keuangan, dan Tatalaksana (*Committee on Budget, Finance and Administration – CBFA*). Dua komisi pertama bertanggung jawab mengkaji ulang isi dan operasionalisasi kesepakatan masing-masing. Komisi Anggaran membuat perkiraan anggaran dan laporan keuangan yang disampaikan Sekretariat WTO.
- Sekretariat WTO:
Dipimpin seorang Direktur Jenderal, dipilih oleh KTM. Direktur Jenderal mengangkat staf sekretariat dan menjalankan fungsi administratif serta fasilitasi WTO.

Pengambilan keputusan umumnya dan seharusnya dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Tetapi ada pengertian khusus mengenai hal ini, bahwa keputusan dianggap sah melalui musyawarah mufakat apabila tidak ada negara anggota yang menyatakan keberatan secara resmi dalam sidang saat keputusan

diambil. Artinya, suatu negara yang tidak terwakili dalam salah satu sidang dan negara itu tidak menyatakan keberatan atas keputusan yang diambil, walaupun merugikan baginya, maka keputusan yang dihasilkan tetap dianggap sah. Jika tidak tercapai kemufakatan, keputusan diambil melalui pemungutan suara, sesuatu yang belum pernah terjadi selama ini. Ada anggapan bahwa pemungutan suara hanya dilakukan di tingkat KTM dan Dewan Umum. Tiap negara anggota mempunyai satu suara.¹⁸²

II.1.4 Persetujuan-Persetujuan WTO

Persetujuan-persetujuan dalam WTO memiliki struktur dasar seperti pada tabel 3.4 sebagai berikut.¹⁸³

Tabel 3.9
Struktur Dasar Persetujuan WTO

	Barang	Jasa	Kepemilikan Intelektual	Sengketa
Prinsip Dasar	GATT	GATS	TRIPs	Penyelesaian Sengketa
Tambahan Secara Rinci	Persetujuan Mengenai Barang dan Annex	Annex Bidang jasa		
Komitmen Akses Pasar	Jadwal komitmen negara anggota	Jadwal komitmen negara anggota (pengecualian terhadap MFN)		

Persetujuan-persetujuan di atas dan annex-nya berhubungan antara lain dengan sektor-sektor:

Untuk barang (dalam GATT):

- Pertanian

¹⁸² Hira Jhamtani, *Op. Cit.*, hal. 37-38.

¹⁸³ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral – Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan – Departemen Luar Negeri, *Op. Cit.*, hal. 20.

- Sanitary and phytosanitary
- Badan Pemantau Tekstil (*textile and clothing*)
- Standar Produk
- Tindakan investasi yang terkait perdagangan (TRIMs)
- Tindakan anti-dumping
- Penilaian pabean (*customs valuation methods*)
- Pemeriksaan sebelum pengapalan (*preshipment inspection*)
- Ketentuan asal barang (*rules of origin*)
- Lisensi impor (*imports licensing*)
- Subsidi dan tindakan imbalan (*subsidies and countervailing measures*)
- Tindakan pengamanan (*safeguards*)

Untuk jasa (dalam annex GATS):

- Pergerakan tenaga kerja
- Transportasi udara
- Jasa keuangan
- Perkapalan
- Telekomunikasi

II.1.5 Keanggotaan di WTO

Persyaratan keanggotaan di WTO diatur dalam Perjanjian Marakesh dalam Pasal XII ayat 1 yang menjadi dasar pendirian WTO, yaitu:¹⁸⁴

“Any state or separate customs territory possessing full autonomy in the conduct of its external commercial relations and of the other matters provided for in this Agreement and the Multilateral Trade Agreement may accede to the WTO on term to be agreed between such state or separate customs territory and the members of the WTO”.

¹⁸⁴ World Trade Organization, *How to Become a Member of WTO*, http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acces_e.htm, diakses pada 01 November 2010 pukul 13.33 WIB.

Dari pernyataan di atas, terdapat dua hal penting mengenai keanggotaan WTO, yakni:

- Keanggotaan WTO tidak mensyaratkan status kenegaraan, sebagian dari wilayah kedaulatan suatu negara dapat memiliki keanggotaan WTO yang terpisah dari negaranya sepanjang daerah tersebut memiliki otoritas penuh untuk menjalankan perdagangan luar negeri dan untuk menjalankan hal-hal lain yang telah diatur dalam perjanjian WTO dan perjanjian perdagangan multilateral lainnya.
- Penerimaan suatu anggota baru mendapat persetujuan (*on terms to be agreed*) dari seluruh anggota WTO yang ada. Tujuan ketentuan ini adalah untuk menjamin bahwa tidak ada anggota baru yang akan merusak penerapan kesepakatan yang telah ada dalam WTO dan /atau merugikan salah satu anggota WTO lainnya. Dengan demikian, setiap calon anggota akan dinilai kebijakan perdagangannya. Apabila dinilai ada kebijakan yang bertentangan dengan kesepakatan WTO, maka calon anggota ini dituntut untuk menyesuaikannya dengan kesepakatan WTO agar dapat diterima menjadi anggota organisasi tersebut.

II.2 Politis

Negara-negara maju (AS, Uni Erop dan Jepang) juga menginginkan agar Cina ikut masuk dalam ekonomi internasional. Populasi Cina yang besar diharapkan dapat meningkatkan ekspor mereka ke Cina di samping barang-barang murah yang akan diperoleh dari ekspor Cina. Para investor asing juga mengincar kemungkinan memproduksi produk-produk yang low-cost di dalam Cina yang dapat dieskpor dan dibuang ke pasar domestik. Sehingga menurut Michaela Eaglin, AS dan Uni Eropa mendesak Cina untuk melakukan tiga persyaratan agar dapat diterima menjadi anggota WTO, yaitu:¹⁸⁵

¹⁸⁵ Michaela Eaglin, China's Entry into the WTO with a Little Help from the UE, *International Affairs*, 1997, Vol. 73 No. 3, 1997.

1. Cina hendaknya menerapkan satu kebijakan perdagangan yang seragam di seluruh wilayah negaranya. AS dan Uni Eropa mempermasalahkan adanya berbagai sistem perdagangan di Cina yang berbeda-beda dan berlaku pada wilayah-wilayah tertentu seperti Special Economic Zone, Open Cities, Bonded Area. Namun mengingat luasnya wilayah teritorial Cina dan tujuan perekonomian domestik, tuntutan ini sulit diterima Cina.
2. Cina tidak boleh menerapkan tindakan darurat (*special safeguard*) terhadap barang-barang impor yang masuk ke Cina. Sebaliknya AS dan Uni Eropa berhak untuk menerapkan *safeguard* untuk menghindari rusaknya pasar di dalam negeri mereka atas kemungkinan masuknya produk Cina dalam jumlah besar secara dumping.
3. Cina harus segera menghapus hambatan non-tarif yang masih berlaku.

Dalam negosiasi penerimaan Cina sebagai anggota WTO, AS berpendapat bahwa Cina harus diperlakukan sebagai negara maju, dan dengan demikian harus segera menurunkan tarifnya (negara berkembang diberi jangka waktu yang lebih panjang untuk menurunkan tarifnya setelah diterima sebagai anggota WTO). Secara sepihak AS menyatakan Cina sebagai negara yang tak kalah majunya.¹⁸⁶

AS dan UE juga menuntut bahwa Cina harus membuat mata uangnya konvertibel. Hal ini dikarenakan mata uang Cina yaitu Renminbi memiliki tiga macam nilai tukar, yaitu yang resmi, swap, dan pasar gelap. Tuntutan ini bertujuan untuk mengurangi defisit perdagangan AS dan UE terhadap Cina.¹⁸⁷

Bahkan sebelumnya, pada tahun 1999, ketika masih pada tahap negosiasi akses Cina ke WTO berkembang, PM Cina Zhu Rong Zhi datang ke AS untuk memastikan kesepakatan ini, Departemen Keuangan AS bersikeras agar Cina segera membuka pasar finansialnya, dan mengizinkan bank-bank AS menjual derivatifnya dan membiarkan modal spekulatif jangka pendek mengalir masuk.¹⁸⁸

¹⁸⁶ Joseph E. Stiglitz, *The Roaring Nineties: A New History of the World's Most Prosperous Decade*, WW Norton Comp. Inc., New York, 2003, hal. 226.

¹⁸⁷ Umar Suryadi Bakry, *Op. Cit.*, hal. 166.

¹⁸⁸ Joseph E. Stiglitz, *Op. Cit.*

Selain itu juga ada motif politik. Negara maju-negara maju berharap bahwa dengan mengintegrasikan Cina ke dalam rezim perdagangan formal dan rezim investasi, Cina akan duduk pada landasan yang sama sehingga aneka pertikaian dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Kecuali itu juga, Cina juga akan didorong untuk menjalankan sistem undang-undang ekonomi yang lebih transparan. AS secara khusus berharap bahwa integrasi Cina ke dalam ekonomi dunia akan membawa perubahan dalam sistem politik mereka.¹⁸⁹ Hal ini senada Noreena Hertz dalam *The Silent Take-over: Global Capitalism and the Death of Democracy*, yang secara tajam membahas agar komunitas dunia tidak mencampuradukkan demokrasi dengan kapitalisme. Dalam kasus Cina, sudah sejak Bill Clinton, AS secara implisit maupun eksplisit mengungkapkan bahwa meluasnya kapitalisme (pasar bebas) adalah lebih penting daripada demokrasi. Salah satu misi diplomasi AS adalah mengekspor nilai-nilai barat, termasuk demokrasi sejauh melayani kepentingan AS. Hampir semua negara barat memiliki tendensi demikian.¹⁹⁰ Sehingga tidak heran bahwa dalam sidang dengar pendapat di hadapan Kongres, Menlu Warren Christopher dengan jelas menyatakan bahwa AS berkepentingan untuk mendorong Cina menjadi negara demokrasi yang salah satunya dapat ditempuh dengan cara masuk menjadi keanggotaan WTO.

3.3 Kebijakan Cina Pasca Akses WTO

3.3.1 Komitmen Cina di WTO

Diawali dengan usaha menjadi anggota GATT sejak 1986, akhirnya Cina diterima menjadi anggota WTO pada tanggal 11 Desember 2001.¹⁹¹ Cina menjadi anggota ke-143 di dalam organisasi tersebut,¹⁹² berdasarkan keputusan KTM di Doha, Qatar pada 10 November 2001 dengan 35 negara anggota WTO.

¹⁸⁹ I. Wibowo, *Op. Cit.*, hal. 64.

¹⁹⁰ Noreena Hertz, *The Silent Take-over: Global Capitalism and the Death of Democracy*, http://www.thirdworldtraveler.com/Global_Economy/Silent_Takeover.html, diakses pada 23 April 2011 pukul 09.20 WIB.

¹⁹¹ Kent Hughes, *China and the WTO – Domestic Challenges and International Pressures*, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C, 2002, <http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/WTOOrpt.pdf>, hal. 1, diakses pada 10 November 2010 pukul 12.21 WIB.

¹⁹² Sharon K. Hom, *China and the WTO: Year One*, China Rights Forum, No. 1, 2003, <http://www.hrichina.org/sites/default/files/oldsite/PDFs/CRF.1.2003/SharonHom1.2003.pdf>, hal. 1, diakses pada 12 April 2011 pukul 22.19 WIB.

Sesuai China's Accession Protocol, disepakati bahwa Cina akan menerapkan prinsip-prinsip di dalam WTO seperti MFN, national treatment, transparansi. Hal yang sama juga akan diterapkan dalam hal tarif yang meliputi anti-dumping, *safeguards*, subsidies, dan *countervailing measures*.¹⁹³ Dengan kata lain akses Cina di WTO erat kaitannya dengan prinsip-prinsip mendasar WTO, antara lain:

1. *Non-discrimination*

Berdasarkan *Protocol of Accession*, Cina has committed untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota WTO. Yang pertama adalah non-diskriminasi yang berdasarkan prinsip MFN dan national treatment, bahwa semua negara partner dagang akan mendapatkan equal treatment baik di bidang barang dan jasa. Selain terhadap negara partner dagang, equal treatment juga diberlakukan di pasar domestik Cina yaitu terhadap barang dan jasa yang merupakan produk asing maupun nasional. Selain itu juga, Cina has agreed to undertake additional commitments to ensure the smooth phasing in of these nondiscrimination principles. Of particular note are commitments to eliminate dual pricing practices and to phase out within three years most of the restrictions on importing, exporting, and trading currently faced by foreign enterprises. Semua perusahaan asing baik yang tidak terdaftar di Cina akan mendapat perlakuan *no less favourable* dengan perusahaan yang terdaftar di Cina.

2. *Market opening*

Keterbukaan pasar memiliki tujuan berhasilnya konferensi-konferensi yang diadakan WTO melalui penurunan hambatan tarif. Ditekankan bagi anggota baru untuk meliberalisasi rezim perdagangan mereka selama masa negosiasi aksesinya. Cina secara signifikan telah menurunkan tarifnya selama masa/proses penerimaannya. Juga adanya keinginan Cina untuk membuka pasar domestiknya di bidang jasa bagi para pengusaha asing. Lebih jauh lagi, Cina menunjukkan its intention to play a significant role pada Doha Development Agenda.

3. *Transparency and predictability*

¹⁹³ Laurence J. Brahms, *China After WTO*, China Intercontinental Press, China, 2002, hal. 5-13.

Aksesi Protokol Cina meminta Cina untuk menerbitkan peraturan, hukum, kebijakan, dan praktik di bidang perdagangan agar diketahui oleh para pelaku perdagangan.¹⁹⁴ Tujuannya adalah memastikan bahwa pelaku perdagangan mempunyai informasi yang lengkap tentang peluang dan kendala melakukan bisnis di suatu negara.¹⁹⁵ Untuk mendukung prinsip ini, negara anggota wajib menotifikasi segala kebijakannya yang terkait dengan perdagangan dan dilengkapi dengan mekanisme tinjauan kebijakan perdagangan dari masing-masing anggota WTO secara periodik. Prinsip ini pula yang menjadi kunci bagi prasyarat perdagangan yang pasti (predictable).¹⁹⁶ Cina sepakat untuk memenuhi persyaratan tersebut meski bukan hal yang mudah mengingat sejarah, latar belakang dan sistem politik negara ini yang tidak transparan. Tantangan terbesar ada pada pemerintahan.¹⁹⁷ Dalam sepuluh tahun pasca aksesinya, akan dilakukan China's special transitional review mechanism. Dengan kondisi seperti ini, Cina telah menurunkan tarif impor barang. Cina juga committed to the phase reduction and removal tariff barriers, mostly by 2004, but no later than 2010.

4. *Undistorted trade*

WTO juga mempromosikan perdagangan *undistorted* melalui penerapan subsidi dan dumping serta memperbolehkan anggotanya untuk melakukan *countervailing* dan anti-dumping sepanjang terjadi *unfair trade*. Cina sepakat untuk tidak mengenakan subsidi ekspor baik di sektor barang industri maupun pertanian dan menerima special provisions dari beberapa negara anggota dalam hal determinasi dari dumping atau subsidi, sebagaimana halnya dalam *special product-specific safeguards mechanism and a separate textile safeguards*.

5. *Preferential treatment for developing countries*

¹⁹⁴ Deepak Bhattachali, Shantong Li, Will Martin, *China and the WTO*, World Bank and Oxford University Press, Washington, 2004, hal. 25.

¹⁹⁵ Hira Jhamtani, *Op. Cit.*, hal. 30-31.

¹⁹⁶ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal. 116.

¹⁹⁷ Laurence J. Brahms, *Op. Cit.*, hal. 6-7.

Meski prinsip ini tidak diberlakukan untuk Cina, namun Cina memperoleh *specific transitional arrangements* untuk beberapa hal di dalam rezim perdagangannya.¹⁹⁸

Atau dengan kata lain, Cina harus menjalankan komitmen di WTO seperti pada kotak berikut ini:¹⁹⁹

Summary of China's WTO Commitments	
<p>The main commitments are to open up for foreign entry, which is currently prohibited. The opening up is undertaken in phases for geographic area and percentage of foreign ownership, and agreement to give national treatment to foreign firms. China also has to abide with the WTO's April 1996 reference paper on basic telecommunications.</p> <p>Value-added services (electronic mail, voicemail, online information and database retrieval, electronic data interchange, enhanced facsimile services, code and protocol conversion, online information and data); paging services: no limitations on cross-border supply except for right of establishment, no limitations on consumption abroad, and no limitations on national treatment.</p> <p>On right of establishment, upon accession joint ventures with up to 30 percent foreign ownership will be allowed to provide services in Beijing, Guangzhou, and Shanghai. Within one year, this arrangement will be expanded to Chengdu, Chongqing, Dalian, Fuzhou, Hangzhou, Nanjing, Ningbo, Qingdao, Shenyang, Shenzhen, Xiamen, Xian, Taiyuan, and Wuhan. The amount of foreign investment is not to exceed 49 percent. Within two years, there will be no geographic restriction, and foreign ownership can be up to 50 percent.</p> <p>Mobile voice and data services (analog/digital/cellular services, personal communications services): no limitation on cross-border supply except under right of establishment, no limitations on consumption abroad, and no limitation on national treatment.</p>	<p>On right of establishment, upon accession joint ventures will be allowed in Beijing, Guangzhou, and Shanghai, with foreign ownership of up to 25 percent. Within one year, areas will be expanded to include services in Chengdu, Chongqing, Dalian, Fuzhou, Hangzhou, Nanjing, Ningbo, Qingdao, Shenyang, Shenzhen, Xiamen, Xian, Taiyuan, and Wuhan, with foreign investment allowed up to 35 percent. Within three years of accession, foreign investment will be no more than 49 percent, and within five years the geographic restriction will be removed.</p> <p>Domestic and international services (voice, packet-switched, circuit-switched, facsimile, domestic private leased circuit services, international closed user group voice and data services): no limitation on cross-border supply except under right of establishment, no limitations on consumption abroad, and no limitation on national treatment. On right of establishment, upon accession joint ventures will be allowed in Beijing, Guangzhou, and Shanghai, with foreign ownership of up to 25 percent. Within five years, areas will be expanded to include services in Chengdu, Chongqing, Dalian, Fuzhou, Hangzhou, Nanjing, Ningbo, Qingdao, Shenyang, Shenzhen, Xiamen, Xian, Taiyuan, and Wuhan, with foreign investment allowed up to 35 percent. Within six years of accession, foreign investment will be no more than 49 percent, and the geographic restriction will be removed.</p>

Secara umum, komitmen Cina di WTO adalah pertama, *lowering the tariffs for imports*, kedua, *the permission of foreign firms to sell directly in the Chinese domestic market*, terakhir, *the opening up of the telecommunication and finance sectors to more foreign competition*.²⁰⁰ Secara mendetil, Cina telah membuat komitmen akses pasar yang substansial mencakup sektor-sektor

¹⁹⁸ Deepak Bhattasali, Shantong Li, Will Martin, *Op. Cit.*, hal. 26.

¹⁹⁹ *Ibid.*, hal. 166.

²⁰⁰ Gregory C. Chow, *Op. Cit.*, hal. 6.

pertanian, industri, dan jasa sebagai berikut. Pertama, penghapusan hambatan non-tarif terhadap impor, persyaratan perijinan impor, dan semua kuota dihapus dalam 5 tahun. Kedua, penurunan tarif menjadi 11 persen pada tahun 2003, dan akan terus diturunkan menjadi 8,9 persen pada tahun 2005, sedangkan tarif produk pertanian menjadi 15 persen pada tahun 2004. Pajak impor pada sebagian produk informasi teknologi juga akan dihapuskan. Ketiga, kesepakatan WTO pada *Trade Investment Measures* (TRIMs) akan diterapkan dan persyaratan seperti kandungan lokal, kinerja ekspor akan diperlonggar atau dihapus. Keempat, Cina menyetujui untuk memperhatikan hak dagang kepada perusahaan-perusahaan asing yang akan diberlakukan dalam tiga tahun. Hambatan/pembatasan kuantitatif dan geografis dalam bisnis retail akan dihilangkan. Kelima, Cina menyetujui untuk mengurangi pembatasan investasi asing langsung dalam berbagai industri jasa penting, termasuk jasa distribusi, telekomunikasi, dan keuangan. Untuk jasa pertambahan nilai dalam telekomunikasi, mitra asing akan dapat memiliki saham hingga mencapai 50 persen tanpa batasan geografis dalam jangka waktu 2 tahun setelah akses. Bank-bank asing diperbolehkan untuk menggunakan mata uang lokal dalam menjalankan usahanya dengan perusahaan-perusahaan Cina. Keenam, pada tahun 2003, Cina telah menurunkan tarif rata-rata produk pertanian menjadi 16,8 persen, jauh di bawah tarif rata-rata produk pertanian dunia sebesar 62 persen. Ketujuh, kebijakan-kebijakan non-tarif pada produk pertanian juga telah dihapuskan. Kedelapan, pemerintah Cina juga memperbolehkan bank-bank asing beroperasi di Cina untuk memberikan pelayanan jasa dalam mata uang Renminbi terhadap perusahaan-perusahaan lokal. Kesembilan, pemerintah Cina juga telah melakukan amandemen, perubahan terhadap 14 set hukum, 37 set peraturan administratif, 1000 lebih peraturan departemental yang berhubungan dengan perdagangan jasa. Terakhir, pemerintah Cina juga sudah melakukan perubahan terhadap peraturan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual guna memenuhi persyaratan perjanjian *Trade Intellectual Property Rights* (TRIPs).²⁰¹

Langkah konkrit Cina dalam mewujudkan komitmennya di dalam WTO antara lain seperti: adanya pemangkasan tarif di bidang pertanian sampai 15 persen dan 8,8 persen untuk produk industri. Tarif baru akan berlaku pada tahun

²⁰¹ Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, *Laporan KBRI Beijing Tahun 2003* (Buku II Operasional), Beijing, 2004, hal. 82.

2004. Untuk beberapa produk yang dianggap penting seperti perangkat semikonduktor dan telekomunikasi, komputer dan produk informasi lainnya, tarif mencapai nol persen di tahun 2003. Kedua, penghapusan semua kuota, lisensi, kewajiban tender, dan hambatan non tarif lainnya pada impor paling lambat tahun 2005. Ketiga, Cina juga setuju untuk mengubah import registration system sehingga konsisten dengan *WTO Agreement on Import Licensing*. Keempat, di samping barang, Cina juga setuju untuk membuka pasar jasanya, termasuk telekomunikasi, bank, asuransi, *securities*, audiovisual dan jasa profesional lainnya. Lebih penting lagi Cina juga memberikan hak berdagang dan hak distribusi bagi perusahaan asing. Kelima, pengurangan restriksi di bidang perbankan yang dilakukan secara bertahap hingga di tahun 2005 tidak ada pembatasan jumlah atas bank asing yang diberi lisensi. Bank Sentral Cina harus memberi lisensi kepada semua pelamar yang memenuhi kriteria. Lima tahun setelah masuk WTO, bank asing juga akan menikmati national treatment. Bank asing diperbolehkan memakai uang lokal.²⁰²

3.3.2 Implementasi Parsial Komitmen Cina di WTO

Di satu sisi, Cina sangat serius memenuhi komitmennya di WTO, yang ditandai dengan penurunan tarif impor, mengeliminir *tariffs on goods covered by the Information Technology Agreement (ITA)*, *phasing out import quotas, licenses and other border NTBs; and expanding trading rights*. Pembaharuan ketentuan-ketentuan perdagangan juga dilakukan dan diberlakukan mulai April 2004, yang akan menjamin usaha-usaha domestik dan asing maupun yang bersifat individual ketika sudah terdaftar di negara tersebut. Reformasi hukum terkait dengan perlindungan *Intellectual Property Rights (IPR)*.

Namun di sisi lain, implementasi komitmen yang dilakukan Cina bersifat parsial, tidak secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari meningkatnya *complain* yang diajukan negara-negara anggota WTO khususnya AS. Mengutip dari Lembaga Estimasi Perwakilan Perdagangan AS (US Trade Representative's National Estimate/USTR) yang mengatakan bahwa:

In 2007, US industry began to focus less on the implementation of specific commitments that China made upon entering the WTO and more on China's shortcomings in observing

²⁰² I. Wibowo, *Op. Cit.*, hal. 66-68.

basic obligations of WTO membership, as well as on Chinese policies and practices that undermine previously implemented commitments. At the root of many of these problems is China's continued pursuit of problematic industrial policies that rely on excessive government intervention in the market through an array of trade-distorting measures.

Selain itu, terjadi juga ketidaksamaan WTO Customs Valuation agreement by customs officials at Chinese ports. *Application of technical regulations, conformity-assessment procedures and sanitary and phytosanitary (SPS) measures* bersifat sewenang-wenang dan inkonsisten, tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh WTO. *WTO notification of Chinese government subsidies was overdue and remains incomplete*. Reformasi hukum untuk IPR bersifat lemah terutama pada *protection of a range of goods and services*. Juga adanya *substantial infringements of the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMS)*.

Cina juga dianggap belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi. Menteri serta agen pemerintahan yang terkait tidak mensosialisasikan untuk mendapatkan feedback yang salah satunya berasal dari usaha asing sebelum diberlakukan. Pada akhirnya, USTR mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan asing merasa skeptis tentang *adjudication of trade-related commercial disputes in designated Chinese forums, such as the China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)*.²⁰³

Seperti yang diberitakan majalah Far Eastern Economic Review (2 Oktober 2003), Cina tidak patuh sepenuhnya kepada WTO berdasarkan sebuah laporan yang dikeluarkan oleh US Chamber of Commerce. Ada lima hal pokok yang belum dipatuhi oleh Cina yaitu: (1) pembajakan hak kekayaan intelektual, (2) tidak adanya distribusi bebas barang-barang impor, (3) non-tariff barrier pada pertanian, (4) tidak ada transparansi dalam pembuatan peraturan, (5) tingginya syarat kapitalisasi bagi bank asing maupun perusahaan asuransi serta penyedia pelayanan telkom. AS paling lantang mengkritik Cina.²⁰⁴ Begitu pula halnya dalam majalah The Economist pada edisi 15-21 Agustus 2009, WTO untuk kesekian kalinya menegur Cina dalam kelambatannya mengatasi masalah

²⁰³ Fredrik Erixon, Patrick Messerlin and Razeen Sally, *China's Trade Policy Post-WTO Accession: Focus on China-EU Relations*, <http://www.ecipe.org/people/fredrik-erixon/speeches-and-presentations/CHINAS%20TRADE%20POLICY%20POST-WTO%20ACCESSION.pdf>, hal. 5-6, diakses pada 19 Mei 2011 pukul 23.45 WIB.

²⁰⁴ "The One-Two Punch", *Far Eastern Economic Review* (2 Oktober 2003), hal. 26-28.

pembajakan film-film Hollywood. Hal yang sama juga terjadi dengan pembatasan impor film yang diterapkan demi propaganda Partai Komunis sebagai penguasa tunggal di Cina.²⁰⁵

Menurut Peter Navarro, keajaiban ekonomi Cina berasal dari kemampuan bangsa ini menetapkan sesuatu yang sering di sebut harga Cina yang merujuk pada kenyataan bahwa produsen barang Cina dapat secara besar-besaran mengalahkan harga yang ditawarkan oleh para pesaing luar negeri untuk jenis produk, dan jasa yang sangat beragam. Penggerak ekonomi harga Cina antara lain adalah: (a) Peran penanaman modal asing yang memberikan kekuatan dan dorongan, (b) Sistem yang rumit dan didukung pemerintah terhadap pemalsuan dan pembajakan, (c) Mata uang yang “memiskinkan tetangga anda” dan nilainya terus diturunkan, (d) Subsidi pemerintah secara besar-besaran terhadap sekian banyak industri yang ditentukan. Penggerak harga Cina tersebut masing-masing melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh WTO.²⁰⁶

Cina juga disebut sebagai pusat perkembangan pesat pemalsuan yang tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini merupakan suatu alat kebijakan de facto yang sangat penting dan memungkinkan segenap lapisan pemerintah Cina mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, memperluas basis pajaknya yang pada akhirnya dapat meningkatkan standar hidup bangsa Cina.²⁰⁷

Menurut Komisi Pengkajian Ekonomi dan Keamanan AS-Cina, mata uang Cina yang nilainya rendah mendorong ekspor Cina yang berharga rendah ke dolar AS dan menghadang ekspor AS karena ekspor AS mempunyai harga yang terlalu tinggi dengan sendirinya. Akibatnya, ekspor Cina yang bernilai rendah itu sangat mengganggu AS, dan juga negara-negara lain, sebagaimana dibuktikan oleh statistik-statistik perbaikan perdagangan. Cina menganut sistem nilai tukar tetap dimana negara tersebut mematok nilai mata uangnya, Renminbi terhadap nilai dolar AS. Akibatnya, ketika impor Cina mengalir ke AS terjadilah penurunan nilai Renminbi secara besar-besaran terhadap dolar. Perkiraan yang paling terpercaya menyebutkan besaran penurunan nilai mata uang ini berkisar mulai dari 15 persen

²⁰⁵ “Let Me Entertain You”, *The Economist* (15 Agustus 2009), hal. 23.

²⁰⁶ Peter Navarro, *The Coming China Wars*, FT Press, New Jersey, 2007, hal. 1-2.

²⁰⁷ *Ibid.*, hal 28.

hingga 40 persen. Pematokan tetap ini memberikan Cina keuntungan besar terhadap Eropa dan AS pada saat memasuki pasar negara-negara tersebut.²⁰⁸

Di bawah kendali negara, banyak produsen barang milik negara di Cina dijalankan dengan keuntungan subsidi yang dibiayai oleh negara, termasuk penyewaan, listrik dan air, bahan mentah, transportasi dan jasa telekomunikasi. Bukan seperti itu cara kita mendefinisikan suatu lapangan permainan yang samarata.²⁰⁹ Bank-bank yang dijalankan pemerintah Cina secara rutin telah menyalurkan pinjaman kepada bank-bank usaha milik negara yang tidak diharapkan akan dikembalikan. Dan saat ini, keempat bank pemerintah terbesar di Cina, karena semua tujuan praktis, tidak mampu membayar utang.

Sebagai bagian dari strategi perdagangan yang lebih luas, Cina telah membangun suatu tembok besar proteksionisme di sekeliling sektor pertanian dan industrinya. Salah satu strategi yang bermata dua ini mencakup jaringan subsidi langsung dan tidak langsung yang rumit, khususnya untuk memajukan industri-industri pilar utama. Strategi kedua meliputi beberapa hambatan perdagangan yang sama-sama rumit yang memberikan perlindungan bagi beberapa industri dalam negeri dan sektor pertanian yang paling rentan. Dalam hal ini, energi maupun air disubsidi besar-besaran, dan listrik murah merupakan keunggulan biaya besar bagi pabrik-pabrik baja dan industri berat di Cina. Pada saat yang sama, badan usaha milik negara yang masih menguasai sektor utama perekonomian diuntungkan dari tanah gratis, perusahaan lain diberi akses istimewa oleh pemerintah daerah dan regional untuk memperoleh tanah.

Selain itu, bank-bank milik pemerintah Cina menyediakan modal and kredit yang disubsidi besar-besaran kepada perusahaan-perusahaan Cina. Bank-bank saat ini dan secara bersama-sama mempunyai dalam pembukuannya puluhan miliar dolar dalam bentuk pinjaman tanpa sedikitpun harapan untuk dikembalikan. Akhirnya, dari sisi subsidi, banyak industri dari sektor teknologi tinggi seperti bioteknologi, elektronik dan komputer maupun sektor teknologi menengah seperti

²⁰⁸ Peter Navarro, *Op. Cit.*, hal. 18-19.

²⁰⁹ Kata-kata oleh Menteri Perdagangan Donald L. Evans kepada Dewan Ekspor Presiden Kamar Dagang Amerika di Beijing Cina, 23 Juni 2004, <http://hongkong.usconsulate.gov/uscn/trade/general/doc/2004/062301.htm>, diakses pada 19 Mei 2011 pukul 21.45 WIB.

mobil dan pesawat terbang menerima dukungan litbang langsung secara besar-besaran dari pemerintah.

Tidak cukup pemerintah Cina berupaya memberikan industri ekspornya setiap keunggulan yang memungkinkan, karena pemerintah berusaha untuk melindungi banyak sektor dalam negerinya. Proteksionisme semacam ini dicapai lewat beberapa hambatan tarif dan non-tarif yang berbelit-belit. Sama halnya dari sisi industri, Cina juga menggunakan standar teknologi yang tidak sapat dibenarkan dan ganjil untuk membangun tembok di sekeliling piranti lunak, telepon genggam, jaringan nirkabel, dan industri lainnya. Negara juga memperlakukan pajak istimewa untuk memajukan dan melindungi industri-industri kunci seperti semikonduktor, membatasi akses ke saluran pasar domestik dan mengenakan ketentuan permodalan yang berlebihan terhadap jasa keuangan luar negeri. Namun kepatuhan Cina pada peraturan WTO untuk menghilangkan subsidi dan proteksionis ini ternyata merupakan sandiwara dan khayalan besar sama seperti yang tampak dalam pers Cina yang sangat disensor, dan untuk sebagian besar, dikontrol pemerintah.²¹⁰

3.3.3 Signifikasi WTO bagi Cina

Sebagai anggota WTO, selain memiliki kewajiban, Cina juga memiliki hak di dalam provisi WTO tentang Badan Penyelesaian Sengketa terkait dengan sengketa yang terjadi di antara anggota-anggotanya. Sengketa yang terkait biasanya menyangkut praktik dumping yang merugikan suatu negara. Negara yang merasa dirugikan oleh kegiatan dumping bisa meminta Badan Penyelesaian Sengketa (BPS) membentuk panel atau menentukan pemecahan masalahnya. Peran panel ini hanya menentukan apakah pemerintah negara pengimpor (yang terkena dumping) sudah menyampaikan fakta secara benar dan obyektif. Langkah penyelesaian selanjutnya ditempuh oleh negara yang merugi dan dirugikan. Ini artinya Cina *can now resort to the WTO dispute settlement mechanism to protect its trade interests.*²¹¹

²¹⁰ Peter Navarro, *Op. Cit.*, hal. 17-21.

²¹¹ Ramesh Adhikari & Yongzheng Yang, *Op. Cit.*, hal. 2.

Cina tercatat sebagai salah satu anggota WTO yang cukup serius dan tekun mengikuti penyelesaian sengketa dagang yang terjadi di antara anggota WTO. Terhitung sebanyak 62 kasus yang terjadi, Cina bertindak partisipan pihak ketiga. Tidak termasuk di dalamnya adalah Cina sebagai pihak *complainant* atau penuntut pada kasus US Steel *Safeguards*, dan US Anti-Dumping and Countervailing Duties on Coated Paper, dan sebagai respondent dalam 11 kasus.²¹²

Dalam lima tahun pertama keanggotaannya, Cina mempelajari terlebih dahulu mekanisme pemecahan sengketa di dalam WTO. *Dispute settlement* dinilai Cina sebagai *political-diplomatic mechanism* untuk mencari jalan keluar melalui kompromi dan konsiliasi, *before adversarial legal procedures kicked in*. AS, UE dan negara anggota lain memiliki kecenderungan untuk tidak tergesa-gesa membawa kasus yang berhubungan Cina ke *dispute settlement* WTO, mengingat kasus yang pernah terjadi yakni VAT-Integrated Circuits, EU-Coke Exports and Anti-Dumping Kraft Linerboards²¹³, Cina berhasil melakukan konsesi dan diselesaikan dalam tahap konsultasi.

Meski demikian, tidak sedikit juga kasus-kasus yang terkait dengan Cina terus digulirkan oleh negara-negara anggota WTO lainnya yang tidak hanya sampai tahap konsultasi pada *dispute settlement*. Salah satunya adalah sengketa dagang pakaian jadi dan tekstil, dimana Committee for the Implementation of Textile Agreements (CITA) menjatuhkan *safeguards* pada tahun 2003 yang disinyalir telah menyebabkan *market disruption*. Ditindaklanjuti oleh melalui perwakilannya yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah AS bertentangan dengan prinsip WTO yang menjunjung tinggi perdagangan bebas, transparansi dan non-diskriminasi. Menteri Perdagangan Cina, Bo Xilai menuduh AS menggunakan standar ganda dalam negosiasi perdagangannya. Menurutnya, standar ganda seharusnya tidak digunakan dalam perdagangan internasional dimana AS menginginkan perdagangan bebas untuk produknya, tetapi membatasi

²¹² http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm, diakses pada 27 Mei 2011 pukul 15.33 WIB.

²¹³ Pada kasus pertama, AS menuntut Cina bahwa telah terjadi pelanggaran pada TRIMs Agreement, yang berakhir pada penyelesaian di tahap konsultasi oleh Cina. Kasus kedua, UE menuduh Cina telah melakukan pembatasan ekspor coca-cola yang menyebabkan penurunan *supply* dan menaikkan harga impor coca-cola dari EU. Cina menyelesaikan kasus ini setelah tahap konsultasi. Pada kasus terakhir, AS menuduh Cina melakukan anti-dumping tanpa mengikuti prosedur anti-dumping yang berlaku di WTO. Cina menyelesaikan kasus ini setelah tahap konsultasi.

produk dari negara berkembang. Proteksi seperti itu akan merusak perdagangan yang sehat. *Safeguard* yang tanpa mengadakan konsultasi terlebih dahulu serta berlaku sampai dengan 2005 telah mengakibatkan kerugian besar sehingga Cina mengumumkan akan mengenakan pajak ekspor sebesar 400 persen mulai Juni 2005. Kemudian dilakukan konsultasi di antara kedua belah pihak yang diasumsikan sebagai tahapan kedua namun tidak ada titik temu. Sampai akhirnya disepakati bahwa pertumbuhan impor AS dari Cina akan dibatasi sampai dengan 2008.²¹⁴

Selain bersengketa dengan AS, Cina juga memiliki sengketa dagang dengan UE dalam bidang yang sama yakni tekstil. Hanya saja sebelum menjatuhkan kuota, UE melakukan konsultasi terlebih dahulu sehingga kesepakatan lebih mudah dicapai dalam kasus tekstil dengan UE dibandingkan dengan AS. Ketiga pihak sadar bahwa meski sengketa dagang ini tidak berhubungan secara formal, namun ketiga negara ini tidak membawa kasus tersebut sampai ke tingkat DSB.

Kasus lainnya adalah tuntutan yang diajukan AS, UE dan Canada dalam hal industriomotif pada 2006, yang dinilai mengandung unsur kecurangan di dalam komponen impor dan lokal, yang berarti pelanggaran pada prinsip national treatment. Cina tidak menyelesaikan kasus ini pada tahap konsultasi, tetapi diteruskan sampai ke tingkat pengadilan resmi. Kasus selanjutnya terjadi di tahun-tahun berikutnya, yakni 2007 dan 2008. Tercatat bahwa AS menuduh Cina telah melakukan pengecualian dan pengembalian pajak dalam industri manufaktur lokal yang artinya telah terjadi pelanggaran prinsip subsidi dan *countervailing measures*. Pada kasus ini, dalam tahap konsultasi, kedua pihak sepakat untuk melakukan *removing alleged prohibited subsidies*. Hal yang sama terjadi kembali, AS menuding Cina telah melakukan pelanggaran pada IPR, dimana telah terjadi pembajakan film-film, buku, musik, jurnal dan sebagainya. Dalam hal ini, sebagian tuntutan terhadap Cina telah sampai pada tingkat panel, selebihnya diselesaikan Cina pada tahap konsultasi.²¹⁵

²¹⁴ US Government Press Release, *China Signs Comprehensive Bilateral Textile Agreement*, <http://www.america.gov/st/washfile-english/2005/November/2005.html>, diakses pada 23 Mei 2011 pukul 18.30 WIB.

²¹⁵ *Ibid.*, hal. 6-8.

Kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa WTO merupakan institusi yang cukup efektif dalam menjembatani perbedaan maupun sengketa yang terjadi di antara negara anggotanya. Hal ini berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat WTO membuat AS dan Eropa relatif tidak punya kuasa mengenakan tarif efektif terhadap produk-produk impor Cina. WTO hanya mengizinkan batasan perdagangan demi penghematan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Diramalkan suatu situasi dimana AS dan Eropa bisa menyaksikan industri intinya menjadi hampa, tanpa ada banyak hal yang bisa dilakukan secara legal sebagai tanggapan.²¹⁶

3.4 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor internal dan eksternal Cina merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Kemampuan internal ditandai dengan kesiapan Cina sebelum aksesinya di WTO dalam bentuk perekonomian domestiknya yang relatif kuat secara fundamental. Perekonomian domestik yang relatif kuat telah dipersiapkan Cina semenjak melakukan reformasi dan pembukaan diri pada era Deng Xiaoping. Kesiapan ini kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan kebijakan untuk berintegrasi dengan perdagangan global. Ini menandakan kemampuan Cina secara eksternal dengan melakukan berbagai penyesuaian di dalam konteks WTO. Aksesinya di WTO memiliki kendala-kendala baik yang bersifat ekonomis maupun struktural. Kendala ekonomis dapat dikatakan sebagai bentuk kerugian-kerugian yang harus ditanggung Cina seperti antara lain biaya-biaya yang besar bagi banyak perusahaan-perusahaan domestik Cina yang kurang kompetitif (untuk riset dan pengembangan) dalam menghadapi perusahaan multi-nasional dari negara-negara maju, kerugian bagi para petani akibat persaingan harga dengan hasil pertanian impor yang pada akhirnya menimbulkan kenaikan angka pengangguran sehingga dapat meningkatkan kriminalitas. Sementara kendala struktural yang bersifat domestik seperti struktur pemerintahan dan sistem ekonomi tetap dipertahankan meski tidak sepenuhnya.

Seperti yang tercantum dalam Protokol Aksesinya Cina di WTO, bahwa Cina berkomitmen untuk melaksanakan berbagai persyaratan yang diajukan untuk menjadi bagian dari WTO seperti pelaksanaan prinsip-prinsip WTO yaitu non-diskriminasi,

²¹⁶ David M. Smick, *The World is Curved*, Penguin Group Inc., New York, 2008, hal. 43.

market opening, transparan dan *predictable, undistorted trade*, serta tidak berlakunya prinsip *preferential treatment for developing countries* bagi Cina. Pemenuhan komitmen tersebut dilaksanakan pemerintah Cina dengan melakukan penurunan tarif impor secara bertahap, pembukaan pasar domestik bagi usaha-usaha asing serta perbaikan di bidang hukum demi kelonggaran dan keleluasaan bagi investasi asing maupun hak atas kekayaan intelektual. Perubahan-perubahan tersebut memperlihatkan bahwa Cina secara konkrit dan masif melakukan berbagai penyesuaian. Selain bersifat konkrit dan masif, penyesuaian yang dilakukan Cina juga sangat teliti yang ditandai dengan adanya indikasi bahwa komitmen Cina dilaksanakan secara tidak menyeluruh yaitu dengan adanya berbagai *complain* terutama dari negara-negara maju mengenai ketidakpatuhan Cina dalam menjalankan komitmennya sebagai anggota WTO. Di dalam mengatasi kendala struktural eksternal yang dipolitisir oleh negara-negara maju, Cina melaksanakan haknya dengan baik di dalam BPS WTO dimana tidak jarang Cina masuk dalam arena ini dan berhasil meng-*counterback* negara-negara mitra dagangnya terutama negara-negara maju. Ini memperlihatkan bahwa Cina berhasil dengan baik memanfaatkan WTO sebagai instrumen demi mencapai kepentingan-kepentingannya.

Bab 4

Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian dalam tesis ini yaitu mengapa Cina dapat menjadi kekuatan ekonomi baru di WTO, penulis membuat hipotesa sementara bahwa keberhasilan Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di WTO ditentukan oleh faktor internal yakni kesiapan Cina yang ditandai dengan kuatnya perekonomian secara fundamental serta faktor eksternal yaitu penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan Cina pasca aksesinya di WTO yang menjadikan WTO sebagai instrumen bagi negara tersebut.

Menurut sudut pandang kaum neorealis, semua negara dalam sistem internasional dibuat sama secara fungsional oleh tekanan struktur. Namun yang menjadi masalah adalah kemampuan negara-negara dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut berbeda. Jadi negara-negara 'dipaksa' untuk menunjukkan fungsi yang sama persis meski mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kemampuan masing-masing negara untuk mengejar dan mencapai tujuan bersama berbeda-beda sesuai dengan tingkatan mereka dalam sistem internasional, terutama kekuatan relatif mereka. Menurut John Ikenberry, negara sudah sepantasnya secara konsisten melakukan penyesuaian baik secara domestik maupun internasional. Penyesuaian yang dilakukan mengacu pada kemampuan negara mengatasi berbagai kendala ekonomis dan struktural yang timbul. Bahkan kemampuan tersebut dapat berkembang menjadi suatu bentuk pemanfaatan struktur demi mencapai kepentingan-kepentingan suatu negara.

Cina berhasil menjadi kekuatan baru di WTO dengan menggunakan berbagai indikator ekonomi. Keanggotaan Cina di WTO membuka banyak kesempatan terutama semakin terbukanya pangsa pasar negara-negara maju. Cina melesat maju di berbagai indikator ekonomi, khususnya surplus perdagangan luar negeri serta investasi asing langsung yang masuk sehingga menjadikan negara tersebut memiliki kepemilikan modal yang besar yang dapat dilihat dari jumlah cadangan devisanya. Ekspor dan investasi asing yang kemudian terlihat dominan

sebagai motor penggerak ekonomi Cina sehingga mengantarkan negara tersebut sebagai negara yang patut diperhitungkan di WTO bahkan di dunia.

Keberhasilan Cina tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal negara tersebut yang mengacu pada kemampuannya untuk mempersiapkan diri sebelum masuk di dalam WTO sebagai struktur internasional serta kemampuannya melakukan berbagai penyesuaian dengan pertimbangan kendala-kendala ekonomis dan struktural yang timbul sebagai pilihan atas kebijakannya bergabung di dalam WTO. Sebelum memutuskan ikut serta di dalam WTO, Cina telah mempersiapkan diri terlebih dahulu. Hal ini ditandai dengan perekonomian domestik negara tersebut yang secara relatif cukup kuat yang merupakan hasil diterapkannya reformasi dan pembukaan diri pada pemerintahan Deng Xiaoping. Setelah dirasakan cukup kuat, Cina kemudian berintegrasi dengan WTO. Berbagai perubahan dan reformasi kembali dilakukan. Pemerintah Cina melakukan implementasi yang bersifat keluar demi mewujudkan komitmennya sebagai anggota WTO di tahun 2001. Implementasi tersebut diwujudkan dengan misalnya penurunan tarif impor secara bertahap, membuka pasar domestiknya bagi usaha-usaha asing, dan sebagainya. Di satu sisi pelaksanaan komitmen Cina di WTO terlihat serius, tapi di sisi lain implementasi komitmen Cina tersebut bersifat parsial, seperti misalnya masih terjadi pembajakan atas HaKI, tidak adanya distribusi bebas barang-barang impor, tidak transparan dalam pembuatan peraturan, dan sebagainya. Meski demikian, secara menyeluruh dapat terlihat bahwa Cina telah berhasil memanfaatkan WTO sebagai instrumennya untuk mencapai berbagai kepentingan negara tersebut yang salah satunya merupakan kekuatan ekonomi baru di WTO dan dunia.

4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman Cina dalam memetik keuntungan di lingkungan internasionalnya (WTO), dapat dijadikan referensi ataupun acuan bagi negara-negara berkembang lainnya termasuk Indonesia.

Dengan diawali kesiapan yang ditandari dengan perekonomian yang relatif kuat, Cina memulai kiprahnya kemudian di panggung internasional. Simbol ketidaksetaraan maupun berbagai resiko untung rugi tidak menyurutkan Cina.

Kesadaran akan tantangan dunia yang semakin kompetitif, menjadikan negara tersebut tidak memiliki pilihan lain selain turut berperan serta.

Oleh karena itu, mengacu pada pengalaman Cina, yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia yang pertama adalah melakukan persiapan dari dalam atau secara domestik, seperti perbaikan iklim investasi. Indonesia dikenal dengan berbagai pungutan liar yang menjadikan produk-produk menjadi semakin tidak kompetitif. Didukung kemudian dengan inefisiensi pihak birokrasi dan ketidakjelasan peraturan investasi yang kurang mendukung berkembangnya investasi asing yang masuk. Hal-hal seperti ini menjadikan biaya praktik ekonomi menjadi tinggi, sehingga sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian yang serius dalam sektor ini, misalnya dengan pengurangan pungutan liar, efisiensi aturan yang berlaku, maupun efisiensi di tingkat birokrasi, dan hal-hal lain yang terkait yang dapat meningkatkan nilai investasi asing yang masuk. Menjaga kelangsungan produk unggulan saat ini dalam hal kualitas dan tingkat daya saing juga sudah saatnya menjadi perhatian pemerintah. Dapat dilakukan melalui pembaharuan kebijakan-kebijakan perindustrian dan perdagangan yang koheren, ekstensifikasi dan diversifikasi produk unggulan, kebijakan yang mengakomodir *research and development* yang masih sangat minim di negara-negara berkembang, seperti misalnya pemberian subsidi dan keringanan pajak. Perbaikan infrastruktur juga diyakini sangat memberikan efek yang positif.

Keberhasilan Cina merupakan *lesson learn* bagi Indonesia yang tidak ada salahnya untuk ditiru. Di era globalisasi yang sangat kompetitif ini, sudah saatnya Indonesia lebih cerdas membaca situasi dan mengambil langkah-langkah yang strategis dan konsisten demi kemajuan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bakry, Umar Suryadi, *Cina, Quo Vadis? Pasca Deng Xiaoping*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Bhattachali, Deepak, Shantong Li, Will Martin, *China and the WTO*, World Bank and Oxford University Press, Washington 2004.
- Brahms, Laurence J., *China After WTO*, China Intercontinental Press, China, 2002.
- Burchill, Scott & Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Carr, Edward Hallet, *The Twenty Years' Crisis 1919-1939*, MacMillan & Company Ltd., London, 1939.
- Cheng, Allen T., *What China Wants*, International Institutional Investors, September 2009.
- Cline, Ray S., *World Power Assessment: A Calculus of Strategic Drift*, Georgetown University, Washington D.C., 1975.
- Damanhuri, Didin S., *Ekonomi Politik dan Pembangunan*, PT. Penerbit IPB Press, Bogor, 2010.
- Djafar, Zainuddin, *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 2008.
- Ekawarna & Fachruddiansyah Muslim, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Gaung Persada, Jakarta, 2010.
- Gilpin, R., *War and Change in World Politics*, Cambridge University Press, New York, 1981.
- Goldstein, Avery, *Rising to the Challenge: China's Grand Strategy and International Security*, Standford University Press, California, 2005.
- Gungwu, Wang & John Wong, *Interpreting China's Development*, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, 2007.
- Halwani, R. Hendra, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

- Harding, Neil, *The State in Socialist Society*, Macmillan, London, 1984.
- Held, David and Anthony McGrew, *The Global Transformation: A Reader*, Polity Press, Cambridge, 2000.
- Hermawan, Lili, *Keluar dari Krisis Global*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2008.
- Howell, Jude, *China Opens Its Doors*, Lynne Rienner Publishers Inc., USA, 1993.
- Jackson, Karl D., *Asia Contagion: The Causes and Consequences of a Financial Crisis*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1998.
- Jhamtani, Hira, *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, Insist Press, Yogyakarta, 2005.
- Juliantono, Ferry J., *Pertanian Indonesia di bawah Rezim WTO*, Penerbit Banan, Jakarta, 2007.
- Keohane, Robert O. & Joseph S. Nye, *Power and Interdependence : World Politics in Transition*, Little Brown Company, Boston, 1977.
- Keohane, Robert O., *Neorealism & Its Critics*, New York: Columbia University Press, 1986.
- Krasner, Stephen D., *International Regimes*, Cornell University Press, New York, 1983.
- Lieberthal, Kenneth, *Governing China: From Revolution Through Reform*, WW Norton and Company, London, 1995.
- Mar, Pamela C. M. dan Frank Jurgen Richter (eds.), *China, Enabling a New Era of Changes*, John Wiley & Sons, Singapore, 2003.
- Naisbitt, John & Doris, *China's Megatrends*, HarperCollins, New York, 2010.
- Navarro, Peter, *The Coming China Wars*, FT Press, New Jersey, 2007.
- Nolam, Peter, *China and the Global Economy*, Palgrave, New York, 2001.
- Nye, Joseph S. Jr., *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*, Basic Books Inc., New York, 1990.
- Overholt, William M., *China the Next Economic Superpower*, Weidenfeld & Nicolson, London, UK, 1993.

- Plano, Jack C., *The International Relations Dictionary* (Kamus Hubungan Internasional), CV. Putra A. Bardin, 1999.
- Putong, Iskandar, *Economics, Pengantar Mikro dan Makro*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
- Richard, Little & Michael Smith (Ed.), *Perspectives on World Politics*, Routledge, 1991.
- Shmabaugh, David, *China and Asia's New Dynamic*, Berkeley, California, 2006.
- Shambaugh, David, *China and Europe: The Emerging Axis for the Twenty First Century*, Brooking Institution, 2004.
- Siradjuddin, Effendi, *Memerangi Sindrom Negara Gagal*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2009.
- Smick, David M., *The World is Curved*, Penguin Group Inc., New York, 2008.
- Steans, Jill & Lloyd Pettiford, *International Relations: Perspectives & Themes*, Essex: Pearson Education Limited, 2001.
- Stiglitz, Joseph E., *The Roaring Nineties: A New History of the World's Most Prosperous Decade*, WW Norton Comp. Inc., New York, 2003.
- Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Tse, Edward, *The China Strategy; Harnessing the Power of the World's Fastest Growing Economy*, Perseus Books Group, New York, 2010.
- Viotti, Paul R. & Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, McMillan Publishing Company, New York, 1990.
- Waltz, Kenneth, *Theory of International Politics*, New York, 1979.
- Wibowo, I. dan Syamsul Hadi, *Merangkul Cina*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2009.
- Wibowo, I., *Belajar dari Cina*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2004.
- Wibowo, I., *Negara dan Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2000.
- Widyahartono, Bob, *Bangkitnya Naga Besar Asia: Peta Politik, Ekonomi, dan Sosial China Menuju China Baru*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004.

- Wiryawan, Bangkit A., *Zona Ekonomi Khusus, Strategi China Memanfaatkan Modal Global*, CCS: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2008.
- Wong, John dan Zheng Yongnian (eds.), *The Nanxun Legacy and China's Development in the Post-Deng Era*, Singapore University Press, Singapore, 1999, 2001.
- Wong, John, *Understanding China's Socialist Market Economy*, Times Academic Press, Singapore, 1993.
- Wright, Chris, *Crisis? What Crisis?*, dalam Allen T. Cheng, *What China Wants*, International Institutional Investors, 2009.
- Wu, Jinglian, *Understanding and Interpreting Chinese Economic Reform*, TEXERE, Thomson-South Western, UK, 2005.
- Zaenurrofik, A., *China Naga Raksasa Asia*, Garasi, Yogyakarta, 2008.

Jurnal/Publikasi Lembaga

- Amiti, Mary & Caroline Freund, *China's Export Boom*, Finance and Development, IMF Quarterly Magazine, Vol. 44 No. 3, 2007.
- Azis, Jahangir & Li Cui, *Explaining China's Low Consumption*, IMF Working Paper, IMF, 2010.
- Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral – Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan – Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Edisi Kedua, 2003.
- Eaglin, Michaela, *China's Entry into the WTO with a Little Help from the UE*, International Affairs, 1997, Vol. 73 No. 3, 1997.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, *Laporan KBRI Beijing Tahun 2003* (Buku II Operasional), Beijing, 2004.
- Scott, David, *The 21st Century as Whose Century?*, Journal of World-Systems Research, Vol. XIII, No. 2, 2008.
- Scott, Robert E., *The High Cost of the China-WTO Deal*, Journal of Economic Policy Institute, Washington, 2000.
- The World Bank. *China 2020: China Engaged*, The World Bank, Washington DC, 1997.

Berita Media Massa

Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik 4.7 Persen, *Tempo*, 7 Juli 2004.

The Sucking Sound from East, *The Economist*, 26 Juli 2003.

China Percaya Diri, *Kompas*, 6 Maret 2009.

Five Myths about China's Economy, *The Japan Times*, 15 April 2010.

The One-Two Punch, *Far Eastern Economic Review*, 2 Oktober 2003.

Let Me Entertain You, *The Economist*, 15 Agustus 2009.

China Trade Minister Accuses US, Europe of Double Standards' on Textiles, Xinhua Financial Networks, 2005.

Export Tariffs for Some Textiles Products Exempted, Xinhua News Agency, 25 Mei 2005.

Publikasi Elektronik

Adhikari, Ramesh & Yongzheng Yang, *What Will WTO Membership Mean for China and Its Trading Partners?*, http://relooney.fatcow.com/3040_c188.pdf

Baker, Mark and David Orsmond, *Household Consumption Trends in China*, <http://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2010/mar/pdf/bu-0310-3.pdf>

Chow, Gregory C., *The Impact of Joining WTO on China's Economic, Legal and Political Institutions*, *Journal of Economic Literature*, hal. 2 <http://www.princeton.edu/~gchow/WTO.pdf>

Erixon, Fredrik & Patrick Messerlin & Razeen Sally, *China's Trade Policy Post-WTO Accession: Focus on China-EU Relations*, <http://www.ecipe.org/people/fredrik-erixon/speeches-and-presentations/CHINAS%20TRADE%20POLICY%20POST-WTO%20ACCESSION.pdf>

External Trade, European Communities, *EU-25 Trade in Textile 2005*, Gambini Gilberto, 2007, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-063/EN/KS-SF-07-063-EN.PDF

FDI, www.FDI magazine.com/news/printpage.php,

Financial Service Liberalization in the WTO: Case Studies China, <http://www.iie.com/CATALOG/casestudies?DOBSON/hotchina.htm>

- Frost, Ellen L., *What Is Economic Power*, http://findarticles.com/p/articles/mi_m0KNN/is_53/ai_n31506031/pg_4/
- Hao, Xie, *The Relation Between China's Economic Growth and Sino-US Trade*, Lund University, <http://biblioteket.ehl.lu.se/olle/papers/0002992.pdf>
- Hertz, Noreena, *The Silent Take-over: Global Capitalism and the Death of Democracy*, http://www.thirdworldtraveler.com/Global_Economy/Silent_Takeover.html,
- Hom, Sharon K., *China and the WTO: Year One*, China Rights Forum, No. 1, 2003,
<http://www.hrichina.org/public/PDFs/CRF.1.2003/SharonHom1.2003.pdf>
- <http://al.china-embassy.org/eng/zggk/t514666.htm>
- <http://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS>
- <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/03/30/paten-dan-pertumbuhan-ekonomi-cina/>
- <http://kompas.com/kompas-cetak/0512/16/ln/2292674.htm>
- <http://preview.detik.com/detiknews/read/2007/01/25/123933/734585/4/ekonomi-cina-tumbuh-107-tercepat-sejak-11-tahun-terakhir>
- http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2006-12/14/content_758772.htm
- http://www.economywatch.com/world_economy/world-economic-indicators/
- <http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/12/27/brk,20091227215827,id.html>,
- <http://www.uschina.org/info/chops/2006/china-economy.html>
- <http://www.wto.org/>
- http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm,
- Hughes, Kent, *China and the WTO – Domestic Challenges and International Pressures*, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C, 2002, <http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/WTOOrpt.pdf>
- Jones, Vivian C., *Safeguard on Textile and Apparel Import from China*, CRS Report for Congress, www.usis.it/pdf/other/RL32168.pdf

Kata-kata oleh Menteri Perdagangan Donald L. Evans kepada Dewan Ekspor Presiden Kamar Dagang Amerika di Beijing Cina, 23 Juni 2004, <http://hongkong.usconsulate.gov/uscn/trade/general/doc/2004/062301.htm>,

Kynge, James, *Rahasia Sukses Ekonomi Cina: Kebangkitan Cina Menggeser Amerika Serikat Sebagai Super Power Ekonomi Dunia*, <http://www.bukukita.com/infodetailbuku.php?idBook=4692>

Morrison, Wayne M., *CRS Report for Congress – China's Economic Conditions*, http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/key_workplace/499/

Qinglian, He, *What Are the Benefits of China's Entry into WTO?*, http://www.uscc.gov/researchpapers/2000_2003/pdfs/whatbene.pdf

The US-China Business Council, *Foreign Investment in China*, <http://www.uschina.org/public/documents/2008/02/2008-foreign-investment.pdf>

United Nations Conference on Trade and Development, *World Investment Report 2006: FDI from Developing and Transition Economies*, United Nations, 2006, www.unctad.org/en/docs/wir2006overview_en.pdf

US Government Press Release, *China Signs Comprehensive Bilateral Textile Agreement*, <http://www.america.gov/st/washfileenglish/2005/November/20051105.html>

World Trade Organization, *How to Become a Member of WTO*, http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_e.htm

WTO Entry Boosts China's Economy, <http://www.china.org.cn/english/49058.htm>

Zhai, Fan & Shantong Li, *The Implication of Accession to WTO on China's Economy*, <http://monash.edu.au/policy/conf/76FanZhai.pdf>,